

Ekonomi Makro

Teori-Teori Pengantar

Penulis:

Zul Fadli, S.E., M.A.P.

Ade Onny Siagian, M.M., M.H., M.A.P., M.I.Kom.

Nurganda Siregar, S.E., M.Si

Dona Amelia, S.E., M.Si

Fandra Dikhi Januardani, S.E., M.M.

Nanda Harry Mardika, S.Pd., M.M.

Dr. Dedi Herdiansyah

Sriwanti Belani, S.E., M.M.

Dr. Abdurohim, S.E., M.M.

Muhammad Jamil, S.E., M.M.



Ekonomi Makro: Teori-Teori Pengantar

Penulis

Zul Fadli, S.E., M.A.P.

Ade Onny Siagian, M.M., M.H., M.A.P., M.I.Kom.

Nurganda Siregar, S.E., M.Si

Dona Amelia, S.E., M.Si

Fandra Dikhi Januardani, S.E., M.M.

Nanda Harry Mardika, S.Pd., M.M.

Dr. Dedi Herdiansyah

Sriwanti Belani, S.E., M.M.

Dr. Abdurohim, SE, MM.

Muhammad Jamil, S.E., M.M.

Editor:

Dr. Elfiswandi, S.E, Ak, CA, M.M, CIRBC



Penerbit CV. Gita Lentera

Ekonomi Makro: Teori-Teori Pengantar

Oleh:

Zul Fadli, S.E., M.A.P.

Ade Onny Siagian, M.M., M.H., M.A.P., M.I.Kom.

Nurganda Siregar, S.E., M.Si

Dona Amelia, S.E., M.Si

Fandra Dikhi Januardani, S.E., M.M.

Nanda Harry Mardika, S.Pd., M.M.

Dr. Dedi Herdiansyah

Sriwanti Belani, S.E., M.M.

Dr. Abdurohim, SE, MM.

Muhammad Jamil, S.E., M.M.

Editor: Dr. Elfiswandi, S.E, Ak, CA, M.M, CIRBC

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

©All right reserved

ISBN: 978-623-09-5532-7

Penyunting : Adnan

Desain Sampul : Sri Nursanti

Penerbit : CV. Gita Lentera

Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel.
Pisang, Kec. Pauh, Padang Kel. Pisang, Kec.
Pauh, Padang

Website: <https://gitalentera.com>

Email: git4lenter4@gmail.com

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, 2023

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

“Di mana ada harta benda yang besar, ada ketimpangan yang besar.”
—Adam Smith

Rasa Syukur dan ucapan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua kesempatan dan kemampuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Buku **Ekonomi Makro: Teori-Teori Pengantar** ini. Tujuan buku ini hadir dalam pengantar keilmuan ekonomi makro adalah sebagai sumber pengetahuan dalam bidang ekonomi bagi pembaca terkhusus pada teori-teori pengantar yang ada di dalamnya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku referensi ini. Buku “Ekonomi Makro: Teori-Teori Pengantar” ini adalah karya dari berbagai penulis yang memiliki latar belakang sebagai pengajar diperguruan tinggi dan praktisi dalam bidang ekonomi yang tentu telah memiliki pengalaman mempuni sesuai bidangnya.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu sangat diharapkan masukan dan saran untuk buku ini kedepan. Semoga tulisan ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, pembaca dan masyarakat pada umumnya.

DR. Elfiswandi, S.E, Ak, CA, M.M, CIRBC
Dosen S3 Manajemen UPI YPTK

SINOPSIS

Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Buku berjudul “Ekonomi makro: Teori-teori Pengantar” ini menghadirkan penjelasan secara rinci tentang konsep-konsep teoritis seputar Ekonomi Makro. Materi yang disajikan dalam buku ini dimulai dari Ruang Lingkup Ekonomi Makro, Perolehan dan Pengeluaran Nasional, Penentuan Kegiatan Ekonomi, Penawaran Uang, Kegiatan Ekonomi Nasional, Pengangguran, Inflasi dan Kebijakan Pemerintah, Kurs Valuta Asing, Neraca Pembayaran dan Kegiatan Ekonomi Terbuka, Hingga Materi Terkait Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Nasional. Ditulis oleh para dosen dan praktisi yang memahami bidang ekonomi, diharapkan buku ini dapat menjadi referensi tambahan untuk mendalami materi seputar ekonomi makro.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iv
SINOPSIS.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I RUANG LINGKUP EKONOMI MAKRO	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Definisi Ekonomi Makro	2
1.3. Konsep Inti Ruang Lingkup Ekonomi Makro	3
1.4. Kesimpulan.....	18
BAB II PEROLEHAN DAN PENGELUARAN NASIONAL.....	22
2.1. Pengertian Perolehan dan Pengeluaran Nasional.....	22
2.2. Gambaran Perolehan dan Pengeluaran Nasional dalam Teori Makro Ekonomi.....	23
2.3. Teori Teori Pengantar Ekonomi Makro	25
2.4. Siklus Perolehan dan Pengeluaran Nasional	27
2.5. Sejarah konsep perolehan dan pengeluaran nasional terkait erat dengan perkembangan ilmu ekonomi makro	28
2.6. Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi perolehan dan pengeluaran nasional dalam ekonomi	30
2.7. Metode Pengukuran Perolehan dan Pengeluaran nasional dalam ekonomi.....	32
2.8. Penutup.....	34
BAB III PENENTUAN KEGIATAN EKONOMI	38
3.1. Pendahuluan	38
3.2. Pembahasan.....	38
3.2.1. Golongan Moneteris	43
3.2.2. Golongan Ekspektasi Rasional dikenal Klasik Baru.....	44
3.2.3. Golongan Ekonomi Segi Penawaran	45
3.2.4. Golongan Keynesian Baru	45
3.3. Penutup.....	46
BAB IV KESEIMBANGAN UMUM	48
4.1. Konsep keseimbangan Umum	48
4.2. Keseimbangan Makro Ekonomi Secara Grafis	50
4.3. Perubahan Keseimbangan dan Penyebabnya.....	52

4.4. Efek Perubahan Serentak AD dan AS	54
4.5. Analisis Keseimbangan Umum Perekonomian Indonesia	56
BAB V PENAWARAN UANG	61
5.1. Pengertian Penawaran Uang	61
5.2. Penawaran Uang Tanpa Bank	62
5.3. Penawaran Uang Klasik.....	63
5.4. Penawaran Uang Modern	65
5.5. Jumlah Uang Beredar	66
5.6. Mekanisme Penciptaan Uang	67
5.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran Uang	69
BAB VI KEGIATAN EKONOMI NASIONAL.....	73
6.1. Pengertian Kegiatan Ekonomi	73
6.2. Jenis Kegiatan Ekonomi.....	74
6.2.1. Kegiatan Ekonomi Produksi.....	74
6.2.2. Kegiatan Ekonomi Distribusi	77
6.2.3. Kegiatan Ekonomi Konsumsi	78
6.3. Tujuan Kegiatan Ekonomi	80
6.4. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	81
6.5. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam pemulihan perekonomian.....	85
BAB VII PENGANGGURAN, INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH.....	89
7.1. Pendahuluan	89
7.2. Definisi Pengangguran dan Determinan yang Mempengaruhinya	89
7.3. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran	93
7.4. Definisi Inflasi dan Determinan yang Mempengaruhinya.....	94
7.5. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi	97
7.6. Kesimpulan.....	98
BAB VIII PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN GLOBALISASI	102
8.1. Pendahuluan	102
8.2. Definisi Perdagangan Internasional	103
8.3. Memperoleh Barang yang Tidak Dapat Diproduksi di dalam Negeri	104
8.4. Memperoleh Keuntungan dari Spesialisasi	104
8.5. Memperluas Pasar Industri-Industri dalam Negeri.....	105
8.6. Menggunakan Teknologi Modern dan Meningkatkan Produktivitas	106
8.7. Teori Perdagangan Internasional	106
8.8. Model Adam Smith	106
8.9. Model Ricardian	107
8.10. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perdagangan Internasional	

(Trade Between Countries).....	107
8.11. Konsep Ekonomi Modern tentang International Trade (Perdagangan Internasional)	108
8.12. Globalisasi dan Perdagangan Internasional (<i>International Trade</i>)..	109
8.13. Kesimpulan.....	110
BAB IX KURS VALUTA ASING, NERACA PEMBAYARAN DAN KEGIATAN EKONOMI TERBUKA	113
9.1 Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Negara.....	113
9.2. Kebijakan Valuta Asing.....	117
9.3. Neraca Pembayaran.....	120
9.4. Kebijakan Perekonomian Terbuka	124
9.5. Perekonomian terbuka memerlukan kebijakan moneter serta pemenuhan kerangka operasional yang kuat	127
9.6. Bank Sentral menetapkan strategis kebijakan moneter	132
9.7. Perkembangan Kebijakan Moneter Di Indonesia.....	137
BAB X PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL	151
10.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	151
10.2. Pengertian Pembangunan Ekonomi.....	152
10.3. Perbedaan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi.....	155
10.4. Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi	157

RUANG LINGKUP EKONOMI MAKRO

Oleh

Zul Fadli, S.E., M.A.P.

1.1. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita berinteraksi dengan berbagai aspek ekonomi. Dari harga barang dan jasa hingga peluang kerja yang tersedia, setiap keputusan ekonomi yang kita buat atau perubahan yang terjadi dalam perekonomian memiliki pengaruh yang lebih besar dari yang mungkin kita bayangkan. Namun, di balik kompleksitas ini, terdapat pemahaman yang lebih dalam yang melibatkan gambaran besar tentang bagaimana elemen-elemen ini saling berhubungan dan bagaimana kebijakan serta perubahan dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Inilah yang dimaksud ruang lingkup ekonomi makro.

Pada level mikro, kita mempertimbangkan keputusan individu, perusahaan, dan pasar dalam isolasi. Namun, saat kita mengambil langkah mundur untuk melihat ekonomi pada level yang lebih tinggi, gambaran yang lebih luas mulai terungkap. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi ruang lingkup ekonomi makro, yang melibatkan analisis sistem ekonomi secara keseluruhan dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Ekonomi makro tidak hanya tentang angka-angka dan statistik yang ada dalam laporan berita. Ini adalah tentang memahami dampak di balik angka-angka tersebut. Dari pertumbuhan ekonomi yang memberi kita peluang dan lapangan kerja hingga inflasi yang mempengaruhi daya beli kita, setiap indikator memiliki cerita yang lebih dalam tentang kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah.

Bab ini akan dipecah menjadi beberapa bagian yang memandu

Anda melalui konsep-konsep utama ekonomi makro. Mulai dari mengapa ekonomi makro penting hingga bagaimana pemerintah memainkan peran dalam mengelola perekonomian, bab ini akan memberikan dasar yang kokoh bagi pemahaman Anda tentang ruang lingkup ekonomi makro.

1.2. Definisi Ekonomi Makro

Definisi ekonomi makro telah dijelaskan oleh berbagai para ahli ekonomi terkemuka. Berikut adalah beberapa definisi ekonomi makro menurut para ahli:

- a. Menurut John Maynard Keynes, seorang ekonom terkemuka pada abad ke-20, mendefinisikan ekonomi makro sebagai studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseluruhan tingkat penggunaan sumber daya dalam perekonomian. Keynes menekankan pentingnya agregat pengeluaran dan dampak kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan dalam perekonomian (Hasyim, 2017).
- b. Menurut Paul Samuelson, pemenang Nobel dalam ekonomi, menggambarkan ekonomi makro sebagai studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Dia menekankan analisis agregat dalam perekonomian seperti pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi (Hasyim, 2017).
- c. Menurut Gregory Mankiw, juga merupakan seorang ekonom terkemuka, mendefinisikan ekonomi makro sebagai studi tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Dia juga menyoroti peran pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter (Waluyo, 2019).
- d. Menurut Olivier Blanchard, mantan Kepala Ekonom Dunia (Chief Economist) IMF, mendefinisikan ekonomi makro sebagai studi tentang pengaruh kebijakan moneter dan fiskal pada tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dia juga

menyoroti pentingnya ekspektasi dalam analisis ekonomi makro (Putong, 2015).

- e. Menurut Ben Bernanke, mantan Ketua Federal Reserve, mendefinisikan ekonomi makro sebagai studi tentang perilaku perekonomian secara keseluruhan, dengan fokus pada bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi (Curatman, 2010).

Definisi-definisi tersebut mencerminkan pandangan berbagai ahli ekonomi mengenai ruang lingkup dan fokus utama dari studi ekonomi makro. Kesamaan yang tampak dalam definisi ini adalah bahwa ekonomi makro melibatkan analisis keseluruhan perekonomian dan aspek-aspek besar yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas.

1.3. Konsep Inti Ruang Lingkup Ekonomi Makro

Dalam eksplorasi mendalam tentang ekonomi makro, kita akan memahami konsep inti yang membentuk ruang lingkup ini. Dari pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan arah kemajuan suatu negara, hingga interaksi kompleks antara inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah, kita akan menjelajahi aspek-aspek utama yang membentuk dinamika ekonomi dalam skala besar. Pemahaman tentang konsep-konsep ini akan memberi kita wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana elemen-elemen besar ini saling berhubungan dan bagaimana mereka mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kuantitatif dari nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Ini merupakan indikator penting yang menggambarkan kemajuan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya melibatkan kenaikan dalam output ekonomi, tetapi juga mencerminkan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka (Bakti et al., 2010).

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut (Soleh, 2014):

- a. Investasi dalam infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan bisnis dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Investasi yang cermat dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian.
- b. Pengembangan dan penerapan teknologi baru sering kali menghasilkan peningkatan efisiensi produksi dan menciptakan sektor-sektor baru, yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan ekonomi.
- c. Kualitas tenaga kerja dan keterampilan yang lebih tinggi dapat meningkatkan produktivitas, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan pelatihan yang baik menjadi penting dalam konteks ini.
- d. Stabilitas ekonomi, termasuk inflasi rendah dan stabilitas mata uang, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- e. Kebijakan pemerintah dan bank sentral dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan pengeluaran publik, suku bunga, dan kebijakan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membawa manfaat yang signifikan, menghasilkan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu manfaatnya adalah menciptakan dampak yang menguntungkan pada sektor lapangan kerja dan peluang pekerjaan. Semakin berkembangnya ekonomi, semakin banyak perusahaan yang tumbuh dan berinvestasi, yang akhirnya membuka peluang bagi penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini berarti masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan minat mereka.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga memberikan sumbangan signifikan dalam meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan output

ekonomi berarti peningkatan pendapatan per kapita, yang pada gilirannya memungkinkan masyarakat untuk mengakses lebih banyak barang dan jasa, serta memiliki kebebasan finansial yang lebih besar untuk mencapai tujuan hidup mereka.

Tidak hanya itu, dampak dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga dapat dirasakan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Seiring dengan peningkatan lapangan kerja, kemungkinan terjadinya pengangguran yang lebih rendah semakin meningkat. Selain itu, dengan lebih banyak kesempatan pekerjaan yang tersedia, kelompok masyarakat yang sebelumnya berjuang dalam kemiskinan dapat memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga terlihat dalam kapasitas pemerintah untuk membiayai layanan publik. Peningkatan pendapatan nasional memberi pemerintah lebih banyak sumber daya untuk mendukung berbagai program sosial, seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Ini berarti masyarakat dapat mengandalkan pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mendorong investasi dalam sektor-sektor yang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan adanya pendapatan yang lebih besar, pemerintah dan sektor swasta dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan yang lebih baik, sistem kesehatan yang lebih berkualitas, serta infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut.

Dalam kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bukan hanya tentang angka dan statistik, tetapi tentang dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Ini membentuk dasar bagi peningkatan kualitas hidup, kesempatan kerja, dan pembangunan yang berkelanjutan bagi suatu negara atau wilayah.

1.1.2. Inflasi

Dalam dunia ekonomi yang dinamis, memahami penyebab inflasi adalah langkah krusial untuk mengurai kompleksitas perubahan harga dan dampaknya terhadap perekonomian. Penyebab inflasi, baik yang berkaitan dengan permintaan berlebihan, biaya produksi, maupun faktor struktural, memiliki peran sentral dalam membentuk kondisi ekonomi yang berkembang. Dalam bahasan ini, mari kita melangkah lebih jauh untuk merincikan dan menganalisis faktor-faktor yang memicu kenaikan harga secara berkelanjutan (Santosa, 2017).

Adapun penyebab inflasi adalah sebagai berikut:

a. Permintaan Berlebihan

Jika permintaan atas barang dan jasa melebihi pasokan yang tersedia, produsen akan cenderung menaikkan harga untuk memanfaatkan ketersediaan yang rendah. Ini terjadi ketika masyarakat memiliki daya beli yang tinggi dan terus membeli lebih banyak barang.

b. Biaya Produksi yang Meningkat

Kenaikan biaya produksi, seperti bahan baku atau upah tenaga kerja, dapat mendorong produsen untuk menaikkan harga produk mereka. Jika biaya produksi naik, perusahaan mungkin akan mentransfer beban ini ke konsumen melalui harga yang lebih tinggi.

c. Inflasi Struktural

Faktor-faktor struktural dalam ekonomi, seperti monopoli atau birokrasi yang meningkatkan biaya produksi, dapat menyebabkan inflasi. Ketika perusahaan memiliki kontrol atas pasar atau birokrasi yang menghambat efisiensi, mereka dapat meningkatkan harga tanpa adanya persaingan yang signifikan.

d. Inflasi Inti

Ini adalah jenis inflasi yang diukur tanpa mempertimbangkan fluktuasi harga-harga bahan makanan dan energi. Fluktuasi harga ini cenderung lebih volatil dan dapat mengaburkan gambaran inflasi secara keseluruhan (Kartiasih, 2019).

Berikut merupakan beberapa dampak dari inflasi:

- a. Inflasi mengurangi daya beli uang. Masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama, sehingga bisa mengurangi daya beli mereka.
- b. Tingkat inflasi yang tinggi atau tidak stabil membuat perencanaan keuangan menjadi lebih sulit. Bisnis mungkin enggan berinvestasi dalam kondisi tidak pasti ini, dan individu juga kesulitan merencanakan masa depan mereka.
- c. Inflasi merugikan nilai riil tabungan. Nilai uang di masa depan akan lebih rendah daripada saat ini, sehingga mengurangi daya beli tabungan tersebut.
- d. Inflasi bisa memiliki efek distribusi yang tidak merata terhadap masyarakat. Mereka dengan pendapatan tetap atau rendah lebih terpuak oleh kenaikan harga-harga.
- e. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengaburkan sinyal pasar dan mengganggu keputusan investasi. Investor sulit untuk memprediksi nilai riil dari investasi mereka.
- f. Untuk mengendalikan inflasi, bank sentral mungkin akan menaikkan suku bunga. Ini dapat berdampak pada biaya pinjaman dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
- g. Inflasi yang tinggi atau tidak terkendali menciptakan ketidakpastian ekonomi di masa depan. Hal ini bisa merugikan investasi jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Santosa, 2017).

Dalam banyak kasus, target kebijakan ekonomi adalah menjaga tingkat inflasi yang moderat. Inflasi yang rendah dan stabil umumnya dianggap sebagai tujuan yang lebih baik, karena memungkinkan konsumen dan bisnis merencanakan masa depan dengan lebih baik, dan menghindari risiko yang terkait dengan inflasi yang tinggi.

1.1.3. Pengangguran

Pengangguran merujuk pada kondisi di mana individu yang

bersedia dan mampu bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan preferensi mereka. Ini adalah salah satu isu utama dalam ekonomi yang memiliki dampak signifikan pada individu, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan.

Tingkatan pengangguran mengacu pada klasifikasi yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dan penyebab pengangguran dalam perekonomian (Franita et al., 2019). Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang beberapa tingkatan pengangguran yang umum dikenal:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah situasi di mana individu mencari pekerjaan aktif dan siap untuk bekerja tetapi belum berhasil menemukan pekerjaan yang sesuai. Ini adalah bentuk pengangguran yang paling umum dan sering diukur oleh tingkat pengangguran resmi yang dilaporkan oleh pemerintah.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi terjadi ketika individu ingin bekerja tetapi tidak mencari pekerjaan aktif karena merasa peluang pekerjaan sangat terbatas. Mereka mungkin merasa putus asa atau berpikir bahwa mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja. Ini tidak tercatat dalam statistik resmi tentang pengangguran.

c. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional terjadi ketika individu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau masuk ke pasar kerja untuk pertama kalinya. Ini adalah pengangguran sementara saat mereka mencari pekerjaan yang lebih cocok dengan keterampilan dan preferensi mereka. Hal ini dapat terjadi karena perubahan dalam industri, perusahaan, atau geografi.

d. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi ketika ada ketidakcocokan antara

keterampilan atau lokasi pekerja dan permintaan pekerjaan yang tersedia. Para penganggur dalam kategori ini mungkin memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia atau mungkin berada di daerah geografis di mana pekerjaan yang sesuai tidak tersedia.

e. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal terjadi sebagai akibat fluktuasi siklus ekonomi. Selama resesi atau depresi ekonomi, aktivitas ekonomi menurun, perusahaan mulai merumahkan atau mengurangi tenaga kerja mereka untuk menghemat biaya. Pengangguran siklikal cenderung meningkat selama masa resesi dan berkurang selama periode ekspansi ekonomi.

f. Pengangguran Volontir

Pengangguran volontir terjadi ketika individu memutuskan untuk tidak bekerja karena upah yang ditawarkan tidak sebanding dengan biaya dan usaha yang dikeluarkan untuk bekerja. Ini sering terjadi ketika tingkat upah di bawah standar atau ketika kondisi kerja tidak memadai (Muslim, 2014).

Pengangguran memiliki dampak yang luas dan kompleks, baik pada individu, masyarakat, maupun perekonomian secara keseluruhan. Beberapa dampak utama dari pengangguran menurut (Franita et al., 2019) adalah sebagai berikut:

a. Dampak pada Individu

- 1) Individu yang menganggur kehilangan sumber utama pendapatan mereka, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan sandang.
- 2) Tanpa pendapatan yang stabil, individu dan keluarganya mungkin mengalami penurunan standar hidup dan kualitas hidup yang lebih rendah.
- 3) Pengangguran dapat menyebabkan tingkat stres dan kecemasan

yang tinggi pada individu. Rasa tidak pasti tentang masa depan dan kesulitan dalam mencari pekerjaan dapat berdampak pada kesejahteraan mental.

- 4) Pengangguran jangka panjang dapat mengakibatkan penurunan keterampilan dan produktivitas individu karena kurangnya praktik kerja dan pelatihan.

b. Dampak pada Masyarakat

- 1) Para penganggur cenderung mengurangi pengeluaran konsumsi mereka, yang dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa, berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- 2) Tingkat pengangguran yang tinggi atau kronis dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan ketegangan dalam masyarakat. Ini dapat berujung pada meningkatnya konflik dan ketidakharmonisan.
- 3) Pengangguran dapat meningkatkan tingkat kejahatan, karena individu yang menganggur mungkin merasa terdesak secara ekonomi dan mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka.

c. Dampak pada Perekonomian

- 1) Pengangguran dapat menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas ekonomi karena sumber daya tenaga kerja tidak digunakan secara efektif.
- 2) Pengangguran menghilangkan kontribusi ekonomi yang bisa diberikan oleh individu yang bekerja, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- 3) Kurangnya pendapatan dari pajak penghasilan individu yang menganggur dapat berdampak pada penerimaan pajak pemerintah.
- 4) Pemerintah mungkin perlu mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk membantu individu yang menganggur melalui program

pengangguran atau bantuan sosial lainnya.

Pengendalian pengangguran sering menjadi fokus kebijakan pemerintah dan bank sentral. Kebijakan fiskal dan moneter, pelatihan kerja, serta program-program pemberdayaan kerja dapat digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat.

1.1.4. Stabilitas Mata Uang

Stabilitas mata uang merujuk pada keadaan di mana nilai mata uang suatu negara atau wilayah cenderung relatif stabil dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, mata uang tidak mengalami fluktuasi besar atau berubah secara drastis dalam nilai relatif terhadap mata uang lain atau dalam hal daya beli domestik. Stabilitas mata uang memiliki implikasi penting bagi perekonomian, perdagangan internasional, dan investasi.

Stabilitas mata uang merupakan hasil dari interaksi faktor-faktor yang kompleks dan saling terkait, yang melibatkan berbagai aspek ekonomi, keuangan, politik, dan lingkup global. Dalam konteks ini, mata uang suatu negara menjadi refleksi dari dinamika yang terjadi dalam berbagai bidang (Eli Retnowati et al., 2022). Beberapa faktor utama yang memengaruhi stabilitas mata uang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan moneter memainkan peran sentral dalam mengatur stabilitas mata uang. Tindakan yang diambil oleh bank sentral dalam menentukan suku bunga, kebijakan kredit, dan intervensi di pasar valuta asing secara langsung mempengaruhi nilai tukar mata uang.
- b. Inflasi memainkan peran penting dalam stabilitas mata uang. Tingkat inflasi yang rendah mendukung nilai tukar yang stabil, sementara inflasi yang tinggi atau tidak terkendali dapat merusak daya beli dan kepercayaan terhadap mata uang.
- c. Stabilitas ekonomi menjadi dasar kuat bagi stabilitas mata uang. Perekonomian yang stabil, dengan pertumbuhan yang moderat, pengangguran rendah, dan neraca perdagangan seimbang,

menciptakan lingkungan yang mendukung nilai tukar mata uang yang tetap.

- d. Ketidakpastian politik dapat memberikan dampak besar pada stabilitas mata uang. Fluktuasi nilai tukar dapat dipicu oleh perubahan pemerintahan atau kebijakan ekonomi yang tidak stabil, menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku pasar.
- e. Perbedaan tingkat suku bunga antara negara-negara dapat mempengaruhi arus modal lintas batas. Ketidakseimbangan dalam tingkat suku bunga dapat memicu perubahan dalam nilai tukar mata uang.
- f. Kondisi ekonomi global juga dapat memengaruhi stabilitas mata uang secara signifikan. Peristiwa seperti krisis keuangan global atau perubahan harga komoditas dapat menciptakan fluktuasi dalam nilai tukar.

1.1.5. Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran

Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran adalah dua konsep utama dalam ekonomi yang menggambarkan aliran perdagangan dan transaksi antara suatu negara dengan negara lain. Meskipun keduanya berhubungan dengan aliran ekonomi lintas batas, mereka memiliki fokus yang sedikit berbeda.

Neraca Perdagangan mencatat nilai total ekspor dan impor barang suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Neraca perdagangan terdiri dari dua komponen utama, yaitu ekspor dan impor (Erika, 2022).

Ekspor merupakan nilai barang-barang dan jasa yang dijual oleh suatu negara kepada negara lain. Nilai ekspor yang lebih tinggi daripada nilai impor menghasilkan surplus perdagangan, yang berarti negara tersebut lebih banyak menjual daripada membeli, dan uang mengalir ke negara tersebut.

Sedangkan impor merupakan nilai barang-barang dan jasa yang dibeli oleh suatu negara dari negara lain. Nilai impor yang lebih tinggi

daripada nilai ekspor menghasilkan defisit perdagangan, yang berarti negara tersebut lebih banyak membeli daripada menjual, dan uang mengalir keluar dari negara tersebut.

Neraca Perdagangan adalah salah satu indikator penting dalam analisis ekonomi, karena dapat memberikan gambaran tentang kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan oleh pasar global.

Kemudian Neraca Pembayaran mencakup seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Neraca pembayaran lebih komprehensif daripada neraca perdagangan, karena mencakup transaksi perdagangan barang, jasa, dan keuangan. Ini terdiri atas tiga komponen, yaitu Neraca Transaksi Berjalan, Neraca Modal dan Keuangan, Neraca Bersih (Sugiyono, 2017).

Neraca Transaksi Berjalan mencatat semua transaksi perdagangan barang dan jasa, pengiriman uang antarnegara (remittances), dan penerimaan dari faktor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut di luar negeri (seperti pendapatan dari investasi). Neraca transaksi berjalan mencerminkan bagaimana negara tersebut berinteraksi dengan negara lain dalam hal ekonomi sehari-hari.

Neraca Modal dan Keuangan mencatat arus modal antarnegara, termasuk investasi langsung, investasi portofolio, dan perubahan dalam kepemilikan aset finansial. Jika suatu negara mendapatkan investasi asing yang signifikan, itu akan menciptakan aliran modal masuk.

Komponen terakhir adalah Neraca Bersih yang merupakan selisih antara neraca transaksi berjalan dan neraca modal dan keuangan. Jika suatu negara memiliki surplus neraca bersih, itu berarti negara tersebut lebih banyak menerima uang dari luar daripada mengirim uang keluar.

Neraca Pembayaran memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang aliran ekonomi suatu negara dengan negara lain, termasuk investasi lintas batas dan transaksi keuangan yang lebih luas.

Hal ini membantu dalam memahami keseimbangan ekonomi suatu negara dengan lingkungan internasionalnya.

1.1.6. Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter adalah dua alat utama yang digunakan oleh pemerintah dan bank sentral suatu negara untuk mengatur ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan, mereka melibatkan pendekatan yang berbeda dan fokus pada aspek yang berbeda dari ekonomi.

Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi kondisi ekonomi. Ini melibatkan pengaturan anggaran pemerintah, termasuk pendapatan dari pajak dan pengeluaran untuk program-program pemerintah (Sudirman & SE, 2017). Beberapa alat yang digunakan dalam kebijakan fiskal meliputi:

a. Pengeluaran Publik

Pemerintah dapat meningkatkan atau mengurangi pengeluaran untuk program-program seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Meningkatkan pengeluaran publik dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan permintaan lebih banyak terhadap barang dan jasa.

b. Kebijakan Pajak

Pemerintah dapat mengubah tarif pajak untuk individu dan perusahaan. Pemotongan pajak dapat mendorong belanja konsumen dan investasi bisnis, sementara peningkatan pajak dapat membantu mengurangi defisit anggaran.

c. Defisit Anggaran dan Surplus

Pemerintah dapat memilih untuk menjalankan defisit anggaran (pengeluaran melebihi pendapatan) atau surplus anggaran (pendapatan melebihi pengeluaran). Defisit dapat digunakan dalam

situasi ekonomi sulit untuk memicu pertumbuhan, sementara surplus dapat membantu mengurangi utang publik (Sudirman & SE, 2017).

Kemudian Kebijakan Moneter berfokus pada pengaturan pasokan uang dan suku bunga dalam perekonomian untuk mencapai tujuan ekonomi. Bank sentral suatu negara memiliki peran sentral dalam kebijakan moneter. Beberapa alat yang digunakan dalam kebijakan moneter meliputi:

a. Suku Bunga

Bank sentral dapat menentukan suku bunga yang dikenakan pada pinjaman antarbank dan dana yang ditempatkan di bank sentral. Menaikkan suku bunga dapat mengurangi pinjaman dan mengendalikan inflasi, sementara menurunkan suku bunga dapat merangsang pertumbuhan.

b. Operasi Pasar Terbuka

Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengatur pasokan uang di pasar. Dengan membeli surat berharga, bank sentral dapat menyuntikkan uang ke dalam ekonomi.

c. Cadangan Wajib

Bank sentral dapat menetapkan cadangan minimum yang harus dijaga oleh bank-bank komersial. Menyesuaikan persyaratan cadangan dapat mempengaruhi likuiditas bank dan kredit yang tersedia dalam ekonomi (Sudirman & SE, 2017).

Kebijakan fiskal dan moneter bekerja bersama-sama dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal lebih fokus pada pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah, sementara kebijakan moneter lebih fokus pada pengaturan pasokan uang dan suku bunga. Keduanya saling memengaruhi dan sering kali digunakan secara bersama-sama untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang diinginkan.

1.1.7. Siklus Bisnis

Siklus bisnis mengacu pada fluktuasi berulang dalam aktivitas

ekonomi suatu negara, yang mencakup periode pertumbuhan ekonomi (ekspansi) dan periode penurunan ekonomi (kontraksi). Siklus bisnis adalah fenomena alami dalam ekonomi dan terjadi secara periodik, meskipun durasi dan intensitasnya dapat bervariasi. Siklus bisnis umumnya terdiri dari empat tahap utama: ekspansi, puncak, kontraksi, dan palung (Mudjahidin, 2004).

Tahap Ekspansi merupakan periode ketika ekonomi sedang tumbuh dan berkembang. Pada saat ini, output ekonomi meningkat, lapangan kerja bertambah, pengeluaran konsumen dan investasi meningkat, dan umumnya ada optimisme dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi bisa sangat pesat selama tahap ini.

Tahap Puncak merupakan titik tertinggi dalam siklus bisnis, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai puncaknya. Pada saat ini, sebagian besar indikator ekonomi seperti output, konsumsi, investasi, dan lapangan kerja berada pada level yang tinggi. Namun, karena pertumbuhan ekonomi telah mencapai batasnya, tanda-tanda ketidakseimbangan mulai muncul, seperti inflasi yang meningkat.

Tahap Kontraksi adalah kondisi saat ekonomi mulai melambat. Aktivitas ekonomi menurun, pertumbuhan output melambat, dan lapangan kerja mulai berkurang. Kontraksi ekonomi sering disebut sebagai resesi atau depresi jika kondisinya parah. Di tahap ini, perusahaan mungkin mengurangi produksi, memangkas tenaga kerja, dan konsumen cenderung mengurangi pengeluaran.

Terakhir, Tahap Palung adalah titik terendah dalam siklus bisnis, di mana aktivitas ekonomi mencapai titik terendah sebelum mulai pulih. Di tahap ini, pengangguran bisa tinggi dan perusahaan mungkin mengalami kesulitan keuangan. Namun, setelah mencapai titik terendah, kondisi ekonomi mulai membaik dan bergerak menuju tahap ekspansi lagi.

Siklus bisnis dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks, termasuk perubahan dalam permintaan konsumen, fluktuasi investasi bisnis, kebijakan moneter dan fiskal, perkembangan teknologi, perubahan

harga komoditas, kondisi global, dan banyak faktor lainnya. Meskipun pola umum siklus bisnis terlihat serupa di berbagai negara, durasi dan intensitas setiap tahap dapat berbeda tergantung pada berbagai kondisi ekonomi dan faktor lainnya (Kartiasih, 2019).

Memahami siklus bisnis penting untuk perencanaan ekonomi, kebijakan publik, dan manajemen bisnis. Pemerintah dan organisasi berusaha untuk meredam dampak negatif dari tahap kontraksi dan palung serta merangsang pertumbuhan ekonomi selama tahap ekspansi.

1.1.8. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

Distribusi Pendapatan mengacu pada cara pendapatan ekonomi, seperti gaji, upah, dividen, dan penghasilan lainnya, didistribusikan di antara berbagai individu atau kelompok dalam masyarakat. Distribusi pendapatan menggambarkan sejauh mana pendapatan ekonomi terbagi secara merata atau tidak merata di antara anggota masyarakat.

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan menggunakan indikator statistik seperti indeks Gini atau kurva Lorenz. Indeks Gini mengukur ketidaksetaraan pendapatan, dengan nilai 0 menunjukkan distribusi yang sempurna merata dan nilai 1 menunjukkan distribusi yang sangat tidak merata. Kurva Lorenz adalah representasi grafis dari distribusi pendapatan, di mana garis diagonal menggambarkan distribusi yang sempurna merata, sedangkan kurva sebenarnya menggambarkan distribusi aktual (Kalsum, 2018).

Kemudian Distribusi Kekayaan merujuk pada cara kekayaan atau aset ekonomi, seperti tanah, properti, uang, dan investasi, didistribusikan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Distribusi kekayaan juga dapat mengalami tingkat ketidaksetaraan yang serupa dengan distribusi pendapatan. Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan ekonomi:

- a. Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, menghasilkan pembagian yang

- tajam antara kelompok-kelompok masyarakat yang kaya dan miskin.
- b. Individu atau kelompok yang memiliki pendapatan dan kekayaan lebih besar memiliki lebih banyak akses ke peluang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Sementara itu, kelompok dengan pendapatan lebih rendah mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya ini.
 - c. Tingkat ketidaksetaraan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketika sebagian besar pendapatan dan kekayaan terkonsentrasi pada kelompok yang kaya, permintaan konsumen dapat menurun, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
 - d. Tingkat ketidaksetaraan yang ekstrem dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial, ketidakstabilan politik, dan konflik sosial. Persepsi akan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dapat mengganggu stabilitas masyarakat.
 - e. Tingkat ketidaksetaraan dapat mempengaruhi mobilitas sosial, yaitu sejauh mana individu dapat berpindah dari satu lapisan sosial atau ekonomi ke lapisan lainnya. Ketidaksetaraan yang tinggi mungkin mengurangi peluang mobilitas sosial (Kalsum, 2018).

Pemerintah sering kali berusaha untuk meredam tingkat ketidaksetaraan melalui kebijakan redistribusi, seperti program bantuan sosial, pajak progresif, dan program pendidikan yang inklusif. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan dan mengurangi dampak negatif dari ketidaksetaraan dalam masyarakat.

1.4. Kesimpulan

Dalam bab ini telah membahas secara ringkas dan mengungkap pandangan mengenai bagaimana ekonomi sebuah negara atau wilayah beroperasi dalam skala besar. Dalam bab ini, kita memahami bahwa ekonomi makro membahas fenomena dan pola-pola ekonomi yang melibatkan agregat ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi,

pengangguran, stabilitas mata uang, dan distribusi pendapatan.

Konsep-konsep inti yang membentuk ruang lingkup ekonom makro telah dieksplorasi, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas mata uang, dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Dari pengertian dasar ekonomi makro hingga aspek-aspek yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan masyarakat, bab ini memberikan pandangan menyeluruh yang penting untuk memahami dinamika ekonomi suatu negara.

Dalam pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kita menyadari pentingnya peluang kerja, pendapatan yang lebih tinggi, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Namun, kita juga memahami bahwa pertumbuhan yang berlebihan dapat memicu inflasi yang merugikan.

Dalam menjelajahi stabilitas mata uang, kita mengakui kompleksitas interaksi faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kebijakan moneter, kondisi ekonomi global, dan perubahan dalam neraca perdagangan. Peran sentral yang dimainkan oleh bank sentral dalam menjaga nilai tukar mata uang dan stabilitas ekonomi menjadi semakin jelas.

Melalui pemahaman tentang distribusi pendapatan dan kekayaan, kita mendapatkan wawasan tentang bagaimana ketidakesetaraan dalam masyarakat dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan redistribusi dan pendekatan inklusif menjadi penting dalam upaya mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, penjelasan pada bab ini telah membekali kita dengan dasar pemahaman tentang berbagai aspek utama ekonomi makro. Dengan landasan ini, kita siap untuk menjelajahi lebih dalam konsep-konsep lanjutan dalam ekonomi makro serta bagaimana mereka berinteraksi dalam perekonomian global yang kompleks pada bab-bab selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti, T. D., Sumanjaya, R., & Hasution, S. H. (2010). *Pengantar Ekonomi Makro*. USUpress.
- Curatman, A. (2010). *Teori Ekonomi Makro*. Deepublish.
- Eli Retnowati, S. E., Sesario, R., Kiha, E. K., Nalle, M. N., SP, M. S., Oktaviany, S. E., Kurdhi, N. A., Darnilawati, S. E., Atmi Sapta Rini, M. M., & Saksono, H. (2022). *Pengantar Ekonomi Makro*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Erika, Y. I. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Neraca Perdagangan Indonesia. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(4), 214–224.
- Franita, R., Harahap, A. F. D., & Sukriah, Y. (2019). Analisa pengangguran di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 88–91.
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. Prenada Media.
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 41–59.
- Kartiasih, F. (2019). Inflasi dan Siklus Bisnis Politik di Indonesia. *Media Trend*, 14(2), 219–228.
- Mudjahidin, M. (2004). Siklus Bisnis Pada Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, 3(2), 93–100.
- Muslim, M. R. (2014). Pengangguran terbuka dan determinannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(2), 171–181.
- Putong, I. (2015). *Ekonomi makro: Pengantar ilmu ekonomi makro* (Vol. 1). Buku&Artikel Karya Iskandar Putong.
- Santosa, A. B. (2017). *Analisis Inflasi di Indonesia*.
- Soleh, A. (2014). Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Sudirman, I. W., & SE, S. U. (2017). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Prenada Media.
- Sugiyono, F. X. (2017). *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan* (Vol. 4). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Waluyo, D. E. (2019). *Ekonomika Makro* (Vol. 7). UMMPress.

PROFIL PENULIS



Zul Fadli, S.E., M.A.P.

**Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Pattimura Ambon**

Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Juni 1988. Merupakan putra kedua dari pasangan Prof. Dr. H. Imran Ismail, M.S dan dr. Hj. Nurhaedah Azis, M.Kes. Menikah pada tahun 2018 dan dikarunia 2 orang anak. Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Pattimura. Menyelesaikan S1 (Sarjana) pada Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Keuangan Kampus STIE Indonesia Makassar pada tahun 2011, dan S2 (Magister) pada Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur Kampus STIA-LAN Makassar pada tahun 2018. Telah menulis beberapa buku, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan menerbitkan hasilnya pada beberapa jurnal nasional dan internasional.

PEROLEHAN DAN PENGELUARAN NASIONAL

Oleh

**Ade Onny Siagian, M.M., M.H., M.A.P.,
M.I.Kom.**

2.1. Pengertian Perolehan dan Pengeluaran Nasional

Perolehan Nasional dan Pengeluaran Nasional adalah dua konsep ekonomi yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu negara. Kedua konsep ini saling terkait dan mencerminkan bagaimana uang mengalir dalam ekonomi (Mufidah et al., 2021). Berikut pengertian keduanya:

1) Perolehan Nasional (National Income) yaitu

Perolehan Nasional mengacu pada total pendapatan yang diperoleh oleh semua faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Faktor produksi ini mencakup upah buruh, keuntungan perusahaan, bunga dari investasi, dan pendapatan sewa tanah. Perolehan Nasional juga dapat dihitung dengan berbagai metode, seperti metode pengeluaran (yang akan dibahas berikutnya) atau metode pendapatan dan metode produksi (Kang et al., 2021).

2) Pengeluaran Nasional (National Expenditure) yaitu

Pengeluaran Nasional mengacu pada total pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu negara selama periode tertentu. Pengeluaran ini dapat dibagi menjadi beberapa komponen, yang mencakup konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan saldo ekspor-impor. Dalam ekonomi yang seimbang, pengeluaran nasional harus sama dengan perolehan nasional, yang dikenal sebagai identitas pengeluaran-perolehan (expenditure-income identity) (Xie et al., 2023).

Konsep perolehan dan pengeluaran nasional sangat penting dalam analisis ekonomi makro karena mereka membantu dalam memahami kesehatan dan performa ekonomi suatu negara. Selain itu, mereka juga digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan, dan merancang kebijakan ekonomi.

Pengukuran perolehan nasional dan pengeluaran nasional sering melibatkan berbagai metode penghitungan dan data statistik ekonomi, seperti pendapatan nasional bruto (Gross National Income/GNI), produk domestik bruto (Gross Domestic Product/GDP), dan indikator lainnya. Analisis ini membantu pemerintah, pelaku bisnis, dan ekonom untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola ekonomi negara (Nguyen, 2018).

2.2. Gambaran Perolehan dan Pengeluaran Nasional dalam Teori Makro Ekonomi

Dalam teori makroekonomi, perolehan nasional dan pengeluaran nasional adalah dua konsep penting yang digunakan untuk memahami dan menganalisis aktivitas ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Konsep ini membantu kita mengukur dan mengkaji kesehatan ekonomi negara serta memahami bagaimana uang mengalir dalam perekonomian. Berikut adalah gambaran perolehan dan pengeluaran nasional dalam teori makroekonomi (Brückner et al., 2021)

1. Perolehan Nasional (National Income) yaitu

- a. **Pendapatan Faktor Produksi:** Perolehan nasional mencakup total pendapatan yang diterima oleh semua faktor produksi dalam perekonomian, yaitu buruh, modal (termasuk keuntungan perusahaan dan bunga), serta tanah (termasuk pendapatan sewa tanah).
- b. **Sumber Pendapatan:** Perolehan nasional berasal dari berbagai sumber, seperti gaji dan upah pekerja, keuntungan perusahaan, bunga dari investasi, dan pendapatan dari penyewaan tanah

atau aset lainnya.

- c. Metode Pengukuran: Perolehan nasional dapat diukur menggunakan berbagai metode, termasuk metode pendapatan, metode pengeluaran, dan metode produksi. Dalam semua metode ini, perolehan nasional harus mencerminkan total pendapatan dalam perekonomian (Ergül & Göksel, 2020).

2. Pengeluaran Nasional (National Expenditure) yaitu

- a. Komponen Pengeluaran: Pengeluaran nasional mencakup total pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi dalam perekonomian (CBSL, 2021). Komponen pengeluaran nasional utama mencakup:

- 1) Konsumsi Rumah Tangga: Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk barang dan jasa.
- 2) Investasi Perusahaan: Pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli modal (mesin, peralatan, dll.) dan meningkatkan produksi.
- 3) Pengeluaran Pemerintah: Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai program, layanan, dan investasi publik.
- 4) Ekspor dan Impor: Saldo ekspor dan impor barang dan jasa juga termasuk dalam pengeluaran nasional.

Dalam analisis ekonomi makro, terdapat identitas pengeluaran-perolehan, yang menyatakan bahwa perolehan nasional harus sama dengan pengeluaran nasional dalam suatu negara yang seimbang. Ini berarti ***Perolehan Nasional = Pengeluaran Nasional***.

Dengan identitas ini, ekonom dapat menganalisis ketidakseimbangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan dampak kebijakan ekonomi pada tingkat perolehan dan pengeluaran nasional. Pemerintah dan pembuat kebijakan ekonomi sering menggunakan data perolehan dan pengeluaran nasional untuk merancang kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai untuk mencapai tujuan ekonomi nasional,

seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil dan rendahnya tingkat pengangguran.as.

2.3. Teori Teori Pengantar Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang berfokus pada studi tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kesehatan ekonomi suatu negara. Ada beberapa teori pengantar dalam ekonomi makro yang membantu kita memahami dan menganalisis fenomena makroekonomi. Berikut beberapa teori pengantar ekonomi makro yang penting(Sukino, 2011)(Rosyidi, 2019)

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth Theory)

Teori pertumbuhan ekonomi membahas faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan jangka panjang suatu negara. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana faktor-faktor seperti investasi, produktivitas, perkembangan teknologi, dan akumulasi modal memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara(Prathama Rahardja, 2018).

2. Teori Siklus Bisnis (Business Cycle Theory)

Teori siklus bisnis mengkaji fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam jangka pendek dan menengah, seperti resesi, ekspansi, depresi, dan pemulihan. Teori ini mencoba menjelaskan penyebab dan dampak dari siklus bisnis ini.

3. Teori Pengangguran (Unemployment Theory)

Teori pengangguran berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Ini mencakup analisis tentang jenis-jenis pengangguran, seperti pengangguran struktural dan pengangguran siklus, serta cara mengatasi masalah pengangguran.

4. Teori Inflasi (Inflation Theory)

Teori inflasi mengkaji penyebab dan konsekuensi inflasi, yaitu

peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa dalam perekonomian. Ini mencakup analisis tentang faktor-faktor seperti permintaan agregat, biaya produksi, dan kebijakan moneter yang dapat memengaruhi tingkat inflasi.

5. Teori Kebijakan Moneter dan Fiskal (Monetary and Fiscal Policy Theory)

Teori kebijakan moneter dan fiskal mempelajari bagaimana pemerintah dan bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter (seperti tingkat suku bunga dan peredarannya uang) dan kebijakan fiskal (seperti perubahan dalam tingkat pajak dan belanja pemerintah) untuk mengendalikan aktivitas ekonomi dan mencapai tujuan ekonomi tertentu.

6. Teori Perdagangan Internasional (International Trade Theory)

Teori perdagangan internasional mencakup analisis tentang bagaimana perdagangan internasional memengaruhi perekonomian suatu negara, termasuk manfaat dan kerugian dari perdagangan luar negeri, serta dampak kebijakan perdagangan internasional.

7. Teori Konsumsi dan Tabungan (Consumption and Savings Theory)

Teori ini mempelajari perilaku konsumen dalam hal bagaimana mereka membelanjakan pendapatan mereka dan berapa banyak yang mereka tabung. Ini membantu menjelaskan bagaimana tingkat konsumsi masyarakat dapat memengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

8. Teori Investasi (Investment Theory)

Teori investasi mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi tingkat investasi perusahaan dalam perekonomian. Ini termasuk pertimbangan seperti tingkat suku bunga, ekspektasi bisnis, dan permintaan untuk barang modal. Teori-teori ini membantu para ekonom dan pembuat kebijakan dalam memahami dan mengelola perekonomian secara efektif. Mereka digunakan untuk menganalisis masalah ekonomi makro, merumuskan kebijakan ekonomi, dan memprediksi dampak kebijakan tertentu terhadap perekonomian nasional (Fhathoni, 2017).

2.4. Siklus Perolehan dan Pengeluaran Nasional

Siklus perolehan dan pengeluaran nasional mengacu pada fluktuasi periodik dalam tingkat perolehan (pendapatan) dan pengeluaran nasional suatu negara selama periode waktu tertentu. Siklus ini mencerminkan variasi dalam aktivitas ekonomi dan dapat dibagi menjadi beberapa fase. Dua fase utama dalam siklus perolehan dan pengeluaran nasional adalah fase ekspansi (prosperitas) dan fase kontraksi (resesi). Berikut adalah penjelasan singkat tentang siklus perolehan dan pengeluaran nasional:

1) Fase Ekspansi (Prosperitas) yaitu

Fase ekspansi terjadi ketika tingkat perolehan dan pengeluaran nasional suatu negara mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada saat ini, berbagai indikator ekonomi, seperti GDP, investasi, dan tingkat pekerjaan, meningkat. Faktor-faktor yang bisa memicu fase ekspansi termasuk peningkatan investasi perusahaan, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta kebijakan fiskal dan moneter yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Pada fase ini, biasanya terjadi peningkatan investasi bisnis, peningkatan produksi, dan peningkatan pengeluaran konsumen, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang kuat.

2) Fase Kontraksi (Resesi):

Fase kontraksi, atau sering disebut resesi, adalah periode di mana aktivitas ekonomi mengalami penurunan. Ini dicirikan oleh penurunan tingkat perolehan dan pengeluaran nasional. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan fase kontraksi termasuk penurunan investasi, penurunan konsumsi, dan kebijakan fiskal yang ketat atau kebijakan moneter yang ketat. Selama fase ini, perusahaan mungkin mereduksi produksi, tingkat pengangguran bisa meningkat, dan konsumen mungkin mengurangi pengeluaran mereka, yang semuanya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi atau bahkan menyebabkan kontraksi ekonomi.

3) Fase Puncak dan Trough:

Fase puncak adalah titik tertinggi dalam siklus ekonomi di mana aktivitas ekonomi mencapai puncaknya. Fase terendah atau terbawah adalah titik terendah di mana aktivitas ekonomi mencapai titik terendahnya. Siklus ini terus berulang dan seringkali sulit diprediksi dalam jangka pendek karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam sentimen konsumen, perubahan dalam kebijakan pemerintah, dan peristiwa eksternal seperti krisis finansial global. Pemerintah dan bank sentral berusaha untuk mengelola siklus perolehan dan pengeluaran nasional dengan menggunakan kebijakan ekonomi, seperti kebijakan moneter (misalnya, mengubah tingkat suku bunga) dan kebijakan fiskal (misalnya, mengubah tingkat pajak atau pengeluaran pemerintah) untuk merespons fase-fase dalam siklus ini dan mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti menjaga pertumbuhan yang stabil dan tingkat pengangguran yang rendah.

2.5. Sejarah konsep perolehan dan pengeluaran nasional terkait erat dengan perkembangan ilmu ekonomi makro

Sejarah konsep perolehan dan pengeluaran nasional terkait erat dengan perkembangan ilmu ekonomi makro. Konsep ini telah mengalami evolusi selama beberapa abad dan melibatkan banyak pemikir ekonomi terkemuka. Berikut adalah ringkasan sejarah konsep perolehan dan pengeluaran nasional dalam konteks ekonomi makro sekira Abad ke-17 dan 18

Pemikiran awal tentang perolehan dan pengeluaran nasional berfokus pada teori-teori yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Pemikir seperti David Hume dan Richard Cantillon membahas dampak aliran emas dan perdagangan luar negeri terhadap ekonomi nasional.

Abad ke-18 dan 19 Ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep ekonomi nasional. Smith, dalam karyanya "Wealth of Nations" (1776),

menguraikan ide-ide tentang perdagangan dan perolehan nasional. Ricardo mengembangkan teori tentang perolehan nasional dan komparatif keunggulan. serta Abad ke-19 dan Awal abad ke-20, John Stuart Mill menyumbangkan pemikirannya tentang peran konsumsi dalam perolehan nasional. Namun, pemikiran tentang perolehan dan pengeluaran nasional pada masa ini masih berfokus pada teori-teori mikroekonomi daripada ekonomi makro.

Pada Awal Abad ke-20, John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris, memainkan peran kunci dalam mengembangkan konsep perolehan dan pengeluaran nasional dalam konteks ekonomi makro. Dalam bukunya "The General Theory of Employment, Interest and Money" (1936), Keynes mengembangkan model makroekonomi pertama yang menyertakan komponen pengeluaran agregat, seperti konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Keynesianisme, atau teori Keynes, menggarisbawahi pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatasi resesi dan pengangguran melalui kebijakan fiskal dan moneter. Konsep perolehan dan pengeluaran nasional menjadi pusat perhatian dalam analisis ekonomi makro.

Pasca-Perang Dunia II, Setelah Perang Dunia II, ada peningkatan dalam pengumpulan data ekonomi dan perkembangan teknik perhitungan yang memungkinkan perhitungan yang lebih akurat tentang perolehan dan pengeluaran nasional. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, ekonomi makro mengalami perkembangan lebih lanjut dengan munculnya ekonomi Keynesian baru, teori pertumbuhan ekonomi, dan penekanan pada pengeluaran konsumen dalam perolehan nasional. serta di Pasca-1970-an, Pada tahun 1970-an, ekonomi makro menghadapi tantangan baru dengan munculnya pemikiran ekonomi moneterisme, yang menekankan peran penting kebijakan moneter dan inflasi.

Selama dekade berikutnya, model-model ekonomi makro yang semakin rumit dikembangkan untuk memahami hubungan antara

perolehan dan pengeluaran nasional dalam berbagai konteks ekonomi global yang berubah. Sejak itu, konsep perolehan dan pengeluaran nasional tetap menjadi inti dalam analisis ekonomi makro, dan para ekonom terus mengembangkan dan menyempurnakan model-model mereka untuk memahami dan mengatasi masalah ekonomi global yang kompleks. Kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter, masih digunakan untuk memengaruhi perolehan dan pengeluaran nasional dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

2.6. Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi perolehan dan pengeluaran nasional dalam ekonomi



Perolehan dan pengeluaran nasional adalah dua konsep terkait dalam ekonomi makro yang mencerminkan bagaimana pendapatan dihasilkan dan dihabiskan dalam suatu negara (Karya & Syamri, 2016). Ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya perolehan dan pengeluaran nasional. Berikut adalah beberapa penyebab utama adalah

1) Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption)

Konsumsi oleh rumah tangga adalah salah satu komponen utama pengeluaran nasional. Tingkat konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan rumah tangga, harga barang dan jasa,

ekspektasi tentang masa depan, dan tingkat suku bunga. Jika pendapatan rumah tangga naik, biasanya konsumsi akan meningkat.

2) Investasi Perusahaan (Business Investment)

Investasi perusahaan mencakup pembelian modal seperti mesin, peralatan, dan fasilitas produksi. Tingkat investasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suku bunga, ekspektasi bisnis tentang masa depan, dan kondisi pasar. Ketika perusahaan merasa optimis tentang pertumbuhan ekonomi, mereka cenderung melakukan investasi yang lebih besar.

3) Pengeluaran Pemerintah (Government Spending)

Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai program, layanan, dan infrastruktur. Kebijakan fiskal pemerintah, termasuk tingkat belanja publik dan pajak, memengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah.

4) Ekspor dan Impor (Exports and Imports)

Perdagangan internasional memengaruhi pengeluaran nasional. Ekspor adalah komponen positif karena mereka menambah pengeluaran nasional, sedangkan impor mengurangi pengeluaran nasional. Saldo ekspor-impor menciptakan perbedaan dalam pengeluaran nasional.

5) Kebijakan Moneter (Monetary Policy)

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral, seperti mengubah tingkat suku bunga atau cadangan uang beredar, dapat memengaruhi perolehan dan pengeluaran nasional. Tingkat suku bunga yang rendah, misalnya, dapat merangsang aktivitas pinjaman dan investasi.

6) Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, seperti mengubah tingkat pajak atau tingkat pengeluaran pemerintah, juga dapat memengaruhi perolehan dan pengeluaran nasional. Peningkatan belanja pemerintah, misalnya, dapat meningkatkan pengeluaran nasional.

7) Faktor-faktor Eksternal (External Factors)

Peristiwa eksternal seperti krisis ekonomi global, perang, atau bencana alam dapat memengaruhi perolehan dan pengeluaran nasional secara signifikan. Mereka dapat mengganggu perdagangan, investasi, dan produksi dalam suatu negara.

8) Sentimen Konsumen dan Bisnis (Consumer and Business Sentiment)

Keyakinan dan ekspektasi konsumen dan bisnis terhadap masa depan ekonomi juga berperan dalam pengambilan keputusan pengeluaran. Sentimen positif dapat mendorong konsumsi dan investasi yang lebih besar. Penyebab-penyebab di atas adalah beberapa faktor utama yang dapat memengaruhi perolehan dan pengeluaran nasional dalam ekonomi. Hubungan kompleks antara faktor-faktor ini menjadi objek studi dalam ekonomi makro untuk memahami fluktuasi dan dinamika ekonomi suatu negara.

2.7. Metode Pengukuran Perolehan dan Pengeluaran nasional dalam ekonomi



Perolehan dan pengeluaran nasional dapat dihitung menggunakan berbagai metode pengukuran yang mencerminkan berbagai sudut pandang dalam ekonomi. Dua metode yang umum digunakan adalah metode pendapatan dan metode pengeluaran. Di bawah ini, saya akan

menjelaskan kedua metode tersebut.

1. Metode Pendapatan (Income Method) yaitu Metode ini mengukur perolehan nasional dengan menghitung total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi dalam perekonomian, seperti upah, keuntungan perusahaan, bunga, dan pendapatan sewa. Berikut langkah-langkahnya adalah
 - a) Pendapatan Karyawan (Wages and Salaries): Jumlahkan semua gaji dan upah yang dibayarkan kepada pekerja dalam perekonomian.
 - b) Keuntungan Perusahaan (Profits): Hitung total keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dalam perekonomian.
 - c) Pendapatan Bunga (Interest Income): Jumlahkan semua pendapatan bunga yang diterima oleh individu, perusahaan, dan lembaga keuangan.
 - d) Pendapatan Sewa (Rent Income): Hitung total pendapatan sewa yang diterima oleh pemilik properti.
 - e) Pendapatan Lainnya (Other Incomes): Sertakan pendapatan lainnya, seperti dividen dari investasi saham.
 - f) Total Pendapatan Faktor Produksi: Jumlahkan semua komponen pendapatan di atas untuk mendapatkan total perolehan nasional.
2. Metode Pengeluaran (Expenditure Method) yaitu Metode ini mengukur pengeluaran nasional dengan menghitung total pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi dalam perekonomian. Berikut langkah-langkahnya:
 - a) Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption): Jumlahkan semua pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dan jasa.
 - b) Investasi Perusahaan (Business Investment): Hitung pengeluaran perusahaan untuk membeli modal seperti mesin, peralatan, dan fasilitas produksi.
 - c) Pengeluaran Pemerintah (Government Spending): Jumlahkan pengeluaran pemerintah untuk berbagai program, layanan, dan proyek infrastruktur.
 - d) Ekspor (Exports): Hitung nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain.

e) Impor (Imports): Hitung nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.

Total Pengeluaran Nasional: Hitung total pengeluaran dengan mengurangi impor dari total konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah, kemudian menambahkan ekspor. Identitas pengeluaran-perolehan (expenditure-income identity) dalam ekonomi adalah: Perolehan Nasional = Pengeluaran Nasional, Ketika menggunakan salah satu dari metode di atas, perolehan nasional dan pengeluaran nasional harus mencerminkan nilai yang sama, karena keduanya mengukur aspek yang berbeda dari aktivitas ekonomi yang sama. Data statistik ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP) atau Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income/GNI) sering digunakan untuk menghitung perolehan dan pengeluaran nasional dalam prakteknya.

2.8. Penutup

Dalam teori ekonomi makro, konsep perolehan dan pengeluaran nasional memainkan peran sentral dalam memahami dan menganalisis kesehatan ekonomi suatu negara. Dalam mengkaji hubungan antara perolehan dan pengeluaran nasional, kita dapat mencapai beberapa kesimpulan penting salah satu adalah Keseimbangan Identitas Perolehan-Pengeluaran, Dalam ekonomi yang seimbang, perolehan nasional harus sama dengan pengeluaran nasional. Ini dikenal sebagai identitas perolehan-pengeluaran. Konsep ini menjadi dasar untuk menganalisis ketidakseimbangan ekonomi dan menilai dampak kebijakan ekonomi (Onny Siagian, 2021).

Pengukuran Kesehatan Ekonomi, Perolehan dan pengeluaran nasional adalah indikator penting untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan perolehan nasional menunjukkan kemakmuran ekonomi, sementara penurunan pengeluaran nasional bisa mengindikasikan resesi atau penurunan aktivitas ekonomi. Kebijakan Ekonomi, Konsep ini memainkan peran kunci dalam merancang kebijakan ekonomi makro. Kebijakan fiskal (melalui pengeluaran pemerintah dan pajak) dan kebijakan moneter (melalui tingkat suku bunga dan pengendalian uang) digunakan untuk mengendalikan

perolehan dan pengeluaran nasional agar mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan yang stabil dan inflasi yang terkendali. Siklus Ekonomi yaitu Konsep perolehan dan pengeluaran nasional membantu kita memahami siklus ekonomi, seperti ekspansi dan kontraksi. Fase-fase ini mencerminkan fluktuasi dalam perolehan dan pengeluaran nasional, dan pemahaman tentang siklus ini penting untuk merencanakan dan merespons perubahan ekonomi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi yaitu Dalam konteks teori pertumbuhan ekonomi, perolehan dan pengeluaran nasional menjadi fokus untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan jangka panjang suatu negara. Pertumbuhan perolehan nasional yang berkelanjutan dianggap sebagai indikator keberhasilan ekonomi (Siagian, 2021). Peran Konsumen dan Investasi adalah Konsep perolehan dan pengeluaran nasional juga membantu kita memahami peran konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi. Perubahan dalam tingkat konsumsi dan investasi dapat memiliki dampak signifikan pada perolehan dan pengeluaran nasional. Dengan demikian, perolehan dan pengeluaran nasional adalah landasan penting dalam analisis ekonomi makro dan pengambilan kebijakan ekonomi. Mereka membantu kita memahami bagaimana uang mengalir dalam perekonomian, mengevaluasi performa ekonomi, dan merancang tindakan yang sesuai untuk mencapai tujuan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Brückner, M., Chong, A., & Gradstein, M. (2021). National income and trust. *Review of Development Economics*. <https://doi.org/10.1111/rode.12724>
- CBSL. (2021). National Output, Expenditure and Income. Annual Report 2021.
- Ergül, Ö., & Göksel, T. (2020). The effects of technological development on the labor share of national income. *Economic Modelling*. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.07.015>
- Fhathoni, M. R. K. (2017). Pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan belanja modal terhadap

- pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i2.4099>
- Kang, S., Kang, M., & Lim, H. (2021). Global and regional patterns in noncommunicable diseases and dietary factors across national income levels. *Nutrients*. <https://doi.org/10.3390/nu13103595>
- Karya, D., & Syamri, S. (2016). Makroekonomi: Pengantar untuk Manajemen. In *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran*.
- Mufidah, L., Zamzami, L., & Hanif, Z. (2021). Pergeseran Pola Konsumsi Buah Nasional di Awal Masa Pandemi Covid-19 (The Shifting of National Fruit Consumption Pattern at the Beginning of the Covid-19 Pandemic Period). *Jurnal Hortikultura*. <https://doi.org/10.21082/jhort.v31n1.2021.p93-104>
- Nguyen, A. T. (2018). The Relationship Between External Debt, Economic Growth, Unemployment and National Expenditure in Viet Nam. *Journal of Economics and Management Sciences*. <https://doi.org/10.30560/jems.v1n2p129>
- Onny Siagian, A. (2021). Analisis Pengaruh Manajemen Laba dan Asimetri Informasi Terhadap Perusahaan Consumer Goods Cost of Equity. *Jurnal Syntax Transformation*. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.443>
- Prathama Rahardja, M. M. (2018). Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan makro Ekonomi) Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rosyidi, S. (2009). (2019). Pengantar Teori Ekonomi, Pendekata Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Rev. ed). Jakarta: Grafindo.
- Journal of Chemical Information and Modeling.
- Siagian, A. O. (2021). Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya. *Insan Cendekia Mandiri*.
- Sukino, S. (2011). Pengantar Teori Makro Ekonomi. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011).
- Xie, P., Zhu, Z., Hu, G., & Huang, J. (2023). Renewable energy and economic growth hypothesis: Evidence from N-11 countries. *Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja*. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2121741>

PROFIL PENULIS



Ade Onny Siagian, M.M., M.H., M.A.P., M.I.Kom.

**Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika**

Penulis lahir di Mojokerto (1978), Saat ini mengajar di Universitas Swasta, Fakultas Ekonomi, jenjang pendidikan S1 Fakultas Hukum (2003), S2 Magister Manajemen (2010), S2 Magister Ilmu Hukum (2018), Magister Ilmu Administrasi Publik (2019) dan S2 Magister Ilmu Komunikasi (2019) mendapat gelar wisudawan terbaik (Cum Laude), giat melakukan penelitian, dan aktif dalam bidang menulis buku, Google Scholar ID: qyMWX6cAAAAJ; Sinta ID: 6694707; Orcid. ID: <https://orcid.org/0000-0002-9701-9546>; dan Scopus ID: 57219985838.

PENENTUAN KEGIATAN EKONOMI

Oleh

Nurganda Siregar, S.E., M.Si

3.1. Pendahuluan

Dalam kegiatan ekonomi tidak dapat dihindari yang namanya sebuah kelangkaan, dimana manusia menginginkan banyak hal sedangkan alat pemuas sangat terbatas. Dengan adanya kelangkaan maka permintaan akan naik sedangkan barangnya sangat terbatas sehingga harga barang akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. didalam ilmu ekonomi adanya pilihan individu, perusahaan, pemerintah, dan seluruh masyarakat dalam pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan kelangkaan yang mana menyelaraskan pilihan yang dibuat.

Liberalisma mempunyai andil dalam sejarah perkembangan perekonomian Eropa. Sekitar 150 tahun perekonomian di Negara Eropa dengan sistem pandangan hidup liberalisme. Lebih dari 100 tahun revolusi indusri diawali di Inggris, GDP dari negari menghadapi perkembangan pesat serta harga cukup normal.

Dalam masalah kelangkaan para produsen akan melakukan produksi berlebih untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat. Apabila produsen melaksanakan kelebihan pengolahan itu merupakan permasalahan sementara sedangkan dimana pasar menghendaki melaksanakan penyesuaian sehingga hasil yang diproduksi bisa terjual. Dalam perkembangan penentuan kegiatan ekonomi adanya pandangan para ahli ekonomi. Dalam BAB ini akan dibahas mengenai penentu aktivitas ekonomi bagi pemikiran Klasik, Keynes serta Pendekatan masa kini.

3.2. Pembahasan

Dalam perkembangan penentu aktivitas ekonomi dipengaruhi

oleh pemikiran Klasik, Keynes dan pendekatan masa saat ini. Dibawah ini hendak dibahas yaitu:

1.2.2 Pandangan Ahli Klasik

Para pakar ekonomi klasik (Muchtolifah dalam bukunya Unesa Press) menyatakan jika penawaran menghasilkan suatu permintaan, dimana bagi Jean Baptiste say (1767-1832) "Penawaran menghasilkan sendiri permintaan terhadapnya" ataupun "*supply creates its own demand*". Ahli klasik memiliki pandangan bahwa perekonomian terwujud dimana jumlah keseluruhan penawaran barang akan diimbangi oleh penggunaan akan tenaga kerja terhadap permintaan barang yang sama besarnya.

Ada beberapa pemikir dalam ekonomi klasik (Fery, 2021), yaitu:

1. Adam Smith, menyatakan asas pada pengaturan akan kehidupan dalam kondisi ekonomi berdasarkan mekanisme kondisi pasar;
2. Jean Batiste Say, menyatakan ekonomi bebas (Liberal) tidak akan memproduksi secara berlebihan bersifat universal dan orang yang tidak mendapatkan pekerjaan tidak akan terjadi. Yang akan memungkinkan terjadi adalah kelebihan akan produksi dan orang yang tidak berkerja bersifat terbatas.
3. Thomas Robert Malthus, menyatakan teori sewa tanah serta teori penduduk. Dimana angka anak lahir yang tidak dikontrol akan membuat bertambahnya jumlah penduduk diikuti oleh bertambahnya persediaan akan bahan makanan.
4. Ricardo, mengemukakan teori tentang empat kelompok kasus yaitu:
 - a. Teori distribusi pemasukan yang mana selaku pembagian hasil penciptaan serta terbagi atas teori upah, teori sewa tanah, teori bunga serta laba;
 - b. Teori nilai serta harga;
 - c. Teori perdagangan internasional;
 - d. Teori penumpukan dan pertumbuhan ekonomi.

Kaum klasik merupakan orang-orang yang percaya kemampuan akan system ekonomi yang liberal. Secara ideologi mereka percaya akan system "*laissez faire*" atau sistem bebas manusia untuk melaksanakan aktivitas ekonomi untuk kemakmuran anggota umum. Dimana ikut andilnya pemerintah di aktivitas ekonomi sangat minimalis yang akan

mencapai beberapa hal (Ekawarna, 2008) yaitu:

1. Aktivitas dari pada ekonomi secara keseluruhan (nasional) dapat berjalan secara maksimal yang disebut "**full employment level of activity**";
2. Pembagian sumber daya alam dan faktor penghasil unit berjalan secara efisien.

Dalam pandangan klasik, peranan pemerintah dibatasi secara minimal, dimana apa yang dilakukan pemerintah masih bisa dilakukan pihak swasta dengan efisien. Dimana kegiatan pemerintah merupakan kegiatan yang tidak dapat dikerjakan oleh pihak swasta. Misalnya yaitu bidang pertahanan dan keamanan negara, Pendidikan dan hukum.

Dalam kaum klasik memiliki anggapan dimana pasar pencari kerja tidak ada perbedaan dengan pasar barang. Apabila harga tenaga kerja (upah) mengalami kondisi yang fleksibel maka permintaan akan tenaga kerja menjadi seimbang dengan adanya akan penawaran tenaga kerja. Dengan kondisi ini akan kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela. Artinya, tingkat upah (riil) berlaku dipasar tenaga kerja yang tersedia untuk bekerja pada tingkat dan tidak tersedia pekerja pada tingkat upah yang berlaku (pengangguran).

Didalam pasar uang, kondisi permintaan uang akan bertemu dengan penawaran uang. Menurut klasik, uang tidak akan maksimal menghasilkan kecuali akan melakukan dengan cara mempermudah transaksi, maka kondisi uang yang akan diminta masyarakat tidak lebih dari seberapa besar yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan aktivitas proses transaksi. Semakin bertambahnya transaksi yang dilakukan dimasyarakat akan semakin banyaknya uang tunai dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

Dalam teori klasik terkandung keyakinan akan pasar yang membentuk perekonomian berkeseimbangan. Sistem ekonomi, menurut dari pada kaum Klasik adalah bagian dari "orde alamiah yang tunduk pada "hukum-hukum alam".

1.2.2 Pandangan Keynes

Uang merupakan persediaan aset yang akan dipergunakan dalam kegiatan transaksi menurut sudut pandang ekonom. Dimana uang dapat diterima masyarakat sebagai alat pembayaran. Dimana uang dimaksud

disini adalah (Ekawarna, 2008):

- a. Uang Fiat, yaitu komoditas yang diperoleh sebagai uang, dimana nilai nominalnya akan lebih besar daripada nilai komoditasnya.
- b. Uang komoditas, yaitu uang dimana nilai komoditas itu sendiri.
- c. Uang Likuid sempurna, yaitu tunggu dicairkan terlebih dahulu baru dianggap dianggap bernilai contohnya Cek/giro.

Sedangkan jika dilihat dari fungsinya uang memiliki empat fungsi (Ekawarna, 2008) :

1. Fungsi hitung, dimana uang memberikan harga pada komoditas berdasarkan satuan ukur umum.
2. Alat transaksi, dimana uang diterima sebagai jaminan kepercayaan dalam ekonomi modern ini. Jaminan modern ini diberikan jaminan oleh pemerintah.
3. Penyimpanan nilai, uang mempunyai kemampuan menyimpan untuk dipergunakan dimasa depan.
4. Standart pembayaran dimasa depan, uang merupakan balas jasa pembayaran di masa depan karena lebih mudah diukur dengan daya beli dibandingkan dengan nilai komoditas.

Teori klasik mengenai tenaga kerja akan selalu tercipta didalam perekonomian tidak disetujui oleh Keynes. Dimana keynes berpikir bahwa pemanfaatan dari tenaga kerja secara penuh, digunakan sering tidak terjadi disebabkan oleh berkurangnya permintaan agregat dalam aktivitas ekonomi. Yang membuat berbeda antara Keynes dan Klasik adalah :

1. Faktor penentu tingkat pada suatu tabungan, tingkat pada suatu nilai investasi dan tingkat pada suatu suku bunga dalam perekonomian.
2. Perilaku yang berkaitan dengan tingkat pada upah dengan penggunaan akan tenaga kerja yang dipergunakan oleh pengusaha atau pemilik modal.

Dalam pemikir Klasik berpendapat yang menentukan jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga. Sedangkan Keynes berpendapat, sifat tabungan adalah:

- a. Pada kondisi tingkat akan penghasilan/pendapatan secara nasional rendah, maka akan menyebabkan penggunaan akan tabungan pada

masyarakat menjadi negatif. Dimana dalam kondisi ini suatu masyarakat akan mempergunakan tabungan yang dimiliki untuk dipergunakan dalam membiayai hidupnya.

- b. Jika kondisi semakin tingginya akan penghasilan suatu nasional, maka akan menyebabkan semakin banyak masyarakat melakukan penyimpanan uang atau melakukan penabungannya akan uangnya.

Teori pasar uang yang dikemukakan Keynes, dimana kondisi di pasar uang yang ada, penawaran pada uang akan bertemu dengan suatu permintaan uang akan membentuk nilai akan uang tersebut. Dimana pemikiran Keynes, nilai daripada suatu uang yaitu nilai yang mana harus dibayarkan atas memanfaatkan uang, yang mana tidak lain adalah tingkat suatu bunga. Dimana penawaran uang diasumsikan ditentukan dari pada kondisi moneter.

Dan Keynes mengemukakan ada tiga tujuan dari menyimpan uang yaitu :

1. Motif transaksi
2. Motif berjaga-jaga
3. Motif spekulasi.

Motif yang terjadi dalam transaksi akan menimbulkan penggunaan akan uang sebagai alat tukar menukar yang sah. Dimana sebelumnya alat tukar menukar menggunakan barter, dimana penggunaan barter dianggap kurang maksimal dan nilai yang ditukarkan dianggap kurang tepat. Masyarakat menggunakan uang tunai dengan tujuan yaitu:

- a. Volume pada transaksi dijalankan
- b. Tingkat nilai daripada harga umum

Menurut Keynes, proses suatu equilibrium baru yang terjadi akan memakan cukup waktu lama, dipengaruhi banyaknya faktor penghambat proses equilibrium tersebut. Hambatan-hambatan termasuk ke fleksibilitas yang tidak sempurna dari harta upah dan lambatnya respon pelaku ekonomi terhadap kondisi ekonomi yang baru.

Menurut dari teori Keynes, kondisi suatu pasar akan tenaga kerja mengikuti akan pasar suatu barang. Dimana hasil akhir akan naik maka jumlah akan suatu tenaga kerja akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika output turun maka jumlah tenaga kerja yang akan dibutuhkan akan

mengalami penurunan. Keynes lebih menfokuskan pada proses makro yaitu proses terjadinya suatu keseimbangan umum. Dimana apabila terjadi perubahan investasi, government maka akan berpengaruh secara keseluruhan terhadap pasar dan perekonomian akan secara sendirinya dapat menyesuaikan pada kondisi perubahan yang mengakibatkan tercapainya suatu titik keseimbangan umum yang baru. Pada titik keseimbangan umum adalah kondisi dimana terjadinya keseimbangan yang sama pada pasar. Kondisi ekonomi akan menuju posisi keseimbangan umum yang baru tersebut.

Keynes berpandangan tingkat suatu upah tidak akan dengan mudahnya mengalami suatu grafik penurunan, yang berakibat tidak adanya lowongan kerja dimana akan sulit dihapuskan. Sedangkan dalam perekonomian modern, adanya organisasi-organisasi pekerja (buruh) yang mana selalu melakukan perjuangan pada hak nasib para pekerja. Dimana usaha dilakukan untuk tetap menjaga agar semua pekerja akan diberikan upah (gaji) yang secara wajar dan menentang penurunan upah pekerja.

1.2.3 Pendekatan Terkini dalam Penentuan Kegiatan Perekonomian
Terdapat empat golongan pemikir sesudah golongan keynesian yaitu:

1. Golongan Moneteris, dipopori oleh Milton Friedman
2. Golongan Ekspektasi Rasional dikenal Klasik Baru
3. Golongan Ekonomi Segi Penawaran
4. Golongan Keynesian Baru

3.2.1. Golongan Moneteris

Golongan moneteris berpendapat kerja penuh dalam kegiatan perekonomian akan secara efektif terjadi dalam sistem pasar bebas. dengan adanya peranan dari penawaran akan suatu uang didalam penentuan grafik pada suatu aktivitas ekonomi. Dengan adanya suatu faktor yang mengubah dalam suatu penawaran pada uang yang peranannya memiliki efek yang begitu besar dalam aktivitas ekonomi dan grafik pada harga. Tokoh Moneteris yaitu Friedrich Von Hayek serta Milton Friedman mengatakan sangat penting kenaikan dari suatu kemajuan dari nilai uang dalam kegiatan ekonomi. Friedman berpendapat pemerintah tidak diperlukan peranan yang berdampak dalam terbentuknya ekonomi. Golongan Moneteris melakukan kritik

terhadap Keynes, adapun kritiknya adalah:

- a. Suatu proses yang ada dalam pasar bebas dinilai berguna jika pengaturan aktivitas ekonomi dan memiliki kemampuan membentuk aktivitas ekonomi yang mana terjadinya kegiatan proses aktivitas dan adanya peluang dalam kerja penuh. Friedman yakin bahwa aktivitas suatu ekonomi tidak diperlukan adanya keikutsertaan pemerintah dalam pengelolaan.
- b. Suatu kegiatan dari pada ekonomi adanya suatu peranan proses penawaran dari pada uang. Dengan ada perubahan penawaran akan uang sangat penting yang mana artinya mempengaruhi aktivitas ekonomi serta grafik harga. Dimana Friedman secara langsung menanggapi pendapat Keynes yang menyebutkan pemaksimalan peranan dari aktivitas operasional agregat dalam proses aktivitas perekonomian.
- c. Dalam peraturan pemerintah diperlukan jika peraturan itu bermanfaat atau mendesak. Friedman beranggapan peraturan pemerintah yang berbentuk kebijakan moneter lebih disukai. Sedangkan kebijakan pajak dianggap tidak diperlukan dalam aktivitas ekonomi.

3.2.2. Golongan Ekspektasi Rasional dikenal Klasik Baru

Dalam golongan ekspektasi Rasional yang lebih dikenal dengan Klasik Baru, pada dasarnya ada dua pembahasan penting, yaitu:

1. Dalam permasalahan ini anggapan dimana para pelaku aktivitas perekonomian berpikir secara kritis, memiliki pengetahuan dalam latar belakang dari aktivitas ekonomi dan memiliki data yang akurat atas kejadian dari aktivitas ekonomi yang ada. Dimana berakibat kepada pengembangan analisis didasarkan pada fundamental yang ada didalam prinsip mikroekonomi yang mana berdasarkan dari asumsi produsen, penerima jasa dan pemilik modal yang bertindak secara rasional dalam menjalankan kegiatan ekonominya.
2. Segala macam dari pada pasar yang beraktivitas maksimal dan cepat melakukan penyesuaian atas kondisi yang berbeda-beda yang sering terjadi dimana mengakibatkan perekonomian beroperasi dengan menggunakan manusia secara penuh dan peraturan pemerintah tidak dapat mempengaruhi dari pada kegiatan perekonomian.

Dimana menurut Suparmono (2018) bahwa adanya dua metode yang dibuat dalam meninjau dari pada suatu aliran barang dan jasa dalam aktivitas ekaonomi. Dengan menggunakan rasio ekuilibrium secara parsial yang mana pembahasan akan membentuk dari pasar kegiatan dari pada perorangan didalam terciptanya harga dan barang. Dan digunakan rasio parsial dalam membentuk ekuilibrium dari pda harga dan barang dengan dipengaruhi oleh faktor dari luar.

3.2.3. Golongan Ekonomi Segi Penawaran

Tujuan dari ekonomi segi penawaran adalah meningkatkan efisiensi dari kegiatan operasional perseroan sehingga aktivitas dari perekonomian meningkat, penghasilan nasional secara nyata meningkat, serta peluang bertambahnya lapangan kerja dan stabilnya harga.

Dalam peningkatan ekonomi maka dilakukan suatu keputusan ekonomi untuk penawaran dengan berupaya menciptakan kondisi sebagai berikut:

- a. Para pelaku kerja akan lebih rajin dan bekerja semaksimal mungkin dalam melakukan pekerjaan.
- b. Dikurangnya akan biaya produksi dan melakukan peningkatan efisiensi kegiatan dari pada usaha.
- c. Melakukan pengembangan terhadap peranan pihak swasta dan menstimulus persaingan.

3.2.4. Golongan Keynesian Baru

Golongan Keynesian baru adalah para golongan pemikir ekonomi dimana tidak sepakat dengan pemikir sebelumnya. Dimana mereka tidak sepakat dengan pemahaman kesesuaian Keynes yang pertama. Dimana beranggapan bahwa:

- a. Pasar tenaga kerja dimana bukan pasar persaingan yang sempurna
- b. Dimana pengangguran yang serius, dengan grafik upah yang akan terjadi adalah tidak adanya penurunan dalam grafik permintaan dan penawaran dalam upah pekerja. Dengan demikian yang akan terjadi dalam proses aktivitas tenaga kerja yang sempurna adalah kemampuan untuk menjamin untuk berhasilnya kerja penuh tidak dapat terjadi.

Atas dasar hal tersebut untuk ketidaksempurnaan antara aktivitas pasar pada suatu barang serta penyebab dari suatu pasar, maka

Keynesian memiliki dasar bahwa peraturan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan aktivitas dari ekonomi serta konsisten berupaya mencapai kesempatan kerja secara penuh tercapai. Dimana Keynesian baru berharap akan pemerintah melakukan pengurangan pengeluaran, menurunkan tarif pajak terutama kepada golongan masyarakat berpenghasilan tinggi, perusahaan pemerintah dilakukan penswastaan apabila peranannya kepada masyarakat tidak penting, melakukan stimulus persaingan yang lebih sempurna di pasar faktor dan pasar barang.

3.3. Penutup

Dari pokok pembahasan diatas maka dapat kita peroleh bahwa penentu kegiatan dari pada ekonomi didasarkan dari pada tiga pandangan yaitu: menurut ahli Klasik, Keynes serta pendekatan terkini. Menurut para Ahli Klasik bahwa adanya pembatasan dari pada kekuasaan dari pada pemerintah, lebih menekankan dari pada kegunaan uang dan tingkat upah. Menurut pandangan Keynes dimana mengenai pasar akan tenaga kerja dan tingkat tabungan. Sedangkan pendekatan terkini dibagi atas moneter, klasik baru, ekonomi segi penawaran dan Keynesian baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekawarna dan Fachruddiansyah. 2008. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press.
- Fery Tobing. 2021. Moduk Pengantar Ekonomi. Jakarta: Program Diploma Tiga Perbankan dan Keuangan, Fakultas Vokasi UKI.
- Muchtolifah. Ekonomi Makro. Surabaya: Unesa Press
- Suparmono. 2018. Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

PROFIL PENULIS



Nurganda Siregar, S.E., M.Si
Dosen Akuntansi
Universitas Deli Sumatera

Penulis lahir di Torganda, 30 Juli 1989. Penulis mengajar di Universitas Deli Sumatera, Program Akuntansi. Menyelesaikan pendidikan S1 – Akuntansi di Universitas Negeri Medan dan melanjutkan studi S2 – Akuntansi di Universitas Sumatera Utara. Penulis menekuni bidang Pendidikan, Menulis dan Marketing.

4.1. Konsep keseimbangan Umum

Model keseimbangan umum adalah suatu kerangka kerja untuk menganalisis hubungan antara pasar dan dengan demikian interaksi antara industri, faktor sumber daya dan institusi. Analisis keseimbangan umum secara eksplisit berhubungan dengan keterkaitan antar pasar yang berbeda dan sektor ekonomi yang berbeda. Dalam suatu sistem perekonomian, perubahan keseimbangan pada suatu pasar tidak hanya berdampak terhadap sektor atau komoditas itu sendiri dalam pasar tersebut, tetapi juga berdampak terhadap sektor atau komoditas serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya melalui keterkaitan input-output. Oleh karena itu, dampak suatu kebijakan lebih tepat dianalisis berdasarkan teori keseimbangan umum dibandingkan dengan teori keseimbangan parsial (suryadi, 2019).

Sektor-sektor dalam perekonomian Indonesia sangat berkaitan antara satu dengan lainnya. Pada saat salah satu sektor berubah, maka perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi keseimbangan baru pada sektor tersebut saja, tetapi secara luas juga akan berdampak pada perubahan keseimbangan sektorsektor lainnya dalam suatu perekonomian. Perubahan tersebut akan terus terjadi sampai terbentuk keseimbangan baru pada semua sektor.

Analisis AD-AS merupakan analisis keseimbangan pendapatan nasional yang melengkapi analisis keseimbangan pengeluaran agregat-penawaran agregat ($Y = AE$). Dalam analisis AD-AS diperhatikan

bagaimana keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan harga-harga mengalami perubahan. Dalam analisis keseimbangan $Y = AE$ efek perubahan harga tidak diperhatikan, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit (dengan jelas), akan tetapi dapat disimpulkan bahwa analisis $Y = AE$ memisalkan bahwa tingkat harga tidak berubah.

Analisis AD-AS memperbaiki kelemahan yang didapati dalam teori Klasik dan teori Keynes. Teori klasik berpendapat dalam perekonomian tidak terdapat kekurangan permintaan agregat. Efek ini keyakinan ini selanjutnya mereka berpendapat (i) perekonomian selalu mencapai kesempatan kerja penuh, (ii) kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dan tingkat teknologi yang digunakan, dan (ii) penambahan uang dalam perekonomian akan menimbulkan inflasi.

Pandangan Klasik yang dinyatakan dalam (2) dikritik oleh Keynes dalam bukunya: *The General Theory of Employment, Interest and Money* (diterbitkan tahun 1936). Pandangan Keynes yang utama adalah : (i) dalam perekonomian pengeluaran agregat dan permintaan agregat (atau kedua-duanya juga dikenal sebagai permintaan efektif) adalah faktor utama yang menentukan kegiatan ekonomi; dan permintaan/pengeluaran agregat ini tidak dapat mencapai tingkat output pada kesempatan kerja penuh, dan sebagai akibatnya pengangguran selalu berlaku, (ii) penambahan uang akan mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja, tetapi tidak memengaruhi harga, dan (ii) pemerintah penting perannya dalam memengaruhi kegiatan ekonomi yaitu dengan menjalankan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Dalam analisis AD-AS kelemahan teori Klasik dan Keynes diperbaiki. Teori Klasik pada dasarnya sangat menumpukan perhatian ke atas segi penawaran, manakala analisis Keynesian sangat menekankan kepada segi permintaan. Dalam analisis AD-AS kedua aspek ini yaitu segi permintaan

dan penawaran diperhatikan dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional (atau dalam penentuan kegiatan ekonomi negara). Permintaan agregat AD menunjukkan keseluruhan pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Manakah penawaran agregat AS menunjukkan pengeluaran barang dan jasa yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan dalam suatu negara pada berbagai tingkat harga. Tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional dan kesempatan kerja ditentukan pada tingkat harga dimana permintaan agregat (AD) sama dengan penawaran agregat (AS).

Kurva permintaan agregat AD dibentuk oleh keseimbangan $Y = AE$ yang beralaku pada tingkat harga yang berbeda. Dalam perekonomian pengeluaran agregat meliputi $AE = C + I + G + (X - M)$. Dengan demikian kurva AD dibentuk oleh nilai AE pada berbagai tingkat harga. Kurva AD menurun kebawah, dari sisi kiri ke arah kanan dan berarti semakin rendah harga semakin besar permintaan agregat. Sifat yang demikian disebabkan oleh faktor-faktor berikut (i) pendapatan riil dan konsumsi rumah tangga meningkat apabila harga turun (ii) semakin stabil harga-harga, semakin rendah suku bunga dan menyebabkan investasi meningkat, dan (iii) harga yang semakin rendah akan menambah ekspor dan pengurangan impor.

4.2. Keseimbangan Makro Ekonomi Secara Grafis

Beberapa penulis menanamkan keseimbangan AD-AS sebagai keseimbangan makroekonomi. Dinamakan demikian karena analisis ini telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya, yaitu analisis keseimbangan pendapatan nasional yang diterangkan dalam Bab Empat hingga Bab Enam. Bagaimana keseimbangan makroekonomi ditentukan dapat diterangkan dengan menggunakan Gambar 5.1

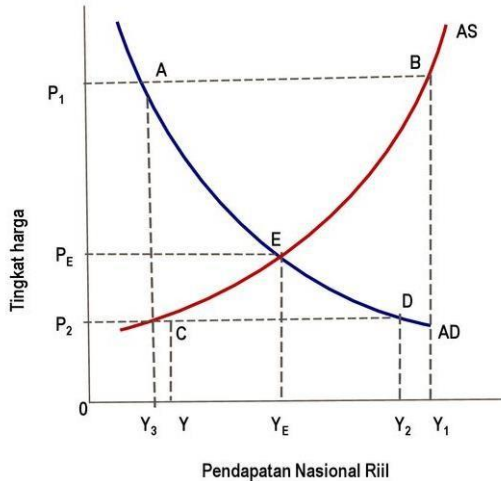
Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kurva AD dan AS

berpotongan dititik E,yang berarti permintaan agreget adalah sama dengan penawaran agreget pada pendapatan nasional riil sebanyak Y_e dan tingkat harga pada P_e .Titik E menggambarkan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian oleh karena perusahaan –perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi dan kegiatan ekonomi telah mencapai keadaan yang stabil.Dalam keadaan ini keseimbangan makroekonomi telah tercapai.

Untuk membuktikan bahwa titik E adalah titik keseimbangan yang akan menentukan tingkat harga, pendapatan nasional riil dan kesempatan kerja, perlu diperhatikan keadaan yang akan berlaku apabila tingkat harga lebih tinggi atau lebih rendah dari pada P_e . Apabila tingkat harga adalah P_0 ,penawaran agreget adalah Y_1 sedangkan permintaan agreget adalah Y_3 .Berarti terdapat kelebihan penawaran sebanyak AB.Kelebihan penawaran agreget ini menimbulkan keadaan deflasi (penurunan harga)dan tingkat harga merosot sehingga kelebihan penawaran tidak wujud lagi yaitu P_e .Sebaliknya,apabila tingkat harga P_1 akan berlaku kelebihan permintaan yaitu sebanyak CD.Pada P_1 permintaan agreget Y_2 sedangkan penawaran agreget hanya sebanyak Y.Kelebihan permintaan ini menyebabkan harga naik sehingga tingkat harga mencapai P_e ,yaitu ketika kelebihan permintaan tidak wujud lagi.

Pada ketika kelebihan penawaran berlaku, stok barang dalam perusahaan (inventaris)berlebihan dan ini akan mendorong kepada pengurangan kegiatan ekonomi. Pada keadaan yang sebaliknya,yaitu apabila kelebihan permintaan berlaku,perusahaan-perusahaan akan menambah produksinya dan kegiatan ekonomi berkembang.Hanya pada ketika permintaan agreget sama dengan penawaran agreget tingkat kegiatan ekonomi tidak mengalami perubahan dan keseimbangan makroekonomi tercapai.

Gambar 5.1
Keseimbangan Makro Ekonomi
(Keseimbangan AD-AS)



4.3. Perubahan Keseimbangan dan Penyebabnya

Keseimbangan permintaan agregat-penawaran agregat akan selalu mengalami perubahan dari waktu sesuai dengan perubahan dalam perekonomian. Perubahan yang akan berlaku dapat dibedakan kepada tiga bentuk, yaitu:

- a. perubahan dalam AD saja
- b. perubahan dalam AS saja
- c. perubahan serentak dalam AD dan AS

Efek Perubahan Kurva AD

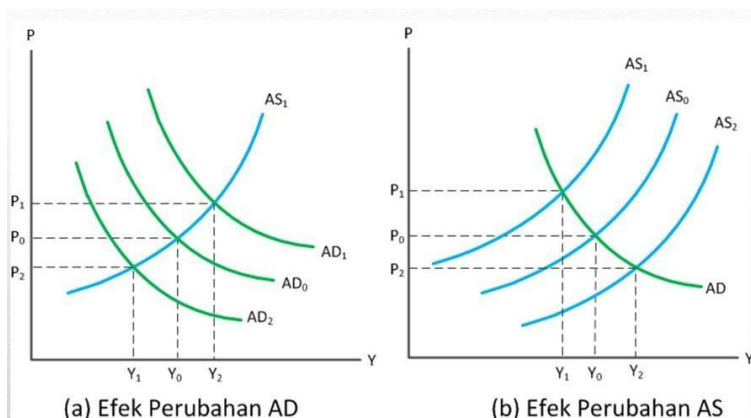
Evek perubahan kurva AD ditunjukkan dalam Gambar 5.2. Keseimbangan yang asal adalah di E_0 dan berarti mulanya tingkat harga P_0 dan pendapatan nasional riil adalah Y_0 . Kemerosotan penengluaran dalam perekonomian (yang disebabkan oleh pengurangan C, I, G atau X) akan memindahkan AD_0 menjadi AD_1 dan memindahkan keseimbangan

ke E_1 yang menggambarkan tingkat harga telah merosot menjadi P_1 dan pendapatan nasional riil berkurang menjadi Y_1 . Keadaan ini berarti: output nasional berkurang, deflasi berlaku, kesempatan kerja merosot dan pengangguran bertambah.

Apabila pengeluaran dalam ekonomi meningkat, kurva AD_0 akan bergeser ke AD_2 dan keseimbangan yang baru adalah di E_2 . Keseimbangan ini menunjukkan pendapatan nasional riil meningkat menjadi Y_2 dan berarti kesempatan meningkat dan pengangguran berkurang. Akan tetapi perkembangan ini menyebabkan tingkat harga meningkat menjadi P_2 .

Dari pada analisis di atas dapat dibuat keseimbangan berikut: Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional riil ke arah yang bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot.

Gambar 5.2
Efek Perubahan Kurva AD-AS



Tingkat harga meningkat menjadi P_2 . perubahan ini menggambarkan bahwa kenaikan harga berlaku tetapi pendapatan

nasional riil merosot dan menyebabkan pengangguran meningkat. Keadaan seperti ini dinamakan stagfalasi- yaitu kemunduran dalam kegiatan ekonomi yang diikuti oleh masalah inflasi.

Telah diterangkan bahwa kemajuan teknologi, perbaikan dalam infrastruktur dan langkah-langkah pemerintah dalam bidang perpajakan, pemberian izin usaha dan sikap administrasi pemerintah yang berusaha membantu kegiatan swasta dapat menimbulkan efek yang menggalakkan ke atas biaya produksi dan akan memindahkan kurva AS ke bawah/kanan misalnya dari AS_0 menjadi AS_1 . Peningkatan yang menyeluruh dari efisiensi perusahaan-perusahaan misalnya sebagai akibat kualitas tenaga kerja yang bertambah baik, juga dapat menimbulkan efek yang seperti itu. Perubahan tersebut memindah keseimbangan ke E_1 yang menggambarkan tingkat harga turun menjadi P_1 dan mendapatkan nasional riil bertambah menjadi Y_1 . Keadaan ini berarti pula bahwa kesempatan kerja bertambah dan pengangguran menurun.

Analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan riil ke arah yang bertentangan. Sebagai contoh, pergeseran AS ke atas menyebabkan tingkat harga naik dan pendapatan nasional riil turun.

4.4. Efek Perubahan Serentak AD dan AS

Gambarannya yang lebih realistis mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian adakalanya meliputi perubahan dalam kurva yaitu AD dan AS, secara berurutan. Dua contoh digambarkan berikut ini dalam Gambar 5. 3.

Gambar:

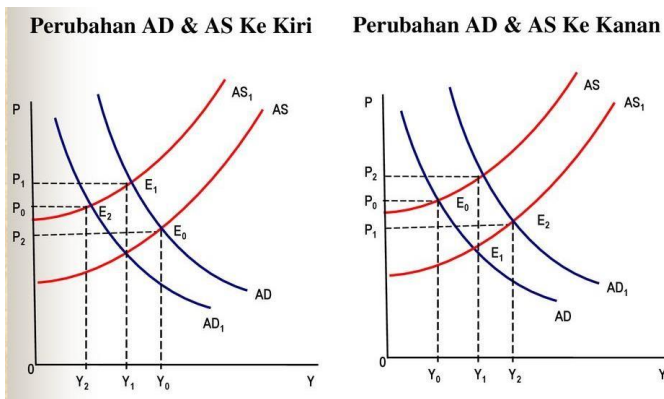
- (a) Menunjukkan perubahan kurva AS yang diikuti oleh perubahan kurva AD ke kiri, dan gambar.
- (b) Menunjukkan perubahan yang diikuti oleh perubahan kurva AS yang

diikuti oleh pergeseran kurva AD ke kanan.

Terlebih dahulu perhatikan gambar (a). Keseimbangan asal di E_0 (berarti harga P_0 dan pendapatan nasional riil adalah Y_1). Perubahan ini akan mengurangi tingkat kesempatan kerja serta pendapatan riil rumah tangga. Perubahan ini akan mengurangi permintaan agregat, misalnya dari AD menjadi AD_1 . Maka pada akhirnya keseimbangan yang baru adalah di E_2 . Pada keseimbangan ini tingkat harga adalah P_2 dan pendapatan nasional riil adalah Y_2 .

Seterusnya perhatikan pula gambar (b) Misalkan pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur, menurunkan berbagai pajak yang harus di bayar perusahaan-perusahaan dan melakukan berbagai tindakan yang menggalakkan perkembangan kegiatan swasta. Tindakan seperti ini mengalihkan kurva AS ke bawah/kanan, misalnya dari AS menjadi AS_1 . Efek dari perubahan ini keseimbangan berubah dari E_0 menjadi E_1 . Berarti, tingkat harga turun dari P_0 menjadi P_1 dan pendapatan nasional riil meningkat dari Y_0 menjadi Y_1 . Peningkatan pendapatan nasional akan menambahkan kesempatan kerja. Selanjutnya pertambahan kesempatan kerja akan meningkatkan permintaan agregat, misalnya dari AD menjadi AD_1 . Keseimbangan makroekonomi yang baru dicapai di E_2 yang menggambarkan tingkat harga telah menjadi P_2 dan pendapatan nasional riil adalah Y_2 .

Gambar 5.3
Efek Perubahan Kurva AD dan AS



4.5. Analisis Keseimbangan Umum Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi senantiasa menjadi isu sentral dalam masalah pembangunan. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan, pengangguran, dan kemiskinan. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut pemerintah dapat menerapkan kebijakannya melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Berdasarkan interaksi kebijakan fiskal dan moneter melalui keseimbangan IS – LM, kebijakan fiskal lebih efektif diterapkan ketika Indonesia ingin melakukan pembangunan yang cepat. Akan tetapi harus tetap diseimbangkan dengan kebijakan moneter supaya kondisi moneter Indonesia tidak kolaps yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Akhyar *et al.* 2019). Hal ini sejalan dengan hasil kajian dari Fajrin *et al.* (2023) yang menjelaskan perilaku saat ini dan jangka Panjang dari keseimbangan bunga uang kartal di Indonesia. Perkembangan catatan yang fluktuatif menunjukkan bahwa secara keseluruhan keseimbangan bunga uang kartal di Indonesia selama periode persepsi berada dalam

kondisi yang tidak sehat. Konsekuensi dari tinjauan ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita mempengaruhi keseimbangan bunga uang kartal di Indonesia baik untuk jangka waktu sekarang maupun jangka panjang. Variabel biaya pinjaman pada saat ini berpengaruh negatif dan signifikan dan dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan bunga uang di Indonesia. Sedangkan variabel ekspansi berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan bunga uang kartal di Indonesia untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Namun adakalanya kebijakan pemerintah dari sisi fiskal membawa dampak terhadap sektor lain. Dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah dalam memotong jumlah subsidi. Handoko (2000) mengemukakan bahwa dari sisi sektoral, penurunan subsidi BBM sebesar 40% menyebabkan penurunan nilai tambah, kenaikan harga domestik, kenaikan harga energi rata-rata dan penurunan employment pada hampir seluruh sektor atau industri pada perekonomian. Sektor yang relatif paling besar terkena dampak adalah sektor penyulingan minyak, kemudian diikuti sektor transportasi dan sektor industri besar dan sedang (IBS). Penurunan subsidi BBM yang diikuti dengan kenaikan harga BBM jelas akan membebani konsumen, di sisi lain kenaikan harga tersebut akan mengurangi beban anggaran pemerintah. Untuk itu harus ada kompromi mengenai hal tersebut. Kompromi yang paling dimungkinkan adalah jika pemerintah harus mengurangi beban subsidi maka pengurangan tersebut harus dilakukan secara gradual atau bertahap

Studi dari Wardhana, et.al (2019) menunjukkan dampak proyek Infrastruktur Proyek Strategis nasional (PSN) yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2015-2023 akan mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia sekitar 0,04 s.d 0,09 persen poin, dengan dorongan pertumbuhan tertinggi yaitu pada tahun 2024 dan 2027. Investasi

infrastruktur jalan dan jembatan adalah instrumen yang memberikan dampak terbesar terhadap peningkatan PDB, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan. Di sisi lain, sebagian besar proyek infrastruktur memberikan tekanan terhadap defisit neraca perdagangan, kecuali infrastruktur komunikasi dan infrastruktur energi (kilang) yang dalam jangka panjang mampu mengurangi defisit neraca perdagangan.

Keseimbangan umum juga terkait dengan perdagangan internasional termasuk perdagangan komoditas pertanian. Inayah (2020) melaporkan bahwa penurunan tarif impor komoditas pertanian menyebabkan peningkatan kesejahteraan yang dicerminkan oleh surplus ekonomi total, yaitu surplus konsumen, surplus produsen, dan penerimaan pemerintah. Kajian ini menyarankan beberapa kebijakan perdagangan di sektor pertanian. Pertama, pemerintah sebaiknya tetap mempertahankan tarif impor rata-rata untuk komoditas pertanian pada level 15 persen seperti pada Skenario yang telah disepakati. Selanjutnya, karena dalam jangka panjang WTO akan menciptakan situasi perdagangan sebebaskan mungkin, makaperlu adanya upaya lain selain tarif bagi pemerintah untuk melindungi produsen seperti peningkatan infrastruktur dan penerapan teknologi di bidang pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldina Nur Fajrin, Anas Iswanto Anwar, Mirzalin Zaenal, Analisis Keseimbangan Permintaan Uang di Indonesia, Volume 4 Issue 1 (2023) Pages 267 - 298 Economics and Digital Business Review ISSN : 2614-851X (Online)
- Iin Inayah, Dampak Penurunan Tarif Impor Komoditas Pertanian Pada Kesejahteraan, Diponegoro Journal of Economics, Volume 9, Nomor 3, Tahun 2020, Halaman 25/37, Issn (Print): 2337-3814,

- Muhammad Akhyar, Sofyan Syahnur, Asmawati, Analisis Interaksi Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 5 Nomor 2, September 2019 ISSN. 2502-6976
- Suryadi, Model Keseimbangan Umum Perekonomian Indonesia Teori dan Aplikasi Dampak Perubahan Harga dan Produksi Padi terhadap Kinerja Ekonomi Sektoral dan Kesejahteraan, Diterbitkan oleh: Delta Pijar Khatulistiwa Jenggot Selatan, Kavling No.1, Desember 2019
- Sadono Sukirno, Makro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi 3, PT. Grafindo Persada, 2004
- Wisynu Wardhana, Nararia Sanggrama W, Adventus Parulian Van Tua, Akhmad Iksanuddin, Analisis Dampak Ekonomi Investasi Infrastruktur: Pendekatan Model Komputasi Keseimbangan Umum, Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 1 No. 2 (2019)

PROFIL PENULIS



Dona Amelia, S.E., M.Si.

**Dosen Program Studi Manajemen
Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi**

- Nama Lengkap : Dona Amelia, SE, M.Si
- Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Tinggi / May 16, 1978
- Doktoral (S3) 2021- sekarang : Program Doktor Ilmu
Ekonomi, Universitas
Andalas
- Master (S2) 2010-2013 : Pascasarjana, Perencanaan
Pembangunan Nasional
(PPN), Fakultas Ekonomi,
Universitas Andalas,
- Sarjana (SI) 1996- 2001 : Fakultas Ekonomi, Univ.
Andalas, lulus pada tahun

PENAWARAN UANG

Oleh

Fandra Dikhi Januardani, S.E., M.M.

5.1. Pengertian Penawaran Uang

Penawaran uang merupakan jumlah uang yang beredar dan tersedia pada suatu perekonomian.

Menurut Sadono (2005) menyatakan bahwa penawaran uang memiliki dua arti, yaitu:

1. Penawaran Uang secara Sempit.

Penawaran uang dalam arti sempit merupakan sebagai jumlah dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu.

2. Penawaran Uang secara Luas.

Penawaran uang dalam arti luas merupakan sebagai uang kartal, uang giral dan uang kuasi yang beredar pada waktu tertentu. Kuasi adalah uang yang tersimpan di bank dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan valas (valuta asing).

Penawaran uang juga memiliki dua hal yang harus dipahami dan memiliki arti yang berbeda, yaitu:

1. Uang dalam Peredaran.

Uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan serta diedarkan pihak Bank Sentral.

2. Uang Beredar.

Uang beredar adalah semua jenis uang yang tersedia dalam perekonomian termasuk juga didalamnya dengan jumlah uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang ada di Bank Umum.

Pada umumnya, penawaran uang memiliki hubungan dengan peran Bank Sentral sebagai otoritas moneter serta memiliki wewenang untuk mencetak uang sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi, penawaran uang disini diartikan sebagai efisiensi salah satu usaha Bank Sentral untuk menjamin tentang kelancaran sirkulasi jumlah uang beredar di masyarakat.

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang memiliki tujuan untuk mengatur penawaran uang ataupun mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi, penawaran uang merupakan tugas Bank Indonesia untuk mengendalikan secara keseluruhan yang berkaitan tentang keuangan.

Perlunya pencatatan neraca pada setiap penawaran uang ke masyarakat. Untuk itu, ada beberapa lembaga yang menawarkan uang, yaitu:

1. Penawaran Uang oleh Pemerintah. Penawaran uang ke masyarakat pada masa lalu dalam bentuk uang pecahan, alasannya adalah untuk transaksi kecil-kecilan serta sebagai pendapatan pemerintah.
2. Penawaran Uang oleh Bank Sentral. Bank Sentral mencetak uang serta mengedarkan uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (uang kartal).
3. Penawaran Uang oleh Bank Umum. Bank Umum juga dapat mengeluarkan cek dan cet tersebut dianggap berlaku sebagai alat pembayaran ataupun alat transaksi yang pantas (uang giral).

5.2. Penawaran Uang Tanpa Bank

Pada teori ini, menganggap perbankan tidak ada, kalau ada tidak memiliki pengaruh terhadap proses penciptaan uang. Dan teori ini merupakan gambaran pada saat perekonomian masih menggunakan emas sebagai alat pembayaran sebelum perbankan mempengaruhi penggunaan alat tukar. Masyarakat menggunakan teori ini karena harga emas bisa naik dan turun, uang beredar secara otomatis berdasarkan mekanisme pasar dan tanpa campur tangan pemerintah.

Pada penawaran uang tanpa bank yang lebih memilih menggunakan emas sebagai alat pembayaran, maka penawaran ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Jumlah alat tukar / emas yang beredar berubah-ubah.
2. Jumlah alat tukar / emas turun apabila defisit neraca pembayaran luar negeri digunakan untuk pembayaran barang.
3. Perubahan alat tukar / emas bisa terjadi, karena adanya peningkatan penggunaan emas untuk produksi lain.
4. Kenaikan jumlah alat tukar / emas, jika terjadi surplus pembayaran luar negeri ataupun ditemukannya lokasi tambang emas baru.
5. Uang yang beredar benar-benar telah ditentukan secara otomatis oleh proses pasar.
6. Pena,bahan produksi emas, jika harga emas tinggi dibandingkan barang yang ditukarkan. Maka produksi pada emas akan tinggu juga, namun jika penawaran emas melebihi harga emas akan turun dan penawaran juga akan berkurang.
7. Teori penawaran uang belum berkembang dan masih dalam bentuk sederhana, karena tidak memerlukan campur tangan untuk mempengaruhi jumlah.

5.3. Penawaran Uang Klasik

Perubahan pada penawaran uang akan menimbulkan perubahan proposional dengan tingkat harga. Kenaikan pada penawaran uang akan juga menaikkan harga pada tingkat yang sama dan menurunkan pada penawaran uang akan juga menurunkan harga pada tingkat yang sama.

Jadi, penawaran uang klasik dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Teori Kuantitas Uang (*The Quantity Theory of Money*)

Menurut Fisher menyatakan bahwa kuantitas uang berkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan total pengeluaran dari barang dan jasa akhir yang telah diproduksi didalam suatu perekonomian. Teori ini mendorong orang untuk lebih mendorong orang untuk lebih condong memegang uang dengan motif untuk

melakukan transaksi. Selanjutnya Persamaan Kuantitas muncul jika Total Pengeluaran dipecahkan ke dalam dua variabel yaitu Harga (P) dan Total Transaksi (T).

$$\text{Uang} \times \text{Perputaran} = \text{Harga} \times \text{Transaksi}$$

$$M V = P T$$

Dimana :

M = Jumlah Uang Beredar

V = *Velocity* / Perputaran Uang dalam Satu Periode

P = Harga Barang atau Jasa

T = Jumlah Transaksi

Dari sisi kanan merupakan persamaan identitas yang mencerminkan transaksi yang terjadi didalam suatu perekonomian, dimana P merupakan harga rata-rata (*average price*) dan T merupakan jumlah transaksi yang terjadi didalam perekonomian selama periode tertentu.

Dari sisi kiri merupakan persamaan yang mencerminkan jumlah uang yang digunakan untuk melakukan transaksi yang dilakukan didalam suatu perekonomian selama periode tertentu. M merupakan kuantitas uang dan sedangkan V merupakan perputaran uang transaksi untuk mengukur tingkat uang bersikulasi dalam perekonomian.

Mankiw (2014) menyatakan bahwa persamaan kuantitas merupakan sebuah identitas. Persamaan ini menunjukkan bahwa jika satu dari variabel berubah, maka satu atau lebih variabel juga harus berubah untuk menjaga persamaan. Tapi, persamaan tersebut memiliki masalah, bahwa transaksi sulit untuk diukur. Jadi, Mankiw menyatakan bahwa untuk memecahkan permasalahan ini, jumlah transaksi T diganti menjadi output total dari perekonomian Y. Transaksi dan output berkaitan dikarenakan semakin banyak aktivitas ekonomi atau memproduksi, maka semakin banyak barang ataupun jasa yang dibeli atau dijual. Selanjutnya Fisher menyadari bahwa total pengeluaran dapat berubah dan memisahkan total pengeluaran menjadi kuantitas barang yang dibeli (Y), dan harga dari barang (P). Sehingga persamaannya menjadi :

Uang x Perputaran = Harga x Output

$$M V = P Y$$

Y merupakan pendapatan total, maka V menjadi perputaran pendapatan uang. Jadi, perputaran uang menyatakan berapa kali uang masuk ke pendapatan seseorang dalam periode tertentu.

2. Teori Sisa Tunai

Teori ini menerangkan sifat hubungan antara penawaran uang dan tingkat harga. Di terangkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$M = kPT$$

Dimana :

M, P, T = Persamaan dari $MV=PT$

k = Pendapatan Masyarakat

Ada beberapa kiriti atas teori kuantitas uang, yaitu:

- T = tetap. Merupakan kurang tepat.
- Laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka waktu tertentu, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang
- Hubungan antara penawaran uang dan harga. Merupakan lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas.
- Teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi dari uang sebagai alat melicinkan kegiatan tukar menukar.
- Teori kuantitas uang mengabaikan efek pada perubahan penawaran uang atas suku bunga.

5.4. Penawaran Uang Modern

Teori penawaran uang atau disebut juga sistem standar kertas merupakan otoritas moneter yang menyalurkan uang inti atau primer, sedangkan lembaga keuangan (perbankan) merupakan penyalur uang sekunder bagi masyarakat. Jika pada waktu permintaan uang inti tidak sama dengan penawaran, maka para pelaku pasar uang akan melakukan penyesuaian berupa beberapa tindakan di sub-pasar uang inti sehingga pada akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Begitu juga dengan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di sub-pasar uang sekunder (uang giral).

Saat pasar dalam posisi seimbang, pemerintah menambah penawaran uang inti kepada masyarakat atau tambahan uang tunai (uang kartal). Jika tindakan penyesuaian yang dilakukan masyarakat dengan menyimpan kelebihan uang tunai de dalam giro, maka cadangan bank akan menjadi lebih besar dan bank mungkin akan menanamkan kelebihan cadangan dengan membeli SBI.

Pada dunia pertukaran modern, para produsen emas tidak memiliki peran moneter, karena dalam standar uang kertas merupakan sumber dari terciptanya uang beredar. Sumber terciptanya uang beredar merupakan otoritas moneter sebagai *supplier* uang inti dan lembaga keuangan sebagai *supplier sekunder*.

5.5. Jumlah Uang Beredar

Menurut Solikin (2002) menyatakan bahwa jumlah uang beredar merupakan seluruh jenis uang yang berada pada perekonomian yang dikeluarkan serta diedarkan secara resmi oleh Bank Sentral untuk uang kartal, dan Bank Umum menerbitkan uang giral serta uang kuasi (tabungan, valas dan lain sebagainya).

Pada uang beredar di Indonesia memiliki beberapa jenis yang terdiri dari (Boediono, 1982), yaitu:

1. Uang Beredar dalam Arti Sempit (M1). Merupakan kewajiban sistem moneter (Bank Sentral) dan Bank Umum terhadap sektor swasta domestik atau masyarakat yang meliputi uang kartal (C: uang kertas dan uang logam) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan uang giral (*Narrow Money*) yang memiliki sifat dapat dipakai sebagai alat pembayaran setiap saat, jika diinginkan karena sifatnya likuid dan tidak terkait waktu dalam pemakaiannya. Dan dapat dirumuskan menjadi:

$$M1 = C + D$$

2. Uang Beredar dalam Arti Luas (M2). Sering dikenal dengan istilah likuiditas perekonomian (*Broad Money*), dapat mempengaruhi perkembangan tingkat harga, produksi dan keadaan ekonomi. M2 tersusun yang terdiri dari M1 ditambahkan dengan deposito berjangka (*time deposit*) dan saldo tabungan milik masyarakat yang berada di bank (*saving deposits*), dan dapat dirumuskan menjadi:

$$M2 = M1 + TD + SD$$

5.6. Mekanisme Penciptaan Uang

Pada mekanisme penciptaan uang ada tiga pelaku yang terlibat dalam mekanisme ini menurut Solikin (2002), yaitu:

1. Penciptaan Uang Primer oleh Otoritas Moneter.

Bank Sentral memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal. Uang kartal dan simpanan cadangan Bank Umum di Bank Sentral yang dinamakan uang primer ataupun uang inti (*base money*) dengan simbol M0. M0 juga dikenal dengan *high power money* dengan ukuran uang yang paling sempit (*the narrowest measure of money*) merupakan sebagai kewajiban (pasiva) moneter bersih otoritas moneter yang dipegang oleh beberapa bank umum dan masyarakat (Insukindro, 1994).

Uang primer merupakan kartal yang dipegang oleh masyarakat dan bank umum, serta ditambah saldo rekening giro ataupun cadangan milik bank umum dan masyarakat di Bank Indonesia. Pada jenis uang beredar ini dapat dihitung dengan rumus:

$$M0 = \text{Currency (C)} + \text{Reserve (R)}$$

Dimana:

M0 : Uang Primer

C : *Currency* (Uang Kartal)

R : *Reserve* (Cadangan)

Uang beredar dikelompokkan menjadi tiga komponen yaitu uang

primer (M0), uang dalam arti sempit (M1) dan uang dalam arti luas (M2). Diketahui bahwa semua uang tunai yang dicetak oleh otoritas moneter merupakan uang primer, baik yang disimpan oleh masyarakat maupun disimpan di beberapa bank umum.

2. Penciptaan Uang oleh Bank Umum.

Pada Bank Umum merupakan lembaga keuangan yang dapat menciptakan uang giral dan uang kuasi. Mekanisme terjadinya penciptaan uang giral dan kuasi pada bank umum (Pohan, 2008) adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme Substitusi. Penciptaan uang ini terjadi karena nasabah menyimpan uang kartal di bank umum dalam bentuk rekening koran, tabungan, deposito, dan giro. Selanjutnya setelah diterbitkan, secara otomatis bank tersebut telah menciptakan uang giral dan kuasi. Pada penciptaan uang giral dan kuasi bertambah, namun uang kartal akan berkurang.
 - b. Mekanisme Transformasi. Penciptaan uang terjadi karena bank umum mendiskontokan wesel ataupun membeli surat berharga dari nasabah dan membukukan nilai wesel yang didiskontokan atau surat berharga yang dibeli kedalam rekening tabungan, deposito ataupun giro atas nama nasabah.
 - c. Mekanisme Pemberian Kredit. Pada pemberian kredit oleh bank umum kepada nasabah, kredit akan dipindah bukukan de dalam bentuk rekening koran ataupun rekening giro nasabah.
- ## 3. Hubungan Uang Primer dengan Uang Beredar.

Uang Primer (M0) adalah inti dalam suatu proses penciptaan jumlah uang beredar (*money supply*). Serta diketahui bahwa bank sentral mampu mengendalikan uang primer yang berada pada sisi pasiva Neraca Otoritas Moneter. Otoritas moneter dalam mengendalikan jumlah uang beredar sangat tergantung pada berbagai faktor, karena bank umum memiliki peran dan kemampuan dalam menciptakan uang giral dan kuasi. Serta jumlah uang beredar juga

dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam membelanjakan uang.

Perubahan pada nilai aktiva dan pasiva dalam neraca otoritas moneter memberikan petunjuk atupun indikasi tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer. Pergerakan pada uang primer perlu dikontrol karena berpengaruh terhadap perubahan jumlah uang beredar, terutama jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) (Manurung dan Rahardja, 2004).

5.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran Uang

Penawaran memiliki sifat fluktuatif (naik-turun). Sifat tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya penawaran uang. Untuk itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran uang (Jimmy, 2014), yaitu:

1. Kebijakan Bank Sentral. Besar atau kecilnya penawaran uang dipengaruhi langsung oleh Bank Sentral. Kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif serta kebijakan uang baru.
2. Tingkat Pendapatan Masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin banyak uang yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi, begitu juga sebaliknya.
3. Tingkat Harga. Kenaikan biaya produksi akan mengakibatkan naiknya harga suatu barang ataupun jasa. Apabila harga suatu barang ataupun jasa naik, maka harus memiliki ketersediaan lebih banyak uang agar masyarakat bisa membayar kenaikan barang ataupun jasa tersebut.
4. Selera Masyarakat. Jika selera masyarakat terhadap barang atau jasa meningkat, maka akan mendorong peningkatan permintaan barang ataupun jasa tersebut. Jika permintaan barang atau jasa meningkat, maka harga juga akan meningkat. Saat harga barang atau jasa meningkat, maka pemerintah harus menambahkan jumlah

- uang yang beredar. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut.
5. Peningkatan Produksi Barang dan Jasa. Jika peningkatan produksi barang atau jasa tidak diimbangi dengan penambahan jumlah uang yang beredar, maka akan menyebabkan deflasi. Jadi, agar deflasi tidak terjadi, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. UGM Press: Yogyakarta.
- Efendi,Sofian,2005. Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Lokakarya Reformasi Birokrasi. Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur negara
- Fauzan, Muhammad. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah,Yogyakarta: UII Press.
- Fauzi, Noer dan R.Yando Zakaria. 2000. Mensiasati Otonomi Daerah, Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST Press
- Aulia, Pohan. 2008. Kerangka Kebijakan Moneter dan Implikasinya di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Boediono. 1982. Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada
- Hasoloan, Jimmy. 2014. Ekonomi Makro. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Inkusindro. 1994. Pendekatan Kointegrasi dalam Analisis Ekonomi, Studi Kasus Permintaan Deposito dan Valuta Asing di Indonesia: Jurnal Ekonomi Indonesia, Vol 1 No.2
- Mankiw, N. Gregory. 2014. Pengantar Ekonomi Makro Edisi Asia. Jakarta: Salemba Empat
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. 2004. Uang, Perbankan,

- dan Ekonomi Moneter. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Solikin, Suseno. 2002. Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI
- Sukirno, Sadono. 2005. Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada

PROFIL PENULIS



Fandra Dikhi Januardani, S.E., M.M.
Dosen Prodi Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MARS Pematangsiantar

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MARS Pematangsiantar Sumatera Utara. Lahir di Deli Serdang, 18 Januari 1991. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara prodi Manajemen konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan prodi Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Penulis menekuni bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan Manajemen Pemasaran.

KEGIATAN EKONOMI NASIONAL

Oleh

Nanda Harry Mardika, S.Pd., M.M.

6.1. Pengertian Kegiatan Ekonomi

Kebutuhan manusia sangatlah beragam, mulai dari makanan, rumah, pakaian untuk bekerja atau bermain hingga bahan bakar untuk transportasi tergolong kedalam kebutuhan manusia. Harus ada jual beli antara pedagang dan pembeli agar dapat memenuhi segala tuntutan kehidupan tersebut. Kegiatan ekonomi dapat berlangsung sebagai hasil dari pertukaran ini. Karena setiap orang mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup yang berbeda-beda, begitu pula dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan. Dengan kata lain, setiap manusia melakukan aktivitas ekonomi dengan serangkaian tujuan unik yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

Kegiatan ekonomi nasional dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang dilaksanakan warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kegiatan ekonomi melibatkan penciptaan, transfer, dan konsumsi produk dan jasa di semua tingkat masyarakat. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang untuk bertahan hidup dan dilandasi oleh prinsip-prinsip ekonomi. Disadari atau tidak, pada dasarnya semua tindakan manusia terkait dengan aktivitas ekonomi. Seseorang yang bekerja di kantor menjawab pertanyaan pelanggan juga terlibat dalam kegiatan ekonomi. Majikan yang membayar upah kepada

pekerja juga terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Sejak dahulu kala, telah ada kegiatan ekonomi. Sejak awal keberadaan manusia di planet ini, terdapat kebutuhan terhadap manusia akan ekonomi. Perburuan, penebangan hutan, bertani, dan beternak merupakan bentuk kegiatan ekonomi pada zaman prasejarah. Kegiatan ekonomi telah berkembang dalam berbagai variasi dari waktu ke waktu.

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi pastinya membutuhkan pelaku. Tanpa adanya pelaku, maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan maksimal.

1. Rumah tangga keluarga
2. Perusahaan
3. Negara
4. Masyarakat
5. Koperasi

6.2. Jenis Kegiatan Ekonomi

Ilmu ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, ekonomi makro dan ekonomi mikro berdasarkan ukuran dan ruang lingkungannya. Dalam ilmu ekonomi makro dibahas seluruh perekonomian suatu negara atau suatu wilayah. Sedangkan mikroekonomi membahas tentang bagaimana masyarakat dan dunia usaha berperilaku. Bentuk kegiatan ekonomi berdasarkan aktivitas kerja bermacam-macam, antara lain memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang atau jasa.

6.2.1. Kegiatan Ekonomi Produksi

Produksi adalah tindakan menciptakan sesuatu, baik itu produk, pendapatan, atau hasil. Akibatnya, produksi dapat dilihat sebagai aktivitas yang meningkatkan perekonomian dengan menghasilkan hasil produksi yang memungkinkan terpenuhinya keinginan manusia. Kegiatan ekonomi produksi tentunya memerlukan komitmen finansial

untuk menciptakan atau memproduksi barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Konsumen mungkin menjadi tertarik dan memutuskan untuk membeli produk atau jasa yang berkualitas.

Kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dilakukan oleh produsen. Istilah "produsen" biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang, bisnis, atau entitas lain yang memiliki kapasitas untuk menciptakan produk atau layanan untuk digunakan konsumen.

Produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Nantinya, barang atau jasa yang diproduksi ini yang akan dikonsumsi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasil proses produksi barang ada tiga macam, yaitu produksi barang mentah, produksi barang setengah jadi, dan produksi barang jadi. Sementara untuk jenisnya, produksi terbagi menjadi beberapa macam, yakni:

- a. Produksi Ekstraktif. Contoh: Ekstraksi minyak bumi, ekstraksi logam, pengeboran gas bumi.
- b. Produksi Agraris. Contoh: sayuran, buah-buahan, padi, dan lain-lain.
- c. Produksi Industri. Contoh: makanan, minuman, pakaian, sepatu, mesin, alat elektronik, dan lain-lain.
- d. Produksi Perdagangan. Contoh: perantara, trader, atau makelar.
- e. Produksi Jasa. Contoh: Konsultan, manajemen keuangan, pendidikan, penerjemah bahasa asing, pelayanan kesehatan.

Kegiatan ekonomi produksi tidak bisa dilepaskan dari yang namanya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi bisa memengaruhi naik turunnya tingkat produksi, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal.

a. Sumber Daya Manusia

Tenaga kerja manusia adalah pekerjaan yang dilakukan manusia selama proses produksi untuk menghasilkan produk atau jasa yang

berkualitas tinggi. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembuatan barang atau jasa.

Berdasarkan kualitasnya, sumber daya manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1). Tenaga kerja terdidik
- 2). Tenaga kerja terlatih
- 3). Tenaga kerja tak terdidik dan tak

b. Sumber Daya Alam

Lingkungan alam yang baik dan berkualitas juga akan menghasilkan barang yang bagus dan berkualitas. Sumber daya alam telah digunakan untuk membuat berbagai macam barang, termasuk tangan, udara, air, dan barang pertambangan. Semua sumber daya alam tersebut dapat mendongkrak perekonomian masyarakat, namun juga dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

- 1) Sumber daya alam tanah
- 2) Sumber daya alam udara
- 3) Sumber daya alam air

c. Sumber Daya Modal

Berdasarkan kegunaannya, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal lancar dan modal tetap. Modal lancar adalah modal yang berupa barang-barang yang bisa dipakai lebih dari satu kali produksi. Misalnya tanah, mesin pabrik, gedung, dan lain-lain. Sementara itu, modal lancar adalah modal yang berupa barang-barang yang hanya bisa dipakai satu kali dalam sekali proses produksi. Misalnya bahan bakar minyak.

Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang terlihat saat melakukan produksi. Contohnya berupa mesin, gedung, dan bahan baku. Sedangkan modal abstrak adalah modal yang tidak terlihat saat melakukan produksi. Contohnya berupa pengetahuan, keahlian, merek produk, dan pengetahuan.

6.2.2. Kegiatan Ekonomi Distribusi

Distribusi adalah suatu jenis kegiatan ekonomi yang memindahkan produk dari produsen ke konsumen. Teknik distribusi ini sangat penting karena memungkinkan penyebaran luas dan konsumsi produk oleh pelanggan. Konsumen akan kesulitan mendapatkan barang yang mereka butuhkan tanpa sistem distribusi. Oleh karena itu, tepat bila dikatakan bahwa kegiatan distribusi menghubungkan perekonomian produksi dan konsumsi. Kegiatan distribusi dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain jumlah barang, luas wilayah, sifat produk, variabel biaya, fasilitas transportasi, kondisi pasar, variabel perusahaan, dan fasilitas komunikasi.

Kegiatan distribusi ini meliputi memasarkan produk, menulis informasi produk dengan benar dan jelas, penyortiran produk, pengangkutan produk, menjual produk dengan harga yang kompetitif, memastikan ketersediaan stock produk di pasar, menyimpan produk sesuai dengan prosedur dari produsen, belanja produk dari produsen.

Kegiatan distribusi terbagi menjadi tiga, yaitu distribusi langsung, distribusi tidak langsung, dan distribusi semi langsung. Jika dijelaskan lebih rinci, dapat kita perhatikan di bawah ini.

f. Distribusi Langsung

Distribusi langsung adalah ketika produsen menangani sendiri proses distribusinya. pemasaran, penjualan, dan pengiriman adalah tiga yang pertama. Produsen skala kecil biasanya menangani distribusi langsung karena mereka memiliki sistem yang mudah. Namun, produsen besar saat ini juga terlibat dalam distribusi langsung berkat kemajuan teknologi. Perusahaan-perusahaan besar bersiap untuk memasang sistem yang lebih kompleks untuk menjangkau konsumen secara langsung dengan menggunakan media sosial dan pasar. Perusahaan besar yang mengikuti distribusi ini biasanya bergerak di industri barang konsumsi.

g. Distribusi Tidak Langsung

Distribusi langsung adalah ketika distributor sendiri yang menangani seluruh distribusi grosir dan eceran dari produsen ke konsumen. Sementara itu, produsen hanya berkonsentrasi pada produksi. Biasanya, jumlah dan nilai barang yang disebarakan secara tidak langsung sangatlah besar. Akibatnya, pendistribusian semacam ini memakan waktu lama karena proses produksi yang lama dan proses negosiasi antara kedua perusahaan.

h. Distribusi Semi Langsung

Distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi dimana produsen dapat mengontrol distributor namun kegiatan distribusi tetap dilakukan oleh distributor. Biasanya distribusi ini digunakan untuk mendistribusikan barang-barang yang mahal dan mewah.

6.2.3. Kegiatan Ekonomi Konsumsi

Kegiatan ekonomi yang mencakup konsumsi produk atau jasa dari produsen atau pemasok untuk memenuhi kebutuhan dasar. Orang-orang yang terlibat dalam perilaku ini disebut konsumen. Jika keinginan konsumen terpuaskan, pelanggan dapat melakukan kegiatan ekonomi lainnya yang akan merangsang perekonomian bangsa.

Contoh kegiatan ekonomi konsumsi adalah membeli ayam, sayur, beras, baju lebaran, peralatan dapur, cek kesehatan ke dokter, dan sebagainya. Kegiatan konsumsi dapat dikenali dengan beberapa perilaku di bawah ini:

- 1) Dilakukan secara langsung (bukan untuk dijual dan didistribusikan lagi) untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen.
- 2) Nilai barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi akan habis juga, baik cepat atau lambat.
- 3) Barang atau jasa yang dibeli memberikan nilai tambah atau manfaat kepada konsumen.

Konsumen membeli barang atau jasa yang mereka manfaatkan melalui pembelian dan penjualannya. Kegiatan perekonomian negara

mendapat manfaat besar dari kegiatan yang berhubungan dengan konsumsi. Kegiatan konsumsi dapat berfungsi sebagai penunjang kegiatan produksi, sebagai titik awal dan titik akhir kegiatan perekonomian, sebagai sarana pengentasan kemiskinan suatu negara, dan sebagai sarana penyesuaian tingkat upah minimum bagi pekerja.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat konsumsi seseorang, yaitu pendapatan, harga, kebiasaan, selera, dan barang pengganti.

a. Pendapatan

Pendapatan adalah produk akhir dari tenaga kerja yang dimasukkan melalui pekerjaan atau tugas yang diselesaikan. Pendapatan tersebut bisa berasal dari gaji (dari karyawan), sewa (dari toko atau rumah yang disewakan), atau keuntungan (dari usaha yang menguntungkan). Jika dilihat dari bentuknya, terlihat bahwa pendapatan setiap orang berbeda-beda, artinya kebiasaan konsumsi setiap orang juga unik. Misalnya, kebutuhan seorang pengusaha akan berbeda dengan kebutuhan seorang karyawan.

b. Harga

Faktor harga kini seringkali mempunyai dampak signifikan terhadap perilaku konsumsi. Faktanya, beberapa konsumen merasa bahwa mereka harus mempertimbangkan harga saat melakukan pembelian. Selain itu, target pasar produksi suatu produk atau jasa mungkin ditentukan oleh faktor harga. Permintaan konsumen dapat menurun akibat kenaikan harga suatu barang atau jasa. Sementara itu, suatu produk atau jasa yang mengalami penurunan harga mungkin akan mengalami peningkatan permintaan konsumen. Misalnya, ketika harga kedelai meningkat, harga tahu dan tempe juga akan ikut naik, namun lebih sedikit orang yang membeli tahu dan tempe. Akibatnya, konsumsi akan meningkat seiring dengan turunnya harga produksi. Sementara itu, konsumsi perlu dikurangi ketika harga naik.

c. Kebiasaan

Gaya hidup, lingkungan, dan kebutuhan sehari-hari seseorang hanyalah beberapa dari sekian banyak variabel yang mungkin memengaruhi cara hidupnya. Dapat dikatakan bahwa pilihan gaya hidup ini mempengaruhi tingkat konsumsi yang berbeda. Misalnya saja pilihan gaya hidup hemat dan boros. Seseorang dengan pilihan gaya hidup boros akan meningkatkan konsumsinya. Sedangkan seseorang dengan kecenderungan hemat cenderung memiliki tingkat konsumsi yang stabil atau bahkan berkurang.

d. Selera

Selera individu satu dengan individu lainnya berbeda-beda. Selera yang berbeda-beda ini biasanya diakibatkan karena faktor psikologis seseorang yang bisa berubah kapan saja. Selera yang dimiliki oleh setiap orang akan memengaruhi tingkat konsumsi. Misalnya seseorang yang memiliki hobi membaca buku akan selalu berusaha untuk mencari buku-buku baru yang menarik.

e. Barang Pengganti

Sudah menjadi rahasia umum jika seseorang akan beralih ke barang yang lebih murah jika harga suatu barang naik. Hal seperti ini terjadi karena perilaku konsumen dipengaruhi oleh pendapatan. Tingkat konsumsi suatu produk akan dipengaruhi oleh tersedianya barang substitusi. Dengan kata lain, konsumsi barang substitusi menurun seiring dengan semakin banyaknya orang yang menggunakannya.

6.3. Tujuan Kegiatan Ekonomi

Tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan tersebut digunakan untuk saat ini dan masa datang. Tujuan-tujuan lain kegiatan ekonomi, yakni:

1. Untuk mendapatkan uang, keuntungan, dan kekayaan.

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masa depan, kita memerlukan kekuatan finansial yang sehat. Melakukan kegiatan ekonomi merupakan salah satu upaya agar kita mendapatkan

penghasilan, keuntungan, dan kekayaan sehingga finansial kita sehat.

2. Pemanfaatan sumber daya.

Sumber daya yang tersedia dapat digunakan agar dapat memiliki nilai manfaat. Sumber daya dapat berupa tanah, kendaraan, sumber daya alam, modal, hasil pertanian, dan sebagainya.

3. Mengikat secara hukum.

Disebut kegiatan ekonomi jika dan hanya jika aktivitas yang dilakukan sah di mata hukum. Tindakan-tindakan yang menghasilkan uang dan kekayaan dengan cara perampokan, pencurian, korupsi, penyelundupan, penyuapan, dan sejenisnya tidak bisa disebut sebagai kegiatan ekonomi karena melawan hukum.

4. Dapat diterima secara sosial

Kegiatan ekonomi yang akan berjalan lancar adalah kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Jika tidak sesuai, masyarakat sekitar akan menolak berlangsungnya kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

6.4. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu upaya meningkatkan kapasitas produksi agar dapat menghasilkan output yang lebih besar. Peningkatan output per kapita dalam jangka panjang dicapai melalui ekspansi ekonomi. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan gambaran perekonomian yang terjadi secara instan. Di sini, kita mengkaji sisi dinamis suatu perekonomian, atau bagaimana perekonomian berkembang atau bertransformasi seiring berjalannya waktu. Fokusnya adalah pada perubahan atau kemajuan yang sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi, menurut Prof. Simon Kuznets, adalah peningkatan kapasitas

jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai manfaat ekonomi bagi penduduknya. Kemajuan atau modifikasi telah memungkinkan kemampuan ini meningkat.

Perkembangan ekonomi mencakup perubahan ekonomi masyarakat secara komprehensif. Pembangunan ekonomi menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi merupakan progress yang terjadi terus menerus, usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala. Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal. Dalam hal ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi Ketiganya adalah:

- a) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- c) Kemajuan teknologi Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability).

Indikator Pertumbuhan Ekonomi wilayah Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakseimbangan Pendapatan Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.
- b. Perubahan Struktur Perekonomian Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.
- c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis financial

Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi 20 yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

- d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya)
- e. Produk Domestik Regional Bruto Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang

mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

6.5. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam pemulihan perekonomian

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini direalisasikan bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat karena keduanya berperan strategis menjalankan kebijakan dengan lancar bertujuan memulihkan perekonomian Indonesia.

Kebijakan fiskal mempunyai 3 (tiga) stimulus sebagai pergerakan perubahan, yaitu:

1. Percepatan belanja Pemerintah

Pemerintah telah mempercepat transfer dana daerah dan daerah, pencairan belanja modal, rekrutmen pejabat keuangan negara, pelaksanaan tender, dan pencairan belanja bantuan sosial. Tujuan dari percepatan ini adalah untuk memperkuat reformasi agar keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, mengatasi permasalahan yang muncul pasca pandemi, dan mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru secara bertahap.

2. Relaksasi pajak penghasilan

Dengan menghapuskan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21, membebaskan pajak penghasilan impor berdasarkan Pasal 22, menurunkan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 25, dan mempercepat pengembalian PPN, pemerintah meminimalkan besaran pajak. Seiring dengan penurunan pajak penghasilan, pemerintah juga mempercepat dan menyederhanakan prosedur ekspor-impor. Mempercepat impor dan ekspor bagi pedagang besar, menyederhanakan pendanaan untuk mengurangi hambatan impor dan ekspor (manufaktur, pangan, dan bantuan medis), serta layanan ekspor-impor melalui jaringan logistik

nasional.

3. Pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan Keuangan Negara melalui relaksasi APBN.

Untuk kembali ke defisit maksimal 3% pada tahun 2023, APBN telah dilonggarkan dengan memperhitungkan defisit yang mungkin lebih tinggi dari 3%. Selain belanja yang diwajibkan, pelonggaran ini juga akan berlaku pada cara dana didistribusikan antar organisasi, fungsi, dan program. Relaksasi atau realokasi alokasi belanja pemerintah daerah, pemberian pinjaman kepada LPS, dan penerbitan SUN dan SBSN untuk dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor korporasi, dan/atau investor ritel. Pemanfaatan SAL, uang abadi pendidikan, dan dana yang diawasi Badan Layanan Umum merupakan contoh sumber anggaran alternatif.

Kebijakan moneter yang dilakukan Pemerintah yaitu bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) agar ikut serta mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial akodomatif bertujuan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah melaksanakan kebijakan moneter sebagai berikut: melanjutkan kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akodomatif, memperkuat kebijakan tranparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan penekanan pada kenaikan suku bunga kredit baru, memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit 1 persen dari outstanding, mempercepat program pendalaman pasar uang melalui penguatan kerangka peraturan pasar uang dan implementasi Electronic Trading Platform (ETP) Multimatching khususnya pasar uang Rupiah dan valas, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi dan melanjutkan sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Afriansyah et al. 2022. Eureka Media Aksara *Studi Kelayakan Rencana Bisnis*. ed. Suwandi Suwandi. Eureka Media Aksara.
- Atkinson, Anthony B and Joseph E. Stiglitz (1980). *Lectures on Public Economics*. New York: McGraw-Hill
- Atmaja, Yustisiana Susila, and Darminto Hartono Paulus. 2022. "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51(3).
- Farmer, R. (2002). *Macroeconomics*, 2nd Edition. South-Western: Thomson Learning.
- Islam, S. 2020. *For Ensuring Rapid-Growth Risk-Free Digital-Banking in Greek-Economy: An Application of Akim's Model*. papers.ssrn.com. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3940760.
- Kementerian Keuangan. 2021. "Kerangka-Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 287.
- Mankiw, N. Gregory, (2005). *Macroeconomics*, 6 th Edition, New York: Worth Publishers

PROFIL PENULIS



Nanda Harry Mardika, S.Pd., M.M.
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Putera Batam

Penulis lahir di Painan tanggal 17 Agustus 1989, merupakan seorang dosen dan praktisi dibidang kajian dan penelitian. Telah berkarir dibidang pengajaran selama 7 tahun. Penulis juga aktif diberbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup internal universitas dan nasional diantaranya dibuktikan dengan memenangi hibah penelitian dikti tahun 2018 dan 2020 ditingkat nasional.

PENGANGGURAN, INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Oleh

Dr. Dedi Herdiansyah

7.1. Pendahuluan

Kesuksesan Pemerintah suatu negara dalam mengelola perekonomian negaranya dapat dilihat atau dapat diukur dari berbagai indikator. Berbagai indikator ekonomi makro tersebut diantaranya adalah Inflasi, Pengangguran, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa dan beberapa indikator lainnya. Tulisan dalam Bab ini akan berfokus pada uraian mengenai indikator Pengangguran dan Inflasi, serta akan dilengkapi uraian mengenai berbagai alternatif Kebijakan Pemerintah dalam mengantisipasi kedua indikator ekonomi makro tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Indikator didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Dalam hal ini terkait uraian dalam Bab 8 ini, maka indikator Pengangguran dan Inflasi merupakan petunjuk/keterangan mengenai apakah kondisi perekonomian suatu negara itu sedang baik atau sedang tidak baik-baik saja.

Menurut (Wijaya, 2000), dalam mengatasi indikator-indikator ekonomi makro, termasuk didalamnya permasalahan ekonomi yaitu pengangguran dan inflasi, Pemerintah dapat mengatasinya dengan menggunakan 4 (empat) piranti kebijakan, yaitu: 1). Kebijakan Fiskal, 2). Kebijakan Moneter, 3). Kebijakan Penetapan Harga (terutama 9 bahan pokok, barang-barang strategis seperti semen dan pupuk, tarif listrik dan angkutan umum, dan harga beberapa jenis BBM, dan 4). Kebijakan dalam hal Hubungan Ekonomi Internasional.

7.2. Definisi Pengangguran dan Determinan yang Mempengaruhinya

Pengangguran merupakan masalah yang sering terjadi pada

berbagai negara, yang jika tidak mampu diatasi atau ditekan akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. Pengangguran juga bisa menjadi indikator terjadinya inefisiensi dalam pemanfaatan faktor produksi, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu ukuran dalam menilai kinerja pemerintah (Oktafianto, E.K., Achسانی, N.A., dan Irawan, 2019).

Menurut (Siregar, S.M., Findi, M., dan Rindayanti, 2023), Pengangguran dapat disebabkan oleh kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat, pengembangan sektor non-riil, pendidikan rendah dan kurang keterampilan, terbatasnya kesempatan kerja yang lebih kecil dibanding jumlah pencari kerja, dan persaingan antar pencari kerja tidak sebanding dengan pasar tenaga kerja.

Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, pada satu sisi memiliki keunggulan komparatif karena memiliki sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang melimpah, terutama dalam sumber daya manusia, namun jika salah kelola, ini yang kemudian akan menjadi beban bagi negara. Berdasarkan data dalam (Badan Pusat Statistik, 2023) disebutkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebanyak 8.425.931 orang, dari jumlah penduduk sebanyak 275.773.800 orang. Dari 8 jutaan jumlah pengangguran jika dikelompokkan berdasarkan tingkat Pendidikan, maka pengangguran yang berada pada kelompok pendidikan dasar sampai menengah yaitu sebanyak 7.592.956, dengan jumlah pengangguran terbesar berada di Pendidikan menengah atas (SMU) yaitu sebesar 4.139.665 orang. Sedangkan pengangguran yang berada pada kelompok Pendidikan Tinggi yaitu hanya sebesar 832.975. ini memiliki implikasi bahwa pemerintah perlu mendorong penduduknya untuk memiliki Pendidikan minimal sarjana agar mereka dapat terserap lebih mudah di pasar kerja. Namun ini perlu diimbangi juga dengan tersedianya Pendidikan tinggi dengan biaya yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berikut beberapa definisi Pengangguran menurut beberapa ahli:

1) Pengangguran adalah sejumlah pekerja yang jumlah jam bekerjanya

kurang dari jam kerja normal, dan bersedia menerima pekerjaan lain (Pratomo, 2015).

- 2) Pengangguran adalah ketika seseorang atau individu sedang berusaha mencari informasi tentang lowongan pekerjaan dan sedang intens berusaha untuk mendapatkan pekerjaan sesuai keinginan mereka (van Hooft, E. A. J. Wanberg, C. R. dan van Hoyer, 2012)
- 3) Pengangguran adalah kelompok penduduk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, dan juga merupakan penduduk yang tidak sedang mencari pekerjaan karena merasa tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan, dan pengangguran juga adalah kelompok penduduk yang memang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Badan Pusat Statistik, 2023).

Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli dan BPS tersebut maka penulis menyimpulkan pengangguran sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), namun belum pernah mendapatkan pekerjaan atau sudah pernah bekerja namun berhenti/diberhentikan sehingga tidak memiliki pendapatan lagi. Dan mereka juga pada kelompok usia tersebut, bukan penduduk yang bersekolah/kuliah atau mengurus rumah tangga.

Berikutnya dalam Tabel 8.1. penulis akan menyajikan Determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Pengangguran.

Tabel 8.1.
Determinan Pengangguran

Sumber	Determinan	Hasil Penelitian
(Nisa, V.A. dan Sugiharti, 2023)	Kesempatan kerja, Gross Domestic Bruto (GDP) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).	Kesempatan kerja pada jangka panjang dan pendek berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia pada periode tahun 1990-2019.
(Agustina, M. Astuti,	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi,	IPM, Inflasi, Upah Minimum dan Jumlah

H. dan Susilo, 2023)	Upah Minimum dan Jumlah Pekerja.	Pekerja berpengaruh pada Tingkat Pengangguran.
(Shabbir, A., Kousar, S. dan Alam, 2019)	Jumlah penduduk yang tinggi, kesempatan kerja yang terbatas tidak proporsional dengan jumlah pencari kerja, Pendapatan per kapita rendah, dan Dampak perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah penduduk yang tinggi, Kesempatan kerja yang terbatas tidak proporsional dengan jumlah pencari kerja, Pendapatan per kapita rendah, dan Dampak perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap Pengangguran.
(Oktafianto, E.K., Achسانی, N.A., dan Irawan, 2019)	Tingkat partisipasi angkatan kerja (LFPR), Rasio antara penduduk usia muda antara 15-24 dengan penduduk usia kerja antara 15-64 (YOUNG), Jumlah pekerja yang bekerja di sektor manufaktur (SEK1), yang bekerja di sektor jasa (SEK2), Jumlah penduduk dengan pendidikan tinggi (EDU1), jumlah penduduk dengan pendidikan dasar dan menengah (EDU2).	Faktor yang berpengaruh positif terhadap pengangguran adalah YOUNG, SEK2 dan EDU2. Sedangkan Faktor yang berpengaruh negatif adalah LFPR, SEK1 dan EDU1.
(Pratomo, 2015)	Demografi (jenis kelamin, latar belakang Pendidikan, bidang pekerjaan dan usia) dan Ekonomi (upah minimum provinsi, produk domestik bruto dan Angka	Demografi dan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia.

	pengangguran)	
--	---------------	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2023.

Faktor-faktor tersebut diantaranya: Kesempatan kerja, IPM, Inflasi, Upah minimum, Dampak perkembangan IT, Tingkat Pendidikan, dan lain-lain.

7.3. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran

Tabel 8.2. berikut akan menunjukkan beberapa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pengangguran.

Tabel 8.2.
Berbagai Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran

No.	Sumber	Kebijakan Pemerintah
1.	(Oktafianto, E.K., Achsan, N.A., dan Irawan, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah perlu mendorong investasi masuk untuk penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor manufaktur. • Pemerintah memudahkan akses penduduk untuk melanjutkan ke Pendidikan Tinggi.
2.	(Nisa, V.A. dan Sugiharti, 2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah perlu meningkatkan pengeluaran belanja untuk biaya pada bidang pendidikan agar angka partisipasi sekolah/kuliah dapat meningkat. • Pemerintah perlu mengencangkan program kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) agar menambah lapangan pekerjaan dan menyediakan dukungan pendanaan modal awal untuk memulai usaha/bisnis.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber, 2023

Berdasarkan Tabel 8.2. tersebut, maka untuk dapat mengatasi pengangguran, beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong investasi masuk sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru, menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya terjangkau, dan mengencangkan program

kewirausahaan sejak di bangku sekolah/kuliah.

7.4. Definisi Inflasi dan Determinan yang Mempengaruhinya

Inflasi secara umum menggambarkan kondisi kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok, dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, yang dapat berdampak tekanan pada kemampuan daya beli masyarakat, bahkan jika dibiarkan dan terus berlangsung dalam jangka yang lebih panjang bisa berdampak pada krisis ekonomi suatu negara. Sehingga kenaikan harga yang berlangsung jangka pendek, seperti hari raya, hari besar, dan beberapa momen penting lain tidak dapat dikatakan sebagai inflasi.

Di sisi lain, jika dapat dikendalikan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia, maka inflasi dapat berdampak penting terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga dapat bersaing dengan negara lain (Setiartiti, L. dan Hapsari, 2019). Pengendalian laju inflasi akan dapat dilakukan dengan 2 mekanisme kebijakan yaitu kebijakan moneter, melalui otoritas yaitu Bank Sentral dan kebijakan fiskal melalui otoritas yang dimiliki pemerintah (Al Makhrus, M.N. dan Priyadi, 2022).

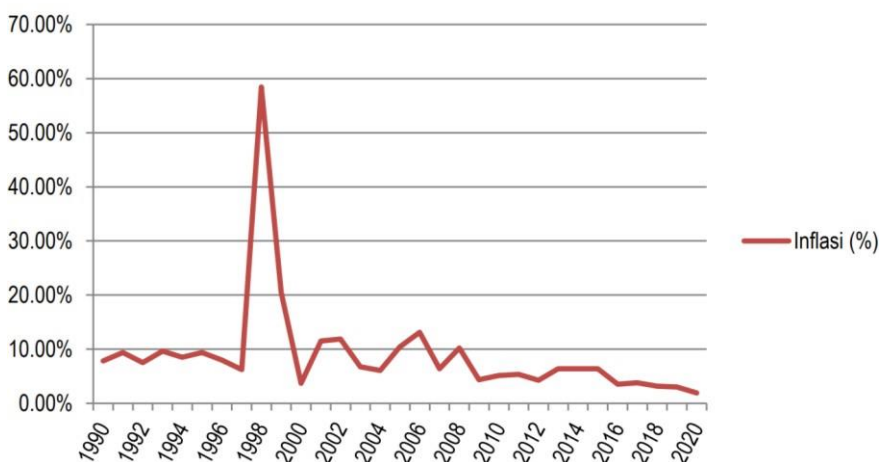
Berikut beberapa definisi Inflasi menurut beberapa ahli:

- 1) Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga suatu atau beberapa komoditas, atau menurunnya nilai mata uang terhadap nilai komoditas atau barang dan jasa (Al Makhrus, M.N. dan Priyadi, 2022).
- 2) Inflasi diartikan sebagai terjadinya kenaikan harga secara umum dalam ekonomi suatu negara, dalam waktu yang panjang (Nadiah dan Rosyidi, 2018).
- 3) Inflasi juga diartikan sebagai suatu kondisi dalam ekonomi suatu negara ketika terjadi penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik uang kartal maupun giral., dan juga terjadinya kenaikan harga (Atmadja, 1999).

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli tersebut, maka penulis menyimpulkan inflasi sebagai kondisi dalam satu perekonomian negara dimana terjadi fenomena kenaikan harga dalam jangka waktu panjang,

yang berdampak pada tekanan terhadap daya beli masyarakat. Namun penulis juga berpendapat inflasi yang terkendali dibutuhkan agar terjadi pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan.

Pada Gambar 8.1. berikut penulis akan sajikan gambaran mengenai inflasi di Indonesia pada periode tahun 1990 sampai dengan 2020. Garis horisontal mewakili periode tahun, dan garis vertikal mewakili tingkat inflasi yang terjadi.



Gambar 8.1. Posisi Inflasi di Indonesia Periode 1990 sd 2020

Sumber: Al Makhrus, dan Priyadi (2022)

Pada Gambar 8.1 tersebut dapat kita lihat bahwa rata-rata berada dibawah angka 10%, dan itu termasuk dalam jenis inflasi ringan atau *single digit* (Atmadja, 1999). Kalaupun terjadi lonjakan luar biasa pada inflasi di tahun 1998 itu dikarenakan terjadinya Gerakan Reformasi yang menimbulkan berbagai kerusuhan diberbagai tempat terutama di Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, yang kemudian kembali normal sekitar tahun 2000. Berikutnya pada Tabel 8.3. di bawah ini penulis akan menunjukkan beberapa hasil penelitian yang

mengungkapkan beberapa faktor penyebab terjadinya inflasi di Indonesia.

Tabel 8.3.
Determinan Inflasi

Sumber	Determinan	Hasil Penelitian
(Al Makhrus, M.N. dan Priyadi, 2022)	Suku bunga, GDP, Harga minyak dunia, kurs, dan Inflasi.	Suku bunga, GDP, dan Harga minyak dunia berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi.
(Nadiyah dan Rosyidi, 2018)	Pasar uang antar Bank Syariah (PUAS), Pembiayaan syariah, Jumlah uang beredar (JUB)	PUAS, Pembiayaan Syariah dan JUB berpengaruh terhadap tingkat inflasi.
(Atmadja, 1999)	Jumlah uang beredar, Defisit APBN, dan Faktor-faktor dalam Penawaran Agregat dan Luar Negeri	Kenaikkan jumlah uang beredar pada umumnya lebih disebabkan oleh pertumbuhan kredit likuiditas dan defisit anggaran belanja pemerintah.
(Leo, Y.D.S., Astuti, R.D., dan Suharsih, 2018)	Tingkat bunga, Nilai tukar dan Jumlah uang beredar	Tingkat bunga, Nilai tukar dan Jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat inflasi.
(Setiartiti, L. dan Hapsari, 2019)	Jumlah uang beredar, Nilai tukar, Tingkat bunga, dan Produk domestik bruto (GDP).	Jumlah uang beredar dalam jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, namun tidak dalam jangka panjang. Nilai tukar, Tingkat bunga dan GDP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

		inflasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
--	--	--

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber, 2023

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan inflasi diantaranya adalah: Tingkat suku bunga, GDP, Harga minyak dunia, kurs nilai tukar dan Jumlah uang beredar

7.5. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi

Beberapa kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi, yang bersumber dari beberapa artikel di berbagai jurnal ilmiah, akan penulis sajikan pada Tabel 8.4. di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 8.4.
Berbagai Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi

No.	Sumber	Kebijakan Pemerintah
1.	(Al Makhrus, M.N. dan Priyadi, 2022)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank Indonesia dan Pemerintah dengan berhati-hati menentukan kebijakan moneter melalui mekanisme tingkat bunga dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah; ▪ Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang efektif untuk dapat menciptakan stabilitas harga BBM dalam negeri, agar ketika terjadi kenaikan harga minyak dunia, harga BBM di dalam negeri tidak mengikuti kenaikan harga yang signifikan dari pengaruh luar sehingga memberatkan masyarakat; dan ▪ Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi APBN untuk mendorong produktivitas, dalam rangka meningkatkan GDP.
2.	(Nadiyah dan Rosyidi, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah hendaknya melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap JUB; dan ▪ Pengawasan ketat terhadap kriminalitas dari sisi moneter seperti pemalsuan uang,

		dan penggandaan uang, yang dapat berdampak pada Jumlah Uang Beredar.
3.	(Atmadja, 1999)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berusaha mengurangi defisit APBN; ▪ Peningkatan cadangan devisa; ▪ Pembenahan sektor pertanian khususnya pada sub sektor pangan; ▪ Pembenahan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi posisi penawaran agregat; dan ▪ Pembenahan di sektor moneter.
4.	(Setiartiti, L. dan Hapsari, 2019)	Pemerintah mengalokasi dana subsidi pada BBM, tarif listrik, dan tarif angkutan.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber, 2023

Tabel 8.4 Menunjukkan beberapa hasil penelitian yang mengungkapkan beberapa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah inflasi, diantaranya adalah: melalui pengendalian/penetapan suku bunga, mendorong produktivitas dalam meningkatkan GDP, pengawasan yang ketat pada Jumlah uang yang beredar, peningkatan cadangan devisa, serta alokasi dana subsidi untuk BBM, tarif listrik dan tarif angkutan.

7.6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sajikan dalam Bab ini, dapat kita ambil beberapa kesimpulan yaitu:

- 4) Baik Pengangguran maupun Inflasi merupakan dua permasalahan Ekonomi Makro yang mesti dapat diatasi oleh Pemerintah. Karena kedua indikator tersebut akan menunjukkan kinerja pemerintah dalam mengelola negara;
- 5) Kedua indikator tersebut dapat menunjukkan atau pertanda apakah perekonomian suatu negara sedang baik atau sedang tidak baik-baik saja. Dan pengendalian terhadap dua indikator tersebut,

akan menunjukkan apakah pemerintah memihak pada kepentingan rakyat, sebagai pemberi amanat pengelolaan negara.

- 6) Keberadaan Pemerintah dalam mengatasi kedua indikator tersebut dapat dilakukan melalui 4 Kebijakan, yaitu: Kebijakan Fiskal, Moneter, Penetapan Harga dan Hubungan Ekonomi Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. Astuti, H. dan Susilo, J. . (2023). Unemployment in Indonesia: An Analysis of Economic Determinants from 2012-2021. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 12(1), 69–82.
- Al Makhrus, M.N. dan Priyadi, U. (2022). Determinan faktor-faktor inflasi di Indonesia tahun 1990-2020. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 101–110.
- Atmadja, A. . (1999). Inflasi di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 54–67.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Penerbit Badan Pusat Statistik Indonesia.
- KBBI. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.lektur.id/karakter>.
- Leo, Y.D.S., Astuti, R.D., dan Suharsih, S. (2018). The Determinant of Inflation Rate in Indonesia: Partial Adjustment Model Approach. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(2), 157–166.
- Nadiah dan Rosyidi, S. (2018). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(10), 816–830.
- Nisa, V.A. dan Sugiharti, R. (2023). Determinan Pengangguran di Indonesia: Pendekatan Model Dinamis. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 6(1), 23–37.
- Oktafianto, E.K., Achسانی, N.A., dan Irawan, T. (2019). The Determinant of Regional Unemployment in Indonesia: The Spatial Durbin Models.

Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 8(2), 179–194.

- Pratomo, D. . (2015). The Analysis of Underemployment in Indonesia: Determinants and Its Implication. Prosiding 2nd Global Conference on Business and Social Science (GCBSS), 528-532,. In *Prosiding 2nd Global Conference on Business and Social Science (GCBSS)* (pp. 528–532).
- Setiartiti, L. dan Hapsari, Y. (2019). The Determinant of Inflations Rate in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 20(1), 112–123.
- Shabbir, A., Kousar, S. dan Alam, M. Z. (2019). Factors Affecting Level of Unemployment in South Asia. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 37(1), 1–25.
- Siregar, S.M., Findi, M., dan Rindayanti, W. (2023). The Impact of Fiscal Policy on Unemployment in Indonesia. *International Journal of Scientific Research & Engineering Trends*, 9(2), 226–232.
- van Hooft, E. A. J. Wanberg, C. R. dan van Hoyer, G. (2012). Moving Beyond Job Search Quantity: Towards a Conceptualization and Self-regulatory Framework of Job Search Quality. *Organizational Psychology Review*, 3(1), 3–40.
- Wijaya, M. F. (2000). *Ekonomika Makro: Seri Pengantar Ekonomika* (Edisi 3, C). Penerbit PBFY Yogyakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Dedi Herdiansyah
Dosen Jurusan Administrasi Bisnis
Politeknik Negeri Pontianak

Penulis lahir di Singkawang (Kalimantan Barat) pada tanggal 9 Oktober 1975. Staf Pengajar (Dosen) yang ber homebase pada Program Studi DIV Administrasi Bisnis Otomotif, Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak. Mata kuliah yang rutin diampu adalah Kewirausahaan, Pelayanan Prima dan Pelayanan Publik. Sarjana (S1) pada tahun 1998 di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2001 mendapatkan gelar Magister Sains (S2) di Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tahun 2012 mendapatkan gelar Doktor (S3) pada Program Doktor Ilmu Manajemen (PDIM) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Karir manajerial yang pernah dijalani yaitu: sebagai Sekretaris Laboratorium periode Tahun 2003 sd 2004, sebagai Ketua Program Studi D3 Administrasi Bisnis periode Tahun 2004 sd 2007, dan sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis periode Tahun 2007 sd 2009. Dan selanjutnya pernah sebagai Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Polnep pada periode Tahun 2015-2019.

PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN GLOBALISASI

Oleh

Sriwanti Belani, SE,. MM)

8.1. Pendahuluan

Globalisasi adalah suatu proses kegiatan di berbagai sektor, dimana negara - negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang semakin terintegrasi, tidak dibatasi oleh batas - batas wilayah suatu negara. Memasuki era globalisasi berdampak pada semua aspek kehidupan, baik dalam ranah sosial, budaya, teknologi dan politik, maupun pada ranah terpenting. Globalisasi dapat dirasakan dalam bidang ekonomi, dimana efeknya bisa positif atau negatif. Pada era globalisasi saat ini, setiap negara melakukan perdagangan internasional, hal ini dikarenakan setiap negara belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek terpenting dalam perekonomian suatu negara. Adanya perdagangan internasional menjadikan perekonomian tiap negara saling terjalin serta tercipta hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Salah satu keuntungan perdagangan internasional adalah memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa secara murah, baik dari segi bahan maupun cara memproduksi. Selain itu, terdapat manfaat nyata dari perdagangan internasional yakni berupa kenaikan pendapatan, cadangan devisa, transfer modal, dan bertambahnya kesempatan kerja. Dalam bidang ekonomi, pameran internasional menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, hal ini dapat diamati dalam berbagai kegiatan dunia usaha, misalnya pertukaran produk atau barang tertentu yang tidak memiliki batas antar negara, kemajuan teknologi sebagai

media untuk memperlancar perdagangan internasional, dimana dunia dipandang sebagai satu kesatuan dimana semua wilayah dapat diakses dengan mudah dan cepat. Sisi perdangan dan inventaris memberikan keleluasaan bagi siapa saja untuk berbisnis dimana dan kapan saja mereka mau, apalagi terbantu dengan Era Perdagangan Bebas.

Dengan mengetahui dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional, baik negara berkembang maupun negara maju, bahkan negara adidaya, dapat meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap perdagangan internasional, yang tentunya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara dimana perkembangan globalisasi sebenarnya tidak mudah diterima oleh negara-negara berkembang, karena globalisasi negara-negara berkembang membutuhkan proses yang penuh karakteristik yang berkaitan dengan kebutuhan negara - negara berkembang. Oleh karena itu, dalam perdagangan internasional dianggap penting untuk memahami dampak globalisasi dan factor - faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.

8.2. Definisi Perdagangan Internasional

Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran pada satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik ekuilibrium. Sedangkan internasional berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu. Maka, perdagangan internasional dapat diartikan, sejumlah transaksi perdagangan/jual beli di antara pembeli dan penjual (yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor) pada suatu pasar, demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Beberapa ratus tahun yang lalu, aliran Merkantilis mengira bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi untung - rugi atau win-lose deal.

Menurut aliran ini, ekspor adalah sesuatu yang menguntungkan (win) sedangkan impor adalah sebuah hal yang merugikan (lose) sehingga negara harus mengejar ekspor dan menghindari impor. Namun, sejak permulaan abad ke-19, para ekonom pasar berpendapat sebaliknya.

Secara umum, kegiatan perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor merupakan kebalikan dari ekspor yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri. Melakukan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang cukup penting di setiap negara. Tiada satu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan luar negeri. Walau bagaimana pun kepentingan sektor luar negeri dalam suatu perekonomian dari satu negara ke negara lain. Di sebagian negara, ekspor dan impor meliputi bagian yang cukup besar dalam pendapatan nasional, sedangkan di beberapa negara lain ia merupakan bagian yang kecil saja dari pendapatan nasional. Ada beberapa keuntungan melakukan perdagangan, diantaranya sebagai berikut :

8.3. Memperoleh Barang yang Tidak Dapat Diproduksi di dalam Negeri

Mengapakah berbagai negara melakukan perdagangan antara satu sama lain? Alasannya yang paling nyata adalah karena setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang-barang yang dibuthkannya. Misalnya, negara-negara maju memerlukan karet alam tetapi barang tersebut tidak dapat dihasilkan di negara-negara mereka. Maka mereka terpaksa mengimpor barang-barang tersebut dari negara-negara di Asia Tenggara, terutama dari Indonesia, Thailand dan Malaysia. Sebaliknya pula negara-negara di Asia Tenggara belum dapat memproduksi sendiri beberapa hasil industry modern seperti kapal terbang, kapal pengangkut, minyak dan mesin-mesin industry. Maka Negara-negara itu harus mengimpor barang - barang dari Negara maju.

8.4. Memperoleh Keuntungan dari Spesialisasi

Sebab yang utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi.

Walaupun sesuatu Negara dapat memproduksi sesuatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh Negara lain, tetapi ada kalanya adalah lebih baik apabila Negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Jepang mempunyai kemampuan memproduksi kain. Tetapi Jepang dapat memproduksikannya dengan lebih efisien dari Amerika Serikat. Dalam keadaan seperti ini, *untuk mempertinggi keefisienan penggunaan factor-faktor produksi*, Amerika Serikat perlu mengurangi produksi kainnya dan mengimpor barang tersebut dari Jepang. Sebaliknya pula terdapat barang-barang di mana Amerika Serikat adalah lebih efisien dari Jepang di dalam memproduksinya. Kedua Negara ini dapat memproduksi kapal terbang dan gandum, dan misalkan Amerika Serikat adalah lebih efisien dalam memproduksi barang-barang tersebut. Dalam kasus adalah lebih baik untuk Jepang untuk mengimpor kapal terbang dan gandum dari Amerika Serikat.

Dengan mengadakan spesialisasi dan perdagangan, setiap Negara dapat memperoleh keuntungan yang berikut :

- i. Factor - faktor produksi yang dimiliki setiap Negara dapat digunakan dengan lebih efisien.
- ii. Setiap Negara dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksi di dalam negeri.

8.5. Memperluas Pasar Industri-Industri dalam Negeri

Beberapa jenis industri telah dapat memenuhi permintaan dalam negeri sebelum mesin-mesin (alat-alat produksi) sepenuhnya digunakan. Ini berarti bahwa industri itu masih dapat menaikkan produksi dan meningkatkan keuntungannya apabila masih terdapat pasar untuk barang-barang yang dihasilkan oleh industri itu. Karena seluruh permintaan dari dalam negeri telah dipenuhi. Satu-satunya cara untuk memperoleh pasaran adalah dengan mengekspornya ke luar negeri.

8.6. Menggunakan Teknologi Modern dan Meningkatkan Produktivitas

Selanjutnya perdagangan luar negeri memungkinkan sesuatu Negara untuk mempelajari tehnik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Perdagangan luar negeri yang mungkinkan Negara tersebut mengimpor mesin-mesin, atau alat-alat yang lebih modern untuk melaksanakan tehnik produksi dan cara produksi yang lebih baik. Alat - alat kantor yang lebih baik seperti computer juga dapat menaikkan taraf keefisienan manajemen. Dengan mengimpor teknologi yang lebih modern Negara tersebut dapat menaikkan produktivitasnya, dan ini akan mempercepat pertambahan produksi.

8.7. Teori Perdagangan Internasional

Menurut Amir M.S, bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.

8.8. Model Adam Smith

Model Adam Smith ini memfokuskan pada keuntungan mutlak yang menyatakan bahwa seluruh negara akan memperoleh keuntungan mutlak apabila semuanya memberlakukan perdagangan bebas dan berfokus pada produk atau keahlian mereka, karena impor suatu negara adalah ekspor untuk negara lain. Menurutnya, apabila suatu negara mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain, hal ini merupakan keuntungan mutlak negara tersebut. Menurut teori ini jika harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional.

8.9. Model Ricardia

David Ricardo menjelaskan mengapa negara yang bahkan mampu memproduksi seluruh produk dengan efisien tetap harus terlibat dalam perdagangan internasional. Dalam modelnya, ia menjelaskan bahwa ketika terdapat beberapa negara mampu memproduksi beberapa komoditi yang sama terlibat dalam perdagangan bebas, mereka akan meningkatkan konsumsinya dengan mengekspor apa yang secara komparatif lebih menguntungkan dan mengimpor sesuatu yang lebih murah dari biaya produksi di negeri sendiri. Hal ini dianggap lebih menguntungkan dibandingkan keputusan suatu negara untuk memproduksi sendiri barang dan mengisolasi negaranya. Apabila terdapat dua negara yang memproduksi satu komoditi yang sama, negara yang mampu mengekspor dengan harga lebih murah akan memiliki keuntungan relatif dibandingkan negara lainnya. Model Ricardian selanjutnya dimodelkan secara matematis oleh William Whewell pada tahun 1833. Dalam penelitiannya, ia meragukan teori distribusi Ricardo mampu didukung oleh bukti empiris. Model Ricardian dan Model Smith selanjutnya banyak dibandingkan dalam pembelajaran ekonomi untuk memahami perdagangan internasional.

8.10. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perdagangan Internasional (Trade Between Countries)

Ada banyak faktor yang mendorong setiap negara untuk melakukan perdagangan internasional, diantaranya sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
2. Ingin mendapatkan keuntungan dan meningkatkan pendapatan pemerintah
3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek dalam mengolah sumber daya ekonomi.
4. Adanya keunggulan produk dalam negeri, sehingga diperlukan pasar baru untuk menjual produk tersebut.
5. Adanya perbedaan kondisi seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya dan penduduk yang menyebabkan perbedaan hasil

produksi dan keterbatasan produksi.

6. Ada akal sehat untuk suatu subjek.

7. Keinginan untuk kerjasama terbuka, koneksi politik dan dukungan dari negara lain.

8. Era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri

8.11. Konsep Ekonomi Modern tentang International Trade (Perdagangan Internasional)

a. Konsep Spesialisasi

Perdagangan internasional antara dua negara dapat berlangsung karena masing - masing negara ingin memanfaatkan keuntungan yang ditimbulkan oleh perdagangan internasional itu sendiri, yaitu spesialisasi. Konsep spesialisasi digunakan David Ricardo pada tahun 1817 untuk menunjukkan manfaat dalam perdagangan internasional. Setiap negara harus menspesialisasikan diri pada komoditas yang dapat diproduksi secara efisien untuk diekspor ke negara lain, mengimpor komoditas yang tidak dapat diproduksi secara efisien dari negara lain. Agar konsep ini dapat lebih dipahami, berikut digunakan contoh dua negara, Thailand dan Indonesia dengan dua komoditas berbeda, misal beras dan semen.

Tabel 1. Batas Kemungkinan Produksi (dalam ton)

Negara	Be ras	Se men
Thailand	20 0	10 0
Indonesia	80	80

Tabel di atas menunjukkan 'batas kemungkinan produksi' antara Thailand dan Indonesia. Thailand mempunyai keunggulan absolut atas Indonesia di kedua produksi barang, yaitu beras dan semen, karena Thailand dianugerahi sumber alam yang cocok untuk memproduksi kedua komoditas tersebut lebih banyak dari Indonesia.

b. Prinsip Keunggulan Komparatif

Seperti telah dinyatakan sebelumnya, perdagangan ekspor dan impor antarnegara terjadi bukan karena satu negara mempunyai keunggulan absolut atas negara lain, tetapi karena satu negara mempunyai keunggulan komparatif. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang yang lebih banyak dari negara lain dengan menggunakan jumlah input yang sama. Adapun keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dengan biaya kesempatan (opportunity cost) yang lebih murah dari negara lain.

8.12. Globalisasi dan Perdagangan Internasional (*International Trade*)

Isu - isu perdagangan global akhir-akhir ini semakin menonjol, terutama setelah Konferensi WTO ke-III di Seattle tahun 1999. Kenyataannya, perdagangan yang diatur oleh GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) dengan yang sekarang diatur oleh WTO (World Trade Organization) mengalami perubahan luar biasa. Perdagangan yang diatur oleh WTO sejak berdirinya, 1994, merambah ke bidang - bidang non-perdagangan. Ini dapat dilihat dari adanya TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property's Rights*), TRIMS (*Trade Related Investment Measures*), AOA (*Agreement on Agriculture*) maupun New Issues yang sejak Konferensi WTO I di Singapura, terus menerus coba dipaksakan oleh negara maju, yaitu *Government Procurement* (Belanja Pemerintah), *Investasi*, *Competition Policy* (Kebijakan Persaingan), *Lingkungan Hidup* dan *Perburuhan*.

Implementasi WTO menggambarkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan yang semakin lebar antara negara-negara maju dengan negara - negara berkembang dan miskin (LDC). Negara berkembang meminta adanya tinjauan atas implementasi yang ada, sehingga di dapat kesimpulan bagi pembenahan - pembenahan. Akan tetapi hal tersebut selalu ditolak oleh negara - negara maju. Implementasi yang

terjadi bahkan menunjukkan kecurangan- kecurangan dari negara maju. Hal ini nampak dalam berbagai negosiasi, klausul dan aturan - aturan yang pada kenyataannya hanya menguntungkan negara maju dan memberi jalan bagi kepentingan bisnis dan korporasi - korporasiraksasa di negara maju. Berbagai manuver dan move terus menerus diupayakan negara maju yang semakin mengarah pada ketidak- seimbangan luar biasa dan gap disparita yang semakin melebar (Setiawan, 2006).

8.13. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa factor - faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah kondisi produksi yang berbeda. Faktor keragaman produksi mengacu pada potensi faktor produksi suatu negara, misalnya Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan barang-barang pertanian. Dengan kata lain, suatu negara dapat memperoleh barang melalui perdagangan yang tidak dapat diproduksi oleh negaranya sendiri. Negara - negara memproduksi komoditas dalam jumlah besar sehingga hasilnya menghasilkan skala hasilyang meningkat biaya produksi rata - rata, yang menurun seiring dengan peningkatan jumlah komoditas yang diproduksi. Artinya, jika suatu negaramengkhususkan atau mengkhususkan diri pada komoditas tertentu dan mengekspornya, tentu saja biaya produksi barang akan berkurang. Selera berbeda meskipun kondisi produksi sama di semua negara tetapi setiap negara dapat berdagang jika sesuai dengan selera negara itu.

Melalui perdagangan suatu negara dapat memperoleh barang yang dibutuhkan yang tidak dapat diproduksi oleh negara tersebut. Negara mengkhususkan ataupun spesialisasi barang tertentu dan memproduksinya dalam jumlah yang banyak sehingga biaya produksi dapat ditekankan dan kemudian dilakukan perdangan internasional dengan mengekspor barang tersebut ke negara yang tidak memproduksi barang tersebut. Dampak positif dan negatif dari globalisasi bergantung bagaimana negara tersebut menyikapi

ataupun penanggapi permasalahan ini dan menyesuaikan dengan kultur ataupun budaya yang dianut oleh negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir M.S., (1984).* Seluk beluk dan teknik perdagangan luar negeri : suatu penuntun impor [dan] ekspor. *Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.*
- Amir M.S., 2013,* *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya, Penerbit Lembaga Manajemen PPM, Jakarta Pusat.*
- Baumol, William J.; Blinder, Alan S. (2011-06-13).* *Economics: Principles and Policy (dalam bahasa Inggris).* Cengage Learning. hlm. 49. ISBN 978-0-538-45367-7.
- Formaini, Robert L. (2004).* "David Ricardo Theory of Free International Trade"
- Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D., 1999, Makro Ekonomi, Alih Bahasa: Haris Munandar dkk., Erlangga, Jakarta.
- Setiawan, Bonnie. 2006. Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Indonesia dan Kritikanya.
- Smith, Adam (1791).* *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (dalam bahasa Inggris).* Legrand. hlm. 1–2. ISBN 978-1-4499-9156-2.
- Triono, Dwi Condro. 2005. Perdagangan Internasional.
- Wood, John Cunningham (1991).* *David Ricardo: Critical Assessments (dalam bahasa Inggris).* Taylor & Francis. hlm. 312. ISBN 978-0-415-06380-7.

PROFIL PENULIS



Sriwanti Belani, SE., MM
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Bisnis Digital
Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai

Sriwanti Belani, SE., MM, Lahir di Desa Tikupon, 08 September 1989, Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, merupakan anak tunggal pasangan dari Manaf Belani (Alm) dan Tadek Bunti. Menikah dan mempunyai 2 orang putra, yang pertama Bernama Uwais Hafiz Al Qarni Dimu dan Syawal Al Khalifi Dimu. Menempuh Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo lulus tahun 2001, SMP Negeri 2 Bualemo lulus tahun 2004, SMK Negeri 1 Luwuk Jurusan Manajemen Bisnis lulus tahun 2007, dan menyelesaikan jenjang Pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Luwuk Prodi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis lulus tahun 2011, tak hanya sampai disitu penulis juga kembali melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muslim Indonesia Makassar Prodi Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran pada tahun 2012 selesai tahun 2015. Sebelum menjadi Tenaga Dosen Penulis sempat bekerja di beberapa Perusahaan Swasta dan Saat ini penulis mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk prodi Bisnis Digital.

Kontak WA: 0813 – 4221 – 5838 / 082189385671

Email: sriwantibelani89@gmail.com

KURS VALUTA ASING, NERACA PEMBAYARAN DAN KEGIATAN EKONOMI TERBUKA

Oleh

Dr. Abdurohim, SE, MM

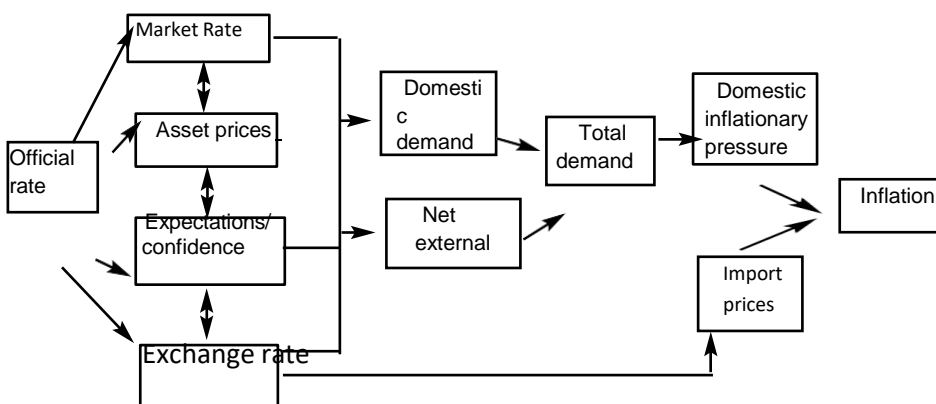
9.1 Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Negara

Perekonomian (Sihaloho 2020) di suatu negara selalu mengalami dinamika, kadang bertumbuh, stagnan bahkan tidak jarang yang mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh berbagai macam pengaruh baik dari faktor eksternal maupun dari faktor internal. Kebijakan perekonomian merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka menata aturan di bidang moneter, fiskal, produksi, perdagangan antar negara serta kebijakan yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Kebijakan pada bidang-bidang tersebut harus memiliki sinergitas antara satu dengan lainnya, meskipun dalam penetapan kebijakan tersebut dilakukan oleh Kementerian serta Dinas yang berbeda-beda. Karena itu dalam implementasinya haruslah di supervisi oleh Kementerian dan Dinas yang menjadi koordinasi dalam menerapkan kebijakan ekonomi tersebut.

Kebijakan ekonomi dikenal dengan penetapan Kebijakan Moneter (Debata, Dash, and Mahakud 2021) guna menghidupkan iklim investasi yang menarik bagi para investor, sehingga adanya kebijakan moneter ini bagi investor memperoleh keuntungan tersendiri terutama bagi produsen ketika membeli produk di negara tertentu dengan harga rendah, dan ketika dijual produk yang dihasilkan akan memperoleh hasil yang besar karena perbedaan Kurs tersebut. Dalam prakteknya maka setiap negara dalam menerapkan kebijakan moneter berbeda-beda, disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Kebijakan moneter pada setiap negara dilaksanakan oleh Bank Sentral. Di Indonesia yang melaksanakan kegiatan Bank Sentral adalah

Bank Indonesia (Pinilih 2017), dengan melakukan langkah-langkah signifikan terhadap kebijakan moneter guna menunjang kestabilan perekonomian, kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral seperti menerapkan kebijakan jumlah uang beredar, dengan mengatur kebutuhan jumlah uang beredar di tengah-tengah masyarakat tersebut untuk dilakukan pencetakan uang, jangan sampai pencetakan uang terjadi kelebihan ataupun kekurangan, sehingga kondisi moneter di negara tersebut stabil, mampu menjamin kegiatan perekonomian melalui pelaksanaan pembangunan di segala bidang (Abdurrohimi 2022 f).

Gambar 1
Kerangka Penetapan Kebijakan Moneter

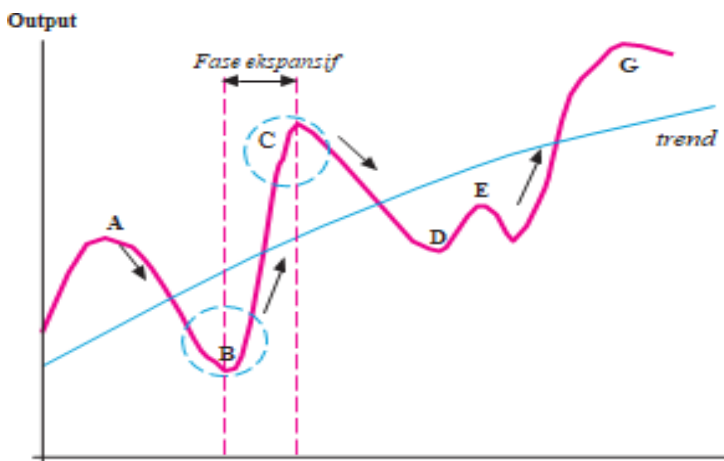


Sumber: (Keith and Peter 2003)

Kebijakan moneter (Sebayang 2021) yang diselenggarakan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan persediaan uang beredar di masyarakat sehingga tidak terjadi inflasi dengan cara menerapkan kebijakan bunga dan kurs mata uang sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2, karena itu setiap hari, bulan, triwulan dan semester Bank Sentral akan mengumpulkan data jumlah uang yang beredar di tengah-

tengah masyarakat, jangan sampai uang yang beredar mengalami kekurangan ataupun kelebihan, sehingga faktor ketersediaan jumlah uang beredar akan memicu inflasi di tengah-tengah masyarakat, karena itu Bank Sentral suatu negara berupaya keras supaya inflasi tidak merangkak naik, melalui kebijakan pasar terbuka dengan menetapkan kenaikan suku bunga, sehingga mampu menarik jumlah uang beredar (Kainde and Karnoto 2021), begitu pula sebaliknya ketika kecukupan jumlah uang beredar mengalami kekurangan maka Bank Sentral akan menetapkan kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga ataupun dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) kembali dari masyarakat, sehingga uang beredar terus mengalami penambahan (Abdurohimi 2022a).

Gambar 2
Perubahan Kebijakan Moneter



Sumber: (Solikin and Perry 2003)

Kebijakan moneter di Indonesia (Sebayang 2021) untuk mempercepat resesi ekonomi ditunjukkan dengan angka A menuju ke

Angka B, melalui kebijakan agresif ditunjukkan pada angka B ke C sehingga posisi perekonomian Indonesia kembali stabil dan bertumbuh sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2, selanjutnya untuk menjaga kestabilan harga yang konsisten, berdampak pada pemerataan pembangunan yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Suatu negara dikatakan perekonomiannya baik, bila harga-harga produk dan jasa stabil atau tidak mengalami kenaikan yang tinggi atau disebut inflasi. Banyak negara melaksanakan pembangunan, mengalami gangguan dari faktor eksternal atau global sehingga berpengaruh dalam menetapkan kebijakan internal negara tersebut.

Bank Sentral (Duc and Rojas-Baru 2021) terus menerus memantau, memonitor akses terjadinya kebijakan perekonomian yang ditetapkan oleh pihak lain di suatu negara, kadang terjadi kontradiksi satu sama lainnya, berdampak pada kondisi moneter tidak stabil atau mengalami fluktuasi seperti Inflasi, Tingkat Suku Bunga yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh para pelaku ekonomi, membeli harga bahan baku mahal, memperoleh dana kredit bunganya lebih besar, sehingga memperlemah dalam aktivitas menciptakan kestabilan ekonomi (Abdurohim 2021 c).

Kebijakan moneter (Maipita 2020) yang harus dilakukan oleh Bank Sentral, ketika terjadi gejolak pada inflasi, ataupun pertumbuhan ekonomi, maka harus mengambil langkah-langkah kebijakan moneternya, seperti:

- a. Kebijakan penerapan tingkat suku bunga yang diterapkan oleh para pelaku di pasar uang, semakin rendah penerapan tingkat suku bunga, maka masing-masing perusahaan akan mempertimbangkan pada setiap kebutuhan untuk investasi maupun modal kerja diminta difasilitasi oleh lembaga keuangan baik di pasar modal maupun di pasar uang (Abdurohim 2021d).

- b. Mencetak kebutuhan uang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak boleh kelebihan maupun kekurangan, sehingga kestabilan ekonomi dapat terjaga.

9.2. Kebijakan Valuta Asing

Kebijakan moneter (Bariah et al. 2020) untuk mengatur valuta asing yang dipergunakan oleh suatu negara, didasarkan pada faktor luar terutama kebijakan dari Bank Sentral di negara yang memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan, perekonomian di negara tersebut, sehingga akan berdampak pada negara tersebut, sebab jika tidak cepat-cepat menyesuaikan dikhawatirkan dana milik investor yang telah menanamkan dananya akan keluar dari negara tersebut, sehingga berdampak sekali bagi perekonomian internal pada negara tersebut. Penguatan valuta asing di suatu negara tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian terutama dalam menjaga dana masuk dan keluar yang dimiliki oleh para investor. Para investor tersebut memburu keuntungan yang riil dalam mengelola dana yang dimiliki, mereka leluasa untuk menanamkan dananya di mancanegara. Karena itu kestabilan harga, kebijakan perdagangan, serta ketenagakerjaan benar-benar dijaga, bila negara tersebut ingin eksis dalam mengelola perekonomian negara tersebut.

Menjaga valuta asing (Yulius 2020) di suatu negara sangatlah penting, karena bila tidak dikelola dengan baik berpengaruh pada stabilitas ekonomi yang dijalkannya. Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang diberikan tugas untuk mengelola kebijakan valuta asing melalui wadah kebijakan moneter, dengan memperhatikan gejolak pasar valuta asing domestik pengaruhnya pada stabilitas nilai tukar rupiah. Berupaya untuk mempertahankan nilai tukar rupiah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tentunya untuk menjaga nilai tukar rupiah ini dalam rangka untuk stabilitas ekonomi riil yang terjadi pada perekonomian suatu negara. Bila

nilai tukar valuta asing meningkat tajam misalnya yang semula hanya Rp. 14.500 per satu dollar Amerika Serikat, dalam hitungan detik menjadi sebesar Rp. 15.000 per satu dollar Amerika Serikat, maka harus memperhatikan nilai tukar yang telah ditetapkan dalam APBN tersebut, serta kondisi perekonomian di negara tersebut misalnya inflasi, kebijakan perdagangan serta kebijakan lain. dan bila keadaan riil di negara tersebut bagus, maka untuk mempengaruhi penurunan nilai dollar US tersebut, biasanya Bank Indonesia akan melakukan intervensi berupa kebijakan pelepasan dollar ke pasaran untuk meredakan gejolak harga pasar yang terus meningkat.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia (Fadhilah, Yulivan, and Saragih 2021) dalam melakukan pengelolaan harga valuta asing, supaya stabil dan memberikan dampak yang baik terhadap situasi riil pada perekonomian negara tersebut, dilakukan melalui kebijakan seperti:

a. Menjaga stabilitas nilai tukar

Stabilitas valuta asing harus benar-benar dijaga oleh Bank Indonesia pada pasar domestiknya, melalui kebijakan intervensi di pasar forward nya. Berbagai kebijakan dipergunakan oleh Bank Indonesia sehingga pasar domestik nilai benar-benar terjaga aman, seperti intervensi pada pasar spot, pasar forward. Kegiatan ini selalu rutin dilakukan oleh Bank Indonesia (Ramadhani and Hasanah 2021), sebab bila tidak dikendalikan, maka pasar spot akan melaju seperti bola api liar yang mampu memporak porandakan tatanan perekonomian yang telah ditata sedemikian rupa, bisa hancur sekejap, bahkan bisa berimbas pada masalah politik, karena valuta asing yang tinggi menyebabkan masyarakat terkena imbasnya berupa harga-harga kebutuhan pokok akan meningkat.

b. Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah

Bank Indonesia (Permana, Nur'aeni, and Setiawan 2022) melalui kebijakannya akan menerapkan berbagai instrumen sebagai media

untuk mempengaruhi pasar yaitu melalui kebijakan penerbitan dan penjualan Sertifikat Deposito bank Indonesia (SBI) 3 bulan dan Reverse Repo SBN dengan tenor 2 minggu. Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mampu menyerap jumlah uang beredar di masyarakat bila terjadi kelebihan dan menjual rupiah kepada bank-bank yang membutuhkan untuk membayar simpanan para nasabahnya ketika tabungan, deposito dan gironya di tarik dari bank tersebut. Mekanisme ini terus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga kerangka ekonomi secara keseluruhan.

c. Mengelola pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing (valas)

Mengelola penawaran dan permintaan valas melalui berbagai instrumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan kestabilan nilai rupiah, jangan sampai merangkak naik, dan tidak bisa dikendalikan, akibatnya bisa fatal. Untuk melakukan kegiatan ini beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Bank Indonesia (Atmaja and Paulus 2022), meliputi:

- a. Penerapan kebijakan untuk mengelola stabilitas valas melalui pengelolaan penawaran dan permintaan di masyarakat. Kebijakan ini untuk tujuan meningkatkan penawaran rupiah untuk dipergunakan semua transaksi serta mengendalikan permintaan valas yang berlebihan.
- b. Bank Indonesia melalui kewenangannya maka melakukan penerapan kebijakan penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas, melalui kebijakan ini maka pasar valas dapat dikendalikan, bagaimanapun gejolaknya. Ketidakstabilan valas berimbas pada kegiatan riil yang dijalankan oleh para pelaku ekonomi khususnya bagi usaha kecil dan menengah akan terimbas pengaruhnya, sebab bagi UMKM ini banyak bergantung pada keadaan ekonomi makro.

- c. Melakukan kebijakan yang berkaitan dengan SBI dengan cara memendekan periodenya yaitu dari 1 bulan menjadi 2 minggu, sebab kecepatan waktu sangat berpengaruh dalam mempengaruhi investasi dananya untuk tetap di tanam atau keluar dari negara tersebut.
- d. Melalui berbagai macam kebijakan yang bervariasi seperti memberikan kebijakan pengurangan pajak atas bunga deposito eksportir yang telah melakukan jual beli komoditinya, untuk dananya di tanam di dalam negeri, tidak diparkir di luar negeri, sebab dana tersebut bisa dipergunakan untuk memperkuat cadangan devisa negara.
- e. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu menerapkan ketersediaan informasi atas penggunaan devisa melalui laporan lalu lintas devisa (LLD) sehingga data yang tersedia dapat dipergunakan untuk menerapkan kebijakan moneter pada bidang lainnya.

9.3. Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran (Maipita 2020) merupakan catatan penting atas kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua warga negara yang berbeda negaranya, misalnya A telah menghasilkan produk ataupun hasil sumber daya yang dipergunakan untuk mendukung produksi warga negara di negara lain, ataupun sebaliknya warga negara lain melakukan pembelian barang barang mesin untuk mendukung kegiatan produksinya. Semua kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh warga negara pada dua negara tersebut dicatat dalam neraca pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Melalui pencatatan ini maka diketahui berapa besar devisa yang dimiliki oleh negara tersebut, dengan demikian bisa dipergunakan untuk mengendalikan sektor riil, fiskal dan moneter.

Sektor riil merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara

di pemerintahan dalam aktivitasnya selalu bersentuhan dengan kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya telah terjadi FED melakukan penyesuaian tingkat suku bunga yang akan diberlakukan pada tanggal xx serta tahun yyyy, maka masing-masing Gubernur Bank Sentral akan sibuk melakukan kegiatan rapat untuk membahas situasi yang akan terjadi jika penerapan FED diberlakukan, tentunya yang akan dilakukan kajian adalah posisi neraca pembayaran negara tersebut, benar-benar kuat untuk bisa membayar kewajiban-kewajiban pemerintah maupun warga negara kepada negara tertentu, sehingga dilakukan kebijakan meningkatkan suku bunga atau malah menurunkan semuanya tergantung dari kondisi perekonomian negara tersebut.

Perekonomian (Khamimah 2021) negara bisa dikatakan baik serta buruk tercermin dari keadaan internal negara tersebut seperti perkembangan sektor riil, produksi, konsumsi dan investasi. Selain itu juga bisa dilihat dari perkembangan sektor moneter seperti inflasi dan jumlah uang beredar. Sedangkan untuk kondisi eksternal terlihat pada neraca pembayaran negara tersebut. Neraca pembayaran suatu negara akan berpengaruh pada sektor-sektor lainnya. Neraca pembayaran dipengaruhi oleh perkembangan permintaan dan penawaran barang dan jasa di sektor riil terkait dengan aktivitas ekspor dan impor barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara pada transaksi berjalan. Selain dari aktivitas produksi juga terdapat pencatatan transfer yang berasal dari hibah negara-negara donor ataupun sahabat negara tersebut untuk membantu pelaksanaan pembangunan dicatat juga pada transaksi berjalan. Atas kegiatan tersebut seluruhnya dicatat dalam transaksi berjalan pada neraca pembayaran negara tersebut, semakin tinggi ekspor dikurangi berkurangnya impor serta bantuan dana dari negara donor, akan memperkuat neraca pembayaran negara tersebut, semakin besar yang tercatat, maka memperkuat performance negara tersebut dalam setiap melakukan negosiasi ataupun mempengaruhi

situasi moneter negara tersebut.

Pencatatan pada neraca pembayaran juga akan mencatat berbagai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembayaran bunga pinjaman pemerintah, serta aliran modal luar negeri yang berasal dari pinjaman maupun investor yang akan menanamkan dananya baik pada pasar modal maupun pasar uang, akan tercatat pada sisi neraca pembayaran pemerintah. Keadaan neraca pembayaran juga bisa dipergunakan oleh sektor swasta untuk menetapkan kebijakan dalam melakukan perluasan usaha maupun untuk peminjaman dengan pihak luar negeri. Sebab peminjaman saat dilakukan valas dollar sedang rendah sehingga banyak yang tergiur untuk melakukan peminjaman dana dengan investor di luar negeri, dan ketika tidak bisa memprediksi maka akan terjebak dengan kewajiban angsuran dan bunga ketika dilakukan pembayaran dengan nilai vakkas yang tinggi. Misalnya pada saat dilakukan penandatanganan nilai valasnya baru Rp, 14.500,00 sedangkan pada saat membayar angsuran pokok dan bunga nilai valuta asing dolar sudah meningkat menjadi Rp.15.000,00 maka berapa besar dana yang perlu dipersiapkan untuk menambah pembayaran akibat nilai valas yang meningkat.

Pencatatan pada neraca pembayaran suatu negara dikelompokkan pada dua kegiatan yang dipergunakan dalam aktivitas pemerintahan, yaitu:

a. Transaksi berjalan

Transaksi berjalan merupakan pencatatan atas kegiatan perdagangan baik ekspor maupun import untuk kegiatan produksi, sehingga setiap yang dilakukan oleh pebisnis, tercatat seluruhnya pada neraca pembayaran, seperti perusahaan A melakukan ekspor ke Inggris untuk penjualan barang barang mentah, maka atas hasil yang diperoleh dari para pebisnis harus seluruhnya tercatat dalam neraca [pembayaran, demikian juga untuk pengadaan impor barang-barang keperluan industri maka perlu dicatat pada neraca pembayaran

untuk faktor pengurang.

b. Transaksi modal

Merupakan aktivitas pencatatan transaksi atas perpindahan dana dari luar negeri maupun dalam negeri untuk tujuan bantuan, investor yang akan menanamkan dananya pada pasar uang ataupun modal yang benar benar alir tersebut berupa valas.

Aktivitas kegiatan transaksi perdagangan antara dua warga negara ataupun yang dilakukan negara, secara langsung akan berpengaruh terhadap pencatatan pembayaran negara tersebut, sehingga banyak negara yang berupaya untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan yang menghasilkan produknya untuk di jual ke luar negeri, semakin besar dalam melakukan ekspor, maka berpengaruh terhadap saldo neraca pembayaran. Sedangkan upaya lain terhadap neraca pembayaran adalah kemampuan pemerintah untuk mengendalikan impor barang serta mencegah dana para investor yang akan meninggalkan negara tersebut, berupaya bagaimana caranya untuk meredakan impor barang untuk keperluan produksi maupun dana yang mau keluar mencari daerah atau negara yang mampu menjanjikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang selama ini modalnya tertanam.

Neraca pembayaran ini merupakan bukti pemerintah di suatu negara untuk tetap eksis dalam mengelola pemerintahan, sebab bila saldo yang dimiliki oleh negara tersebut kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya akan mempengaruhi minat investor yang akan menanamkan dananya di negara tersebut. Pengelolaan dalam transaksi berjalan sangatlah sensitif terutama masalah internal perusahaan, seperti masalah tenaga kerja yang terus menerus meminta UMR tanpa memperhatikan kondisi atau lingkungan makro yang terjadi. Bila para investor yang telah menanamkan dana tiba-tiba henggang maka akan terjadi guncangan khususnya pencatatan transaksi modal. Dan bila tidak segera diperbaiki berpengaruh terhadap sektor riil dan juga masyarakat akan terjadi kenaikan harga serta rentetan lainnya. Banyak pemerintah

di dunia ini, dalam mengelola neraca pembayaran biasa-biasa saja tidak sigap dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul, karena akan merembet ke sektor lainnya. Adapun rincian dari neraca pembayaran tersebut, meliputi:

1. Transaksi berjalan

Dalam kegiatan pencatatan meliputi:

a. Perdagangan barang

✓ Ekspor

✓ Impor

b. Jasa-jasa

c. Penghasilan pemerintah/swasta berupa Transfer

2. Transaksi modal dan keuangan

Dalam kegiatan pencatatan meliputi:

✓ Transaksi modal

✓ Transaksi keuangan di luar cadangan devisa berupa penanaman modal, investasi surat berharga serta investasi lainnya.

3. Perubahan cadangan devisa

4. Selisih perhitungan

9.4. Kebijakan Perekonomian Terbuka

Kebijakan ekonomi terbuka (Bafadal, Dirgantoro, and Surni 2018; Kementerian Keuangan 2021) adalah suatu negara yang terhubung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh negara-negara lain berupa ekspor-impor yang dilakukan oleh pemerintahan guna menjamin tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Masyarakat selalu menuntut adanya perbaikan lingkungan untuk bisa bersahaja dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Mereka saling membutuhkan antara satu dengan lainnya seperti negara-negara maju membutuhkan bahan baku dari negara-negara berkembang, sedangkan

negara-negara berkembang membutuhkan adanya pasokan mesin-mesin yang dibutuhkan dalam menunjang kemajuan negaranya terutama untuk pemenuhan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk pemenuhan kehidupannya.

Pada sistem ekonomi terbuka ini bukan saja masalah yang berkaitan dengan produksi barang, juga kegiatan yang diperlukan adalah jasa perbankan untuk mampu mensupport kegiatan yang dilakukan oleh dua warga negara berbeda negaranya, sebab kegiatan perdagangan ekspor dan import membutuhkan fasilitas untuk pengiriman uang, maupun untuk menjamin pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing warga negara tersebut, sehingga kehadiran dari perusahaan perbankan sangatlah mutlak. Seperti warga negara satu yang melakukan ekspor ke warga negara lainnya di negara lain membutuhkan barang yang diperlukan untuk diperjualbelikan ataupun dilakukan produksi, maka untuk melakukan pembayaran, mereka membutuhkan adanya jaminan nyata, sebab bagi penjual produk tidak berani melakukan pengiriman bila uangnya ataupun komitmennya belum ada, demikian juga bagi pembeli, mereka tidak berani membayar sejumlah uang tanpa ada kepastian, dengan demikian jika masing-masing pihak bertahan pada pendiriannya susah dilakukan kegiatan perdagangan, karena itu peranan jasa Perbankan mutlak diperlukan untuk menerbitkan jaminan baik untuk pengirim barang dan juga pemesan barang, yang tentunya masing-masing bank berada di negaranya masing-masing, namun karena ada keterbatasan dalam menjamin kegiatan perdagangan ini, maka banyak negara-negara maju yang perbankannya membuka kegiatannya di negara-negara yang warga negaranya melakukan transaksi perdagangan (Abdurohim 2021g).

Kegiatan melakukan penjaminan pada sistem ekonomi terbuka dilakukan oleh dunia perbankan, dengan mengeluarkan layanannya berupa *Letter of Credit* (LC), dimana warga negara yang melakukan pengiriman barang akan mengontak Bank domestik yang memiliki izin

mengeluarkan layanan LC tersebut dari Bank Indonesia, maka bila Bank tersebut telah memiliki kontrak kesepahaman dengan bank tersebut, maka Bank yang diberikan kepercayaan tersebut akan menghubungi Bank yang dipercaya oleh pembeli barang di negara lain, maka bila sudah ada kesepahaman, maka diterbitkan LC dari bank yang ditunjuk oleh pembeli barang, maka bila LC yang disampaikan kepada Bank yang mengelola produsen tersebut akan dihubungi untuk melakukan berbagai pemenuhan persyaratan, maka pihak Bank yang ditunjuk oleh produsen, bahwa persyaratan untuk pengiriman barang sudah tidak ada masalah, sehingga proses transaksi perdagangan dan pembayaran segera dilakukan.

Cakupan dalam melaksanakan kegiatan sistem terbuka bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, juga meliputi pertukaran teknologi serta lainnya, perekonomian terbuka bertujuan untuk memudahkan kegiatan perdagangan barang dan jasa, sehingga negara tersebut mengalami lompatan kemajuan yang bisa memberikan kemajuan bagi masyarakatnya berupa kesejahteraan, sebab dengan terbukanya kegiatan perdagangan akan memiliki dampak yang banyak seperti pabrik melaksanakan kegiatan yang rutin, maka banyak menggunakan tenaga kerja lokal maupun nasional, serta bagi pemerintahan daerah yang mendapatkan lokasi pabrik juga memberikan dampak khususnya pada pajak daerah yang dipungut langsung seperti PBB, serta dari kegiatan tersebut akan menjadikan kawasan tersebut ramai, sehingga mampu memberikan sarana bagi masyarakat lainnya untuk memenuhi kebutuhan bagi pekerja pabrik atau industri, seperti rumah penginapan, rumah makan, rumah penjualan sembako.

Perekonomian terbuka memang memberikan peluang untuk menjadikan negara tersebut berkembang seiring dengan kemajuan peradaban bangsa, karena itu sistem ini banyak diadopsi oleh banyak negara di dunia ini, hampir sedikit yang masih menerapkan sistem terbuka ini. Berdampak besar pada masyarakatnya, serba terbatas dan

juga ditakut takuti oleh segelintir oknum agar warga terus tanpa ada bisa yang merubah. Banyak masyarakatnya hidup sengsara akibat penerapan sistem ekonomi tertutup, sebab tidak bisa perusahaan lain untuk memasuki negara tersebut adanya suatu kekhawatiran akan membawa falsafah hidup lain, yang akan merusak tatanan negara tersebut.

Pemberlakuan perekonomian terbuka bukan terjadi saat ini saja, telah berlangsung berabad-abad dilakukan oleh banyak negara di dunia ini sebab memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan yang bisa diraih oleh negara tersebut. Perekonomian terbuka, memberikan peluang bagi masyarakatnya untuk bisa bekerja di negara-negara maju, sepanjang memiliki keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Seperti tenaga kerja untuk keperluan perawat sangat diperlukan oleh negara Jepang, sehingga terjadi pertukaran tenaga ahli maupun menengah antar negara tersebut, negara maju memiliki sumber daya manusia yang handal, maka sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang, untuk berbagai kebutuhan seperti ahli teknologi informasi, tenaga ahli satelit, serta tenaga ahli di bidang kemaritiman serta pertambangan. Bukannya tenaga-tenaga dari domestik buruk, namun memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang sudah lama. Indonesia ada beberapa kegiatan yang diserahkan oleh tenaga asing, namun tidak sedikit yang sudah bisa dilakukan sendiri oleh tenaga kerja Indonesia.

9.5. Perekonomian terbuka memerlukan kebijakan moneter serta pemenuhan kerangka operasional yang kuat

Perekonomian terbuka bagi negara, haruslah diimbangi dengan kemampuan pada pengambilan kebijakan moneter (Abdurohimi 2022e) yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pelaksana implementasi dari Bank Sentral (Alonso et al. 2020), dilakukan secara rutin guna menjamin stabilitas moneter yang terjadi, sebab bila tidak dilakukan pengaturan yang ketat bisa berujung pada tragedi chaos seperti yang pernah terjadi pada saat rezim orde baru ditumbangkan oleh kekuatan baru, maka

yang terjadi untuk moneter sudah tidak rasional lagi, seperti tingkat suku bunga menjadi 70 persen terjadi di Indonesia, valuta asing juga demikian sampai mencapai nilai sebesar 16.000,00 pada saat itu, namun karena kepiawaian pemimpin baru Indonesia, sehingga bisa mengendalikan terjadinya situasi moneter yang dimana masyarakat umum dunia sudah tidak mempercayai kondisi perekonomian Indonesia,

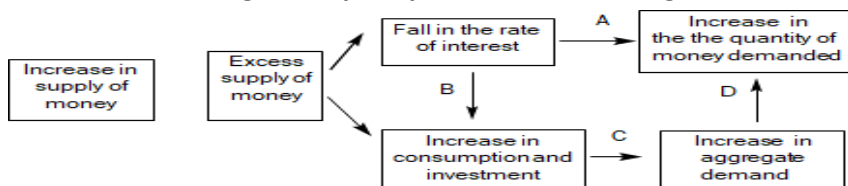
Kebijakan moneter (Abdurohim 2022e) yang diterapkan oleh masing-masing Bank Sentral serta Indonesia ditunjuk oleh Undang-Undang adalah Bank Indonesia, dalam menerapkan kebijakan Moneter secara umum bertujuan dalam rangka:

- a. Mengupayakan ekonomi yang ada di negara tersebut stabil, melalui distribusi barang dan jasa yang terus dilakukan pemasokan setiap saat, karena itu Bank Indonesia berupaya keras untuk memasok jumlah uang beredar mencukupi kebutuhan aktivitas ekonomi masyarakat, jangan sampai kelebihan maupun kekurangan untuk kebutuhan jumlah uang beredar di masyarakat.
- b. Kenaikan harga-harga (Abdurohim 2022c) bisa terjadi akibat pasokan barang dan jasa tidak sesuai antara permintaan dan penyediaan, namun yang lebih utama adalah ketersediaan jumlah uang beredar di masyarakat.

Melalui kebijakan moneter (Bariah et al. 2020) yang diterapkan secara tepat, maka diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan uang, sehingga tidak terjadinya penggunaan uang untuk spekulasi dalam pasar uang dan modal, menyebabkan instrumen lain ikut terpengaruh seperti tingkat suku bunga meningkat bila jumlah uang beredar berlebihan (Kainde and Karnoto 2021; Murdiah and Bowo 2020). Bank Indonesia akan berupaya lebih keras lagi jika uang yang ada di masyarakat terlalu berlebihan (Sitorus et al. 2022), tentunya akan menetapkan kebijakan moneter berupa peningkatan persentase jumlah giro Bank Indonesia (Ismawati et al. 2022; Vienna et al. 2012) yang lebih besar, sehingga banyak uang

yang ditahan oleh perbankan akibatnya mengurangi jumlah uang yang beredar (Prasasti and Slamet 2020).

Gambar 3
Pengaturan pada pasar modal dan uang



Sumber: (Keith and Peter 2003)

Dalam menetapkan kebijakan moneter (Ega Rusanti et al. 2020) yang dilakukan oleh Bank Sentral, disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian nasional jangan sampai yang dilakukan oleh Bank Sentral tidak mendukung aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah, sebab Bank Sentral di negara-negara yang menerapkan kebijakannya terbuka, sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya, Bank Sentral tersebut berdiri sendiri tanpa ada intervensi dari kalangan pemerintah, sehingga benar-benar mandiri, misalnya untuk mencegah terjadinya tingkat bunga yang terlalu tinggi maupun tingkat suku bunga sudah tidak menarik lagi yang dirasakan oleh para investor, sehingga akan mencairkan portofolio investasi yang dimiliki, kemudian dilarikan investasi tersebut ke negara lain yang lebih menjanjikan. Untuk keperluan tersebut Bank Sentral melakukan penerapan dalam kebijakan moneternya, melalui kebijakan menambah atau mengurangi jumlah uang yang ada di masyarakat, melalui berbagai jenis instrumen kebijakan moneter yang ditetapkan, seperti:

- a. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Sentral (Abdurohim 2022g) untuk menambah pasokan uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat, mengingat jumlahnya sangat minim sehingga banyak pihak yang memanfaatkan kekurangan jumlah uang beredar

untuk meningkatkan harga barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, melalui kebijakan moneter ekspansif (*monetary ekspansif policy*).

- b. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menangani terjadinya inflasi, disertai dengan jumlah uang beredar yang banyak di tengah-tengah masyarakat, sehingga kebijakan yang harus ditetapkan berupa kebijakan moneter kontraktif, melalui penarikan jumlah uang beredar melalui peningkatan suku bunga (Abdurohimi 2021b) sehingga banyak masyarakat yang berupaya untuk menyimpan dananya ke bank, tertarik dengan tingkat bunga yang bergerak naik.
- c. Melalui penerapan kebijakan moneter yang ditetapkan disesuaikan dengan pemecahan problem yang dihadapi, sehingga pemerintah akan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh semua masyarakat, untuk terus melayani masyarakat serta menerapkan tujuan yang jelas untuk implementasi kegiatannya. Beberapa hal yang harus dipahami dalam Bank Indonesia melaksanakan kegiatan kebijakan moneter, dipergunakan untuk (Alisjahbana et al. 2020l. 2022; Pratiwi, Affandy, and Rosalina 2020).

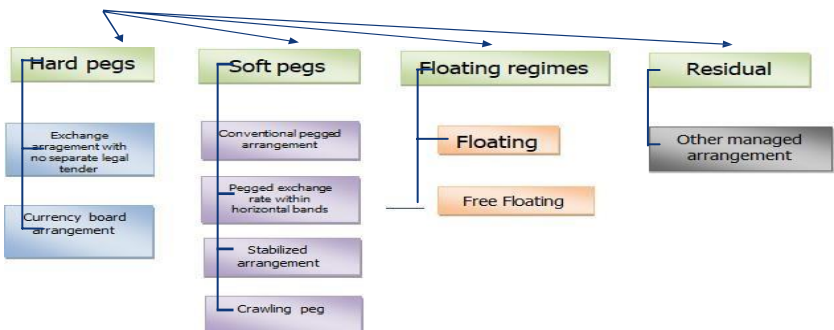
Melalui penerapan kebijakan moneter yang ditetapkan disesuaikan dengan problem yang dihadapi, sehingga pemerintah mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh semua masyarakat, untuk terus melayani masyarakat serta menerapkan tujuan yang jelas untuk implementasi kegiatannya. Sehingga dalam penanganan yang dihadapi oleh pemerintah dapat teratasi. Salah satu contoh dalam menangani penerapan kebijakan valuta asing, maka diperlukan adanya perhitungan yang komprehensif, sebab kurs valuta asing akan terus meningkat sepanjang permintaannya meningkat, sebagaimana disajikan dalam gambar 5.2.2

Beberapa hal yang harus dipahami dalam Bank Indonesia (Nurullia 2021; Tjendani 2018) melaksanakan kegiatan kebijakan moneter,

dipergunakan untuk:

- a. Menjaga kondisi perekonomian (Amri 2016; Rahmawati 2016) suatu negara yang seimbang, sehingga suasana untuk bekerja yang tinggi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal.
- b. Perekonomian yang berkembang memberikan kemampuan perusahaan terus menerus meningkatkan barang dan jasa, sehingga mampu memberikan kesempatan bekerja bagi para milenial (Abdurrohm 2021 f).
- c. Gejolak harga (Wawo and Nirwana 2020) bisa dikendalikan, sehingga para pelaku ekonomi sangat nyaman dan mampu untuk meningkatkan kapasitas usahanya.
- d. Keseimbangan juga terjadi pada neraca perdagangan, mengingat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sangatlah riil, dan mengenai dengan permasalahan yang dihadapi para pelaku barang ekspor maupun import (Mangapul and Raja 2018).

Gambar 4
Kebijakan Valuta Asing



Sumber: (Bank 2014)

Beberapa hal yang harus dipahami dalam Bank Indonesia (Nurullia

2021; Tjendani 2018) melaksanakan kegiatan kebijakan moneter, dipergunakan untuk:

- e. Menjaga kondisi perekonomian suatu negara yang seimbang, sehingga suasana untuk bekerja yang tinggi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal.
- f. Perekonomian yang berkembang memberikan kemampuan perusahaan terus menerus meningkatkan barang dan jasa, sehingga mampu memberikan kesempatan bekerja bagi para milenia (Abdurrohman 2021 f).
- g. Gejolak harga (Wawo and Nirwana 2020) bisa dikendalikan, sehingga para pelaku ekonomi sangat nyaman dan mampu untuk meningkatkan kapasitas usahanya.
- h. Keseimbangan juga terjadi pada neraca perdagangan, mengingat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sangatlah riil, dan mengenai dengan permasalahan yang dihadapi para pelaku barang ekspor maupun import.

9.6. Bank Sentral menetapkan strategis kebijakan moneter

Setiap kebijakan yang diterapkan tentunya melalui berbagai pertimbangan serta memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan, jangan sampai kebijakan yang diterapkan berpengaruh pada sektor lainnya. Kebijakan moneter (Abdurrohman 2021 c; Banyak 2019; Schoenmaker 2021) berbeda sekali dibandingkan dengan penerapan kebijakan lainnya, perlu dilakukan perhitungan yang cermat juga diperhitungkan dampak yang akan terjadi bila kebijakan moneter diterapkan, bisa berjalan beriringan sehingga mampu mengurai permasalahan yang terjadi, bahkan bisa saja terjadi kontradiksi yang saling berpengaruh negatif atas kebijakan yang diterapkan. Misalnya penerapan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Afriansyah et al. 2022; Goel and Mittal 2020; Q. Wang and Zhang 2020), disertai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan

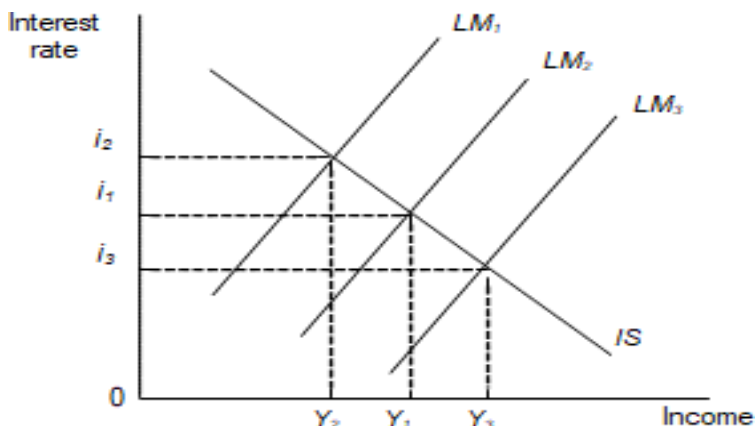
oleh semua lulusan perguruan tinggi maupun lulusan dibawahnya, namun kebijakan tersebut bisa memicu terjadinya inflasi atas harga barang di masyarakat, disebabkan terjadinya penambahan jumlah uang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat memiliki banyak uang, sehingga para produsen meningkatkan harga-harga produk yang dijualnya.

Pada setiap kebijakan yang ditetapkan, memiliki strategi (Abdurohim et al. 2022; Agustia, Muhammad, and Permatasari 2020; Li, Larimo, and Leonidou 2021; Narsa 2014; Silalahi et al. n.d.; Wu, Ran, and Zhu 2022) yang dipilih tentunya memiliki karakteristik tersendiri antara satu dengan lainnya, serta memiliki pengaruh meskipun kecil, tentunya harus diperhitungkan secara seksama. Beberapa kerangka berpikir dalam menerapkan kebijakan moneter, dan baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap:

- a. Memperketat nilai tukar (*exchange rate targeting*) (Chaidir and Arini 2019; Edwards and Cabezas 2022; Floyd 2010; Mohammed, Mohammed, and Nketiah-Amponsah 2021; Saidi et al. 2021; Wuryandani 2018) yaitu memperketat nilai tukar mengingat nilai tukar sangat dominan mempengaruhi kondisi ekonomi negara tersebut, sehingga perlu melakukan pengetatan, namun kebijakan moneter ini sesuai untuk negara-negara yang perekonomiannya relatif kecil, sehingga tidak berpengaruh terhadap sektor lain seperti Singapura dan Belanda.
- b. Menetapkan kebijakan besaran moneter (*monetary starting*) yaitu menetapkan kebijakan moneter melalui pertumbuhan jumlah uang beredar dan kredit yang dibatasi, sebab bila tidak ada batasan akan memicu terjadinya penambahan uang ditengah-tengah masyarakat sehingga mampu menimbulkan dampak ekonomi lainnya.
- c. Inflasi yang juga dibatasi (*inflation target*) (Bank Indonesia 2020, 2021; Juhro and Ice 2020; Khotijah, Suharti, and Yudhawati 2020; Kumala et al. 2022; Kurniawati 2019; Mandeya and Ho 2021; Rudd

2022; Studi et al. 2020; Suseno and Astiyah 2010) yaitu melalui dengan kebijakan yang tidak membiarkan harga-harga meningkat, sehingga berdampak pada daya beli bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, pendapatannya akan tergerus untuk pengeluaran harga produk yang terus menerus meningkat.

Grafik 1
Keseimbangan pada Pasar Uang



Sumber: (Keith and Peter 2003)

d. Tidak adanya target yang jelas terhadap unsur utama yang mempengaruhi kebijakan moneter, dan Bank Sentral negara tersebut tetap memiliki target-target yang jelas dalam mengelola kebijakan moneter (Abdurrohim 2022a; ter Ellen, Larsen, and Thorsrud 2022; Gürkaynak et al. 2021; Harahap et al. 2017; Journal and Saham 2021).

Penerapan Kebijakan Moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral tentunya didasarkan pada pertimbangan yang realistis. Jika tingkat suku bunga (Abdurohimi 2022c; Sari 2019) ditingkatkan oleh Bank Sentral, maka masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi, maka

pilihannya akan menyimpan dananya pada produk lembaga keuangan Bank, sebagaimana terlihat pada gambar 5.2.1 mampu untuk meningkatkan perekonomian negara tersebut, oleh karena itu dalam menetapkan kebijakan moneter melakukannya secara langsung dan secara tidak langsung yang masing-masing kebijakan tersebut mampu menghasilkan dampak positif bagi negara tersebut. Adapun kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara, meliputi:

- a. Kebijakan moneter langsung, menggunakan instrumen pengendalian moneter secara langsung terhadap para pelaku ekonominya meliputi:
 - ✓ Membatasi kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan bank, sehingga tidak banyak kredit yang diberikan, meskipun memiliki potensi untuk mampu mendongkrak perekonomian negara, tapi bila kredit tersebut dipergunakan untuk tujuan aslinya, maka akan berdampak pada sektor lain yang akan mengalami kontradiksi.

Gambar 5
Kebijakan Moneter melalui Kredit



Sumber: (Solikin and Perry 2003)

- ✓ Membatasi besarnya tingkat suku bunga (Choudhry and Lizzio 2015; Ismawati et al. 2022; Jia 2020; del Negro et al. 2019),

sehingga dana yang disimpan oleh masyarakat ke perbankan tidak seluruhnya, sehingga berpengaruh pada ketersediaan jumlah uang beredar di masyarakat.

- ✓ Menurunkan nilai uang setengahnya (Hill and Hill 2018; Kumala et al. 2022), sehingga pemegang uang yang semula besar menjadi kecil, namun diikuti juga dengan kebijakan harga yang mengalami penurunan, sebab bila tidak akan menimbulkan gejolak kenaikan harga yang tidak sepadan dengan penurunannya.
 - ✓ Pemberian kredit langsung dari pemerintah seperti kredit yang ditujukan untuk program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah langsung menyalurkan kredit melalui lembaga keuangan perbankan yang ditunjuk seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Abdurrohim 2021e; Ellyana, Paerah, and Musdayanti 2020; Malelak, Kellen, and Rozari 2020; Mongkito et al. 2021).
- b. Kebijakan moneter secara tidak langsung yang dilakukan oleh Bank Sentral melalui kebijakan seperti:
- ✓ Kewajiban perbankan untuk memelihara kewajibannya, misalnya 5% dari total dana pihak ketiga, sehingga dana yang telah diserap dari masyarakat tidak seharusnya disalurkan seluruhnya (Abdurohim 2022b; Bhattarai 2020; Ebiaghan and Jeroh 2020; Hoque et al. 2020; Y. Wang et al. 2019).
 - ✓ Memberikan fasilitas pinjaman kepada dunia perbankan, sehingga perbankan memiliki kemampuan untuk menyalurkan dana yang diperoleh untuk tujuan produktif.
 - ✓ Kebijakan pasar terbuka (Bryan and Williams 2021; Goyal 2011; Maipita 2020; Monetary Policy and Commercial Banks Assets Quality in Nigeria: Panel Data Analysis 2020; Pane, Maulidizen, Arfianty, Wardhana, Musnaini, Ardianingsih, Abdurohim, Nugraha, Kosasih, and Adawiyah 2022; Plantinga and Adams 2021) yaitu kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk membeli atau

menjual surat berharga negara (SBN) kepada Bank-Bank yang melaksanakan operasional, sehingga dana yang dikelola oleh perbankan tersebut dapat dikendalikan jumlahnya, sehingga mereka akan sulit untuk melakukan spekulasi dari dana yang diperoleh dari penyimpanan masyarakat.

- ✓ **Himbauan kepada masyarakat yang memiliki dana yang besar maupun kepada perbankan untuk melaksanakan aktivitas kegiatannya sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan sehingga kebijakan moneter yang telah ditetapkan dapat dikendalikan.**

9.7. Perkembangan Kebijakan Moneter Di Indonesia

Bank Sentral Indonesia sejak berdiri telah mampu mengawal kondisi moneter Pemerintah Indonesia, sebab bagaimanapun yang terjadi pada kondisi global, Bank Sentral mampu mengelola moneternya dengan baik dan terkendali, seperti pada tahun 2000an, dimana kondisi perekonomian global tidak baik, ditandai dengan tingkat bunga yang melambung tinggi sampai 60% lebih, namun berkat kepiawaian pengelola Bank Sentral, pemerintah Indonesia telah diselamatkan baik dari tatanan pergaulan sebagai bangsa yang mampu berdiri sendiri, maupun mengawal perekonomian Indonesia (Sulistyaningsih and Sultan 2021; Wahyuni et al. 2022) sebagai negara yang disegani. Tentunya bila tidak ada pengawalan dalam penerapan kebijakan moneter, maka pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak seperti sekarang yang kita rasakan.

Kebijakan moneter yang dilaksanakan di Indonesia sepenuhnya diatur oleh Bank Sentral untuk tujuan pengendalian moneter, sehingga mampu menetapkan perolehan tujuan akhir mampu mendorong aktivitas perekonomian Indonesia berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan baik diatur selama lima tahunan maupun secara tahunan. Kebijakan moneter merupakan satu kesatuan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah secara makro (Whitehead 2021), yang mengutamakan

terjadinya perkembangan kegiatan ekonomi sesuai dengan target yang ditetapkan meskipun banyak halangan yang menghadang seperti pandemi covid-19, namun perekonomian Indonesia terus melaju, guna meningkatkan kesejahteraan yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pada setiap periode kebijakan moneter mengalami tantangan serta kemampuan untuk menyelesaikannya. Periode kebijakan moneter di Indonesia yang berpengaruh, diantaranya:

a. Masa krisis 1977 merupakan masa yang penuh dinamika dalam menangani kebijakan moneter, dan kebijakan moneter tidak bisa berdiri sendiri, dipengaruhi oleh kebijakan makro suatu bangsa yang dipengaruhi atas situasi politik, sehingga memerlukan penanganan sendiri untuk bisa keluar dari permasalahan moneter.

- ✓ Periode 1945-1952 ditandai dengan berdirinya Bank Sentral di Indonesia untuk mengawal perjalanan perekonomian yang didalamnya terdapat kebijakan moneter menentukan perjalanan kehidupan bangsa Indonesia
- ✓ Periode 1953-1967 ditandai dengan diberlakukannya UU No 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, sehingga ada landasan formal untuk bisa mengelola moneter di Indonesia, meskipun pada saat itu terjadi inflasi sebesar 600% pada tahun 1965 dikenal dengan periode hyperinflation.
- ✓ Periode 1968-1997 ditandai dengan masa stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi (1968-1972). Pada periode ini memberikan pelajaran yang sangat berharga dimana kebijakan moneter dan fiskal harus dilakukan dengan hati-hati, kebijakan fiskal yang ditandai dengan pengaturan perpajakan dan anggaran, haruslah diatur sedemikian rupa sehingga kebijakan fiskal mampu mengendalikan defisit anggaran pada batas wajar sehingga tidak berdampak pada kegiatan lainnya. Setiap pengeluaran yang dipergunakan oleh pemerintah haruslah mampu mendorong pada

ekonomi riil dan juga kebijakan moneter tidak boleh dipergunakan untuk membiayai defisit anggaran pada sisi kebijakan fiskal.

- ✓ Periode 1971-1982 merupakan periode booming minyak, menyebabkan kebijakan fiskal lebih leluasa dalam menggarap pembangunan ekonomi sehingga kebijakan moneter harus ketat takut terjadi kenaikan inflasi, untuk mensinergikan antara kebijakan fiskal, jumlah uang beredar, serta penyaluran kredit, Bank Indonesia mewajibkan Bank-Bank di Indonesia untuk membuat rencana penyaluran kredit sehingga bisa diketahui jumlah dana yang akan disalurkan oleh perbankan jangan sampai tidak terkendali, sehingga menimbulkan inflasi.
- ✓ Periode 1983-1977 merupakan masa deregulasi, debirokratisasi dan liberalisasi ekonomi, ditandai dengan liberalisasi perbankan yang memberikan kemudahan, sehingga Bank Indonesia menerapkan Kebijakan Moneter secara tidak langsung melalui pelepasan instrumen SBI, penurunan Reserve Requirement menjadi 2%

b. Periode setelah krisis 1997 merupakan masa ditandai dengan globalisasi, sehingga peran Bank Indonesia harus fokus pada kebijakan moneter, pembayaran serta pengawasan perbankan, dengan demikian pentingnya stabilitas fiskal, serta nilai tukar menyebabkan Bank Indonesia terus mencari cara untuk mampu mengelola kebijakannya.

Kebijakan moneter yang telah ditempuh oleh Bank Sentral Indonesia, selalu berubah kebijakan yang diterapkan, guna memperoleh keseimbangan ekonomi, serta yang diutamakan adalah mengelola jumlah uang yang beredar, sehingga keberhasilan dalam membatasi jumlah uang yang beredar akan mampu menekan inflasi sehingga membawa kegairahan dalam melakukan kegiatan bisnis, bisnis akan terus berkembang jika apa yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang

mampu memberikan keuntungan. Iklim usaha perlu diciptakan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan daya saing terhadap kemampuan para pebisnis. Pebisnis melakukan aktivitas jika menghasilkan keuntungan yang sepadan. Karena itu kondisi fiskal, moneter diperlukan keterpaduan satu sama lainnya.

Pada bisnis serba digital ini (Dharamsi 2019; Febrianti et al. 2021; Islam 2020; Khasanov 2020; Rahman and Islam 2021; Rukmini et al. 2022), kebijakan moneter mendapat tantangan untuk mampu menyelesaikan perhitungan jumlah uang beredar dimana uang yang ada pada perusahaan-perusahaan *Marketplace* (Abdurrohim 2021 f; L. Chen and Zhu 2021; González 2020; Kumar et al. 2021; Maier and Wieringa 2021; Silchenko and Visconti 2022; Tkachuk et al. 2022; Viswanathan et al. 2021; Yenipazar 2021) akan terus bertambah dari aliran transfer perbankan, sehingga perlu diantisipasi pertumbuhannya, karena bagaimanapun setiap perubahan komponen akan mempengaruhi terhadap kebijakan moneter

Gambar 6
Perkembangan Fungsi Bank Indonesia





Sumber: (Bank 2014)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim. 2021a. "Analisa Transaksi Perdagangan Saham Pada Pasar Sekunder." *Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 18(1): 1–11. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Analisa+Transaksi+Perdagangan+Saham+pada+Pasar+Sekunder &btnG= (April 24, 2022).
- . 2021b. "BAB 2: MENJAGA SUSTAINABLE BUSINESS DALAM MEMASUKI ERA NEW NORMAL." *Books.Google.Com*. <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=978-623-6995-21-1&searchCat=ISBN> (April 24, 2022).
- . 2021 c. 1 *BAB 6: PERENCANAAN DAN STRATEGI*. 1st ed. eds. Dian Utami Sutiksno and Dewi Ratna. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING. <https://www.google.com/search?tbm=bks&q=knowlwdge+management> (May 3, 2022).
- . 2021d. 1 *BAB 10: Bisnis Dan Perlindungan Konsumen*. 1st ed. eds. Endah Kurniawati and Lily Stephanie Indarto. CIREBON: INSIANA. <http://insaniapublishing.com>.
- . 2021e. 1 *BAB 11: TEKNIK PENYELESAIAN KREDIT*. 1st ed. eds. Zuhrotun Trisna Aulia, Jenita, and HS Sufyati. Cirebon: INSANIA. <http://insaniapublishing.com>.
- . 2021f. 1 *BAB 16: POTENSI MEDIA ELEKTRONIK BAGI KEMAJUAN DUNIA PENDIDIKAN*. 1st ed. eds. Christian Soleiman Einar and Sri Fitriani Abditama. Cirebon: Insania. <http://insaniapublishing.com>.

- . 2022a. *BAB 5: PERENCANAAN DAERAH DAN ANGGARAN KERJA*. Purbalingga. eureka media aksara@gmail.com (May 19, 2022).
- . 2022d. 1 *BAB 8: Mobile Commerce*. 1st ed. ed. Sudirman: S.E., M.M. Acai. Bandung: Media Sains Indonesia. www.penerbit.medsan.co.id (May 19, 2022).
- . 2022e. 1 *BAB 15: ANALISIS SENSITIVITAS-PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI*. 1st ed. ed. Suwandi. Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA. <https://www.google.com/search?tbm=bks&q=knowlwdge+management> (May 3, 2022).
- . 2022f. "BUSINESS PLANNING MODELS AND STRATEGIES TO ACHIEVE OPTIMAL RESULTS." *osf.oi*.
- . 2022g. *MENANGANI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PADA MASA PANDEMI COVID-19*. Purbalingga. eureka media aksara@gmail.com (May 19, 2022).
- Abdurrahman, Abdurohim. 2021g. "Analisa Transaksi Perdagangan Saham Pada Pasar Sekunder." *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi* 18(1): 73–83.
- . 2022. "Analisis Pengaruh Disiplin Kerja Dan Pelatihan Teknis Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Sekretariat Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 3(5): 3027–35.
- Afriansyah, Afriansyah et al. 2022. *Eureka Media Aksara Studi Kelayakan Rencana Bisnis*. ed. Suwandi Suwandi. Eureka Media Aksara.
- Agustia, Dian, Nur Pratama Abdi Muhammad, and Yani Permatasari. 2020. "Earnings Management, Business Strategy, and Bankruptcy Risk: Evidence from Indonesia." *Heliyon* 6(2): e03317. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03317>.
- Alonso, S L Nájñez, M Á Echarte Fernández, Danz Base, and ... 2020. "Reasons Fostering or Discouraging the Implementation of Central Bank-Backed Digital Currency: A Review." *Economies*.

<https://www.mdpi.com/726292>.

- Amri, Khoiril. 2016. "KEBIJAKAN MONETER PADA AWAL PEMERINTAHAN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN (STUDI ANALISIS PADA MASA RASULULLAH SAW DAN SAHABAT)." *MUQTASHID* 1(1).
- Andolfatto, D. 2019. "7 Central Bank Digital Currencies and Private Banks." *The Economics of Fintech and Digital Currencies*. [https://voxeu.org/system/files/epublication/Economics of Fintech and Digital Currencies_0.pdf#page=66](https://voxeu.org/system/files/epublication/Economics_of_Fintech_and_Digital_Currencies_0.pdf#page=66).
- Andriyani, Ina, and Crystal Armero. 2016. "PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI, NILAI BUKU TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)." *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis* ² 15.
- Atmaja, Yustisiana Susila, and Darminto Hartono Paulus. 2022. "PARTISIPASI BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA." *Masalah-Masalah Hukum* 51(3).
- Bafadal, Azhar, M Arief Dirgantoro, and Surni Surni Surni. 2018. "DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL DAERAH TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DAN MAKRO EKONOMI PERTANIAN." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 18(1).
- Bank, Indonesia. 2014. *Kelembagaan Bank Sentral*.
- Bank Indonesia. 2020. "Pengenalan Inflasi." *Pengenalan Inflasi* (<https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>).
- . 2021. "Apa Itu Inflasi." *Bank indonesia*.
- Bariah, Inayatul, Nuzulul Anam, A. Ghazi Mubarak, and Sahril Fatkur Rohman. 2020. "Strategi Kebijakan Moneter Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Perang Dagang AS-China." *Jurnal Humaniora* 4(2).
- Beniak, P. 2019. *Central Bank Digital Currency and Monetary Policy: A*

Literature Review. [mpra.ub.uni-muenchen.de.
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/96663.](https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/96663)

- Bhattacharai, Bishnu Prasad. 2020. "Bank Lending Determinants: Evidence from Nepalese Commercial Banks." *International Journal of Management (IJM)* 11(10).
- Bryan, Kevin A., and Heidi L. Williams. 2021. "Innovation: Market Failures and Public Policies." *Handbook of Industrial Organization* 5(1).
- Bryant, William David Anthony. 2021. *Advanced Microeconomics*.
- Buera, Francisco J., Joseph P. Kaboski, and Yongseok Shin. 2021. "The Macroeconomics of Microfinance." *Review of Economic Studies* 88(1).
- Cachanosky, Nicolás. 2021. "Microfoundations and Macroeconomics: 20 Years." *Review of Austrian Economics* 34(2).
- Chaidir, Taufiq, and Gusti Ayu Arini. 2019. "Guncangan Indikator Makro Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Pada Jalur Nilai Tukar." *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1(1).
- Chen, Jennjou, and Tsui Fang Lin. 2020. "Do Cooperative-Based Learning Groups Help Students Learn Microeconomics?" *SAGE Open* 10(3).
- Chen, Li, and Fengxia Zhu. 2021. "Seller Information Sharing in Online Marketplaces." *Journal of Marketing Management* 37(11–12).
- Choudhry, Moorad, and Michele Lizzio. 2015. "Interest-Rate Models I." In *Advanced Fixed Income Analysis*, Elsevier, 37–64.
- Debata, Byomakesh, Soumya Ranjan Dash, and Jitendra Mahakud. 2021. "Monetary Policy and Liquidity: Does Investor Sentiment Matter?" *IIMB Management Review* 33(3).
- Dharamshi, L. 2019. "Digital-Only Banks (Next Level of Banking Experience)." *Journal of Global Economy*. <http://rcssindia.org/jge/index.php/jge/article/view/548>.

- Duc, J, and M Rojas-Breu. 2021. "Central-Bank Digital Currency and Risk Sharing in a Currency Union." https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2021/06/10/gdre_duc.pdf.
- Ebiaghan, Orits Frank, and Edirin Jeroh. 2020. "Deposit Insurance Fund and the Quality of Risk Assets of Nigerian Deposit Money Banks." *Management Science Letters* 10(5).
- ter Ellen, Saskia, Vegard H. Larsen, and Leif Anders Thorsrud. 2022. "Narrative Monetary Policy Surprises and the Media." *Journal of Money, Credit and Banking* 54(5).
- Ellyana, E, A Paerah, and Musdayanti. 2020. "Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM." *Jurnal Administrasi ...* 8(2).
- Fadhilah, Putri Alyani, Ivan Yulivan, and Herlina Juni Risma Saragih. 2021. "Strategi Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Mendukung Komite Nasional Keuangan Syariah Untuk Mewujudkan Ekonomi Pertahanan." *Jurnal Ekonomi Pertahanan* 7(1).
- Floyd, John E. 2010. *Interest Rates, Exchange Rates and World Monetary Policy*.
- Goel, S, and H Mittal. 2020. "Economic, Legal and Financial Perspectives on Cryptocurrencies: A Review on Cryptocurrency Growth, Opportunities and Future Prospects." *World Review of Entrepreneurship*
<https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/WREMSD.2020.111391>.
- González, Sara. 2020. "Contested Marketplaces: Retail Spaces at the Global Urban Margins." *Progress in Human Geography* 44(5).
- Goyal, Ashima. 2011. "A General Equilibrium Open Economy Model for Emerging Markets: Monetary Policy with a Dualistic Labor Market." *Economic Modeling* 28(3).
- Hatmawan, Aglis Andhita. 2017. "Pengaruh Pendapatan Dan Suku Bunga Konvensional Pada Perilaku Menabung Nasabah Bank Syariah

Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi.” *Prosiding Seminar hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat UNIPMA*: 314–21.

Hertinawati, Hertinawati. 2021b. “Analisa Terhadap Kebijakan Fiskal Dan Moneter Indonesia Dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19.” *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)* 4(2).

Hoque, Md. Ariful, Afzal Ahmad, Mustafa Manir Chowdhury, and Mohammad Shahidullah. 2020. “Impact of Monetary Policy on Bank’s Profitability: A Study on Listed Commercial Banks in Bangladesh.” *International Journal of Accounting & Finance Review* 5(2).

Huber, J. 2019. “Digital Currency. Design Principles to Support a Shift from Bank Money to Central Bank Digital Currency.” *real-world economics review*.
<http://www.paecon.net/PAEReview/issue88/whole88.pdf#page=76>.

Islam, S. 2020. *For Ensuring Rapid-Growth Risk-Free Digital-Banking in Greek-Economy: An Application of Akim’s Model*. papers.ssrn.com.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3940760.

Ismawati, Kun et al. 2022. *Eureka Media Aksara Pengetahuan Dasar Pasar Modal Dan Investasi*. ed. Suwandi Suwandi. Eureka Media Aksara.

Juhro, Solikin M., and Bernard Jindan lyke. 2019. “Monetary Policy and Financial Conditions in Indonesia.” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 21(3).

Langley, Paul, and John H. Morris. 2020. “Central Banks: Climate Governors of Last Resort?” *Environment and Planning A* 52(8).

Li, Fangfang, Jorma Larimo, and Leonidas C. Leonidou. 2021. “Social Media Marketing Strategy: Definition, Conceptualization, Taxonomy, Validation, and Future Agenda.” *Journal of the Academy of Marketing Science* 49(1).

- Maier, Erik, and Jaap Wieringa. 2021. "Acquiring Customers through Online Marketplaces? The Effect of Marketplace Sales on Sales in a Retailer's Own Channels." *International Journal of Research in Marketing* 38(2).
- Mohammed, Sarpong, Abubakari Mohammed, and Edward Nketiah-Amponsah. 2021. "Relationship between Exchange Rate Volatility and Interest Rates Evidence from Ghana." *Cogent Economics and Finance* 9(1).
- "Monetary Policy and Commercial Banks Assets Quality in Nigeria: Panel Data Analysis." 2020. *American International Journal of Economics and Finance Research*.
- Mongkito, Abdul Wahid et al. 2021. "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO." *Robust: Research of Business and Economics Studies* 1(1).
- Murdiah, Asila, and Prasetyo Ari Bowo. 2020. "Analisis Kausalitas Antara Investasi, Pendapatan Nasional, Dan Jumlah Uang Beredar." *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics* 3(1).
- Narsa, I Made. 2014. "WHAT IS STRATEGY?" *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*.
- del Negro, Marco, Domenico Giannone, Marc P. Giannoni, and Andrea Tambalotti. 2019. "Global Trends in Interest Rates." *Journal of International Economics* 118: 248–62.
- Ramadhani, Rizky Eka Suci, and Uswatun Hasanah. 2021. "Independensi Bank Indonesia Dalam Penanganan Permasalahan Bank Sistemik Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016." *Simposium Hukum Indonesia* 4(1).
- Rudd, Jeremy B. 2022. "Why Do We Think That Inflation Expectations Matter for Inflation? (And Should We?)." *Review of Keynesian Economics* 10(1).
- Rukmini, Meme et al. 2022. *Eureka Media Aksara Implementasi*

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Tata Kelola Menuju Pemerintahan Yang Baik)*. ed. Suwandi Suwandi. Eureka Media Aksara.
- Saidi, La Ode et al. 2021. "Exchange Rate, Exchange Rate Volatility and Stock Prices: An Analysis of the Symmetric and Asymmetric Effect Using Ardl and Nardl Models." *Australasian Accounting, Business and Finance Journal* 15(4).
- Sari, Widya Intan. 2019. "Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Terhadap Return LQ 45 Dan Dampaknya Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)* 3(1).
- Schoenmaker, Dirk. 2021. "Greening Monetary Policy." *Climate Policy* 21(4).
- Sebayang, Jeffry. 2021. "RESPON KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PANDEMI COVID 19." *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN* 4(2).
- Sihaloho, Estro Dariatno. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia." *ResearchGate* (April).
- Silalahi, Marto, Elly Romy Abdurrahim, Vivi Chandra, and Acai Sudirman. "Jurnal Pendidikan Progresif."
- Wu, Meng, Yun Ran, and Stuart X. Zhu. 2022. "Optimal Pricing Strategy: How to Sell to Strategic Consumers?" *International Journal of Production Economics* 244: 108367.
- Yenipazarli, Arda. 2021. "The Marketplace Dilemma: Selling to the Marketplace vs. Selling on the Marketplace." *Naval Research Logistics* 68(6).
- Yulius, Handy. 2020. "Penggalian Data Pantauan Pasar Valuta Asing." *Laporan Kuliah Kerja Praktek Universitas Raharja* 2020(1712499711).

PROFIL PENULIS



Dr. Abdurohim, SE, MM.

Kelahiran Cirebon (Jawa Barat) 12 April 1964, berkecimpung sebagai praktisi Perbankan selama 31 tahun pada PT. Bank Papua, dengan jabatan terakhir Vice President pada Divisi Perencanaan Strategis (Renstra). Keahlian yang dimiliki adalah Audit Perbankan, Perencanaan Strategis, Pemasaran, Manajemen Human Capital, Penyusunan BPP & SOP dan Struktur Organisasi Perusahaan Perbankan. Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Manajemen dari Universitas Cendrawasih (2017), Pendidikan Magister Manajemen (S2)-Manajemen Keuangan, dari Universitas Hasanudin (2003), dan Pendidikan Sarjana (S1) Manajemen Keuangan & Perbankan dari STIE YPKP Bandung (1989). Saat ini sebagai pengajar/dosen Lektor pada Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat.

Telah menyelesaikan penulisan buku (Kolaborasi) sebanyak: **86 Book Chapter**, dan **3 buku Penulis tunggal**. E-Commerce (Strategi dan Inovasi Bisnis berbasis Digital), Analisa Laporan Keuangan, Anggaran Operasional Perusahaan Manufaktur, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, Etika Bisnis Suatu Pengantar, HRM in Industry 5.0, Isu-Isu Kontemporer Akuntansi Manajemen, Kesehatan Lingkungan suatu pengantar, Knowledge Management, Marketing Tourism Service, Menakar Ekonomi masa pademi & New normal, New Normal Era Edisi II, Operations Management, Tantangan Pendidikan Indonesia di Masa depan, Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia, The Art of Branding, Pasar Modal Syariah, Manajemen Pemasaran (Implementasi Strategi Pemasaran di Era Society 5.0). Perencanaan & Simulasi Bisnis,

Manajemen Strategi, Business Sustainability, eCommerce, Mencari wajah pembangunan di Indonesia, Business Intelligence, Digital Economy e Government, Analisa Laporan Keuangan, Metode Penelitian Kualitatif, Pengantar Manajemen, Manajemen Konflik, Sistem Transaksi Keuangan, Kebijakan Perpajakan di Indonesia. Keuangan Daerah (Perencanaan & Anggaran Daerah), Konsep dasar Akuntansi, Financial Technology, HRM: Perencanaan & Rekrutmen SDM.

Telah mengikuti pendidikan/Lulus: ***Sekolah Pimpinan Bank (Sespibank), Sekolah Pemimpin Cabang, Manajemen Risiko level 4, Keuangan Berkelanjutan (SDGs).***

Bersertifikat : Dosen Profesional (Serdos)

Telah mengikuti pendidikan/Lulus: ***Sekolah Pimpinan Bank (Sespibank), Sekolah Pemimpin Cabang, Manajemen Risiko level 4, Keuangan Berkelanjutan (SDGs).***

Bersertifikat : Dosen Profesional (Serdos)

Anggota : *Project Management Office Indonesia (POPI)*

Email : Abdurrohim@mn.Unjani.ac.id

PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Oleh

Muhammad Jamil, SE. MM

10.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Hasil produksi barang dan jasa ini tergambar melalui nilai pendapatan nasional suatu negara. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan ciri berupa bertambahnya produksi barang dan jasa, bertambahnya output per kapita, dan perubahan pada struktur ekonomi. Contoh pertumbuhan ekonomi bisa kita lihat pada pembangunan kawasan industri di beberapa daerah, seperti Cikarang. Selain itu, pemerintah juga gencar mendorong UMKM untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dan beragam, seperti makanan, pakaian, sepatu, aksesoris, dan lain-lain.

Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, kita dapat menggunakan 2 konsep pendapatan nasional yaitu Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP). GDP adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi atau pendapatan semua warga negara yang ada di dalam negeri, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing. Dalam bahasa Indonesia, GDP disebut sebagai Produk Domestik Bruto. GNP adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi atau pendapatan semua warga asli yang tinggal di suatu negara maupun yang berada di luar negeri. Dalam bahasa Indonesia, GNP disebut sebagai Produk Nasional Bruto.

Untuk menghitung besarnya pertumbuhan ekonomi, bisa memilih pendapatan nasional mana yang paling tinggi diantara keduanya.

Umumnya, negara berkembang menggunakan GDP untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedangkan GNP digunakan oleh negara-negara maju. Hal ini selaras dengan pernyataan berikut:

- 1) Jika GDP lebih besar dari GNP, dapat dipastikan suatu negara masih berada di tahap berkembang. Karena masih menerima bantuan modal dari luar negeri.
- 2) Jika GNP lebih besar dari GDP, maka perekonomian negara tersebut tergolong maju. Karena negara tadi mampu menanamkan modalnya ke negara tetangga.

Formula mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara:

$$Gt = ((PBDt - PBDt-1) / PBDt-1) \times 100\%$$

Keterangan:

GT = Laju pertumbuhan ekonomi

PBDt = Nilai PDB periode t

PBDt-1 = Nilai PDB periode sebelumnya Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro, dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, terdapat tiga komponen penentu utama yaitu:

1. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia;
2. Pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang;
3. Kemajuan teknologi

Ketiga faktor di atas sangat seuitable dengan keadaan dan perkembangan zaman pada era globalisasi dan digitalisasi. Mayoritas negara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang baik memiliki komponen penentu tersebut.

10.2. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah peningkatan GNP dan GDP suatu

negara, yang diiringi dengan perubahan kualitas hidup dan pemerataan pendapatan masyarakat. Tujuan pembangunan ekonomi tak hanya mementingkan jumlah pendapatan negara, tetapi juga fokus terhadap kesejahteraan penduduk. Contoh pembangunan ekonomi antara lain: pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan jalan tol serta moda transportasi, dan aspek lain yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Jika pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan angka alias kuantitatif, maka pembangunan ekonomi mempunyai 3 indikator penting untuk mengukur keberhasilannya, yaitu Indikator Moneter, Indikator Non Moneter, dan Indikator Campuran.

1. Indikator Moneter

Indikator moneter pada pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita suatu negara. Menghitung pendapatan per kapitadilakukan dengan membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di negara tersebut.

2. Indikator Non Moneter

Indikator non moneter pada pembangunan ekonomi terdiri dari tiga aspek, yaitu:

- a. Angka Harapan Hidup, yang merupakan tolak ukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan program pembangunan kesehatan dan kecukupan gizi.
- b. Angka Kematian Bayi, yakni jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.
- c. Angka Melek Huruf, adalah tolak ukur keberhasilan sistem pendidikan untuk mengenalkan kemampuan baca tulis. Angka melek huruf berkisar dari 0 hingga 100. Semakin tinggi nilainya, menjadi tanda bahwa sistem pendidikan di negara tersebut sudah berjalan efektif.

3. Indikator Campuran

Indikator campuran pada pembangunan ekonomi terdiri dari dua aspek, yaitu:

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional Inti (SUSENAS INTI), adalah survei tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. SUSENAS INTI merupakan data penting yang digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Dalam SUSENAS INTI, data yang dikumpulkan antara lain; tingkat pendidikan, kesehatan, perumahan, jumlah angkatan kerja, keluarga berencana, kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses ke media massa.
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), adalah data yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk dari 3 dimensi dasar, yaitu usia, pengetahuan, dan standar kelayakan hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai beberapa manfaat. Pertama, sebagai alat ukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup penduduk. Kedua, untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu negara. Ketiga, IPM berguna untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Kemajuan pembangunan nasional tentu harus didukung oleh Kemajuan teknologi Pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability).

1. Pertumbuhan (growth), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.
2. Pemerataan (equity), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam

pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.

3. Berkelanjutan (sustainability), sedangkan tujuan berkelanjutan pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi. Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung didaerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan tujuan nasional.

10.3. Perbedaan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Perbedaan antara Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara, sedangkan pembangunan ekonomi mengacu pada pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kenaikan pendapatan per kapita, sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan kualitas hasil produksi. Sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang diterapkan juga mempengaruhi pembangunan ekonomi.

Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup impresif pada kuartal II 2022 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat pada triwulan IV 2022. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan utama untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi, seperti Program PC-PEN dan penguatan sektor pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi.

Berikut adalah penjelasan singkat tentang perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan dalam output ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Ini biasanya diukur dengan menggunakan indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan per kapita, dan laju pertumbuhan PDB. Pertumbuhan ekonomi menyoroti peningkatan produksi dan pendapatan suatu negara. Fokus utama pertumbuhan ekonomi adalah pada aspek kuantitatif dan mencerminkan perubahan dalam ukuran ekonomi.

2. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi mencakup dimensi yang lebih luas daripada pertumbuhan ekonomi. Ini melibatkan perubahan yang berkelanjutan dan berkelanjutan dalam struktur ekonomi suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi melibatkan faktor-faktor seperti peningkatan standar hidup, peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, kesetaraan sosial, pemerataan distribusi pendapatan, akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi berfokus pada perubahan dalam ukuran ekonomi dan output, sedangkan pembangunan ekonomi melibatkan perubahan yang lebih luas dalam struktur dan kualitas kehidupan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah konsep kuantitatif, sedangkan pembangunan ekonomi melibatkan dimensi kualitatif. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tanpa pembangunan ekonomi yang signifikan, tetapi pembangunan ekonomi biasanya melibatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi cenderung lebih fokus pada aspek

produksi dan pendapatan, sedangkan pembangunan ekonomi juga memperhatikan aspek sosial, kesejahteraan, dan lingkungan. Kedua konsep ini penting untuk memahami perkembangan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi, tetapi tujuan akhirnya adalah mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup semua orang dalam masyarakat.

Perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi dapat juga dilihat dari ciri, tujuan, indikator, dan manfaat. Dapat dijabarkan pada poin-poin berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan nilai GDP atau GNP, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan GDP atau GNP yang disertai perubahan kualitas hidup masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan naiknya pendapatan per kapita. Sedangkan pembangunan ekonomi ditandai dengan pemerataan pendapatan penduduk suatu negara.
3. Pertumbuhan ekonomi mendorong kenaikan jumlah produksi barang dan jasa. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi, kualitas hasil produksi jadi perhatian utama.
4. Pertumbuhan ekonomi hanya diukur melalui pendapatan nasional. Sedangkan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi terdiri dari pendapatan per kapita, indeks kualitas hidup, dan indeks pembangunan manusia.
5. Pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif. Sedangkan pembangunan ekonomi sifatnya kualitatif.

10.4. Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara dipengaruhi oleh 7 faktor, yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, IPTEK,

Sistem Pemerintahan, Sosial Budaya, Modal, dan Kondisi Politik.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Perencanaan pembangunan ekonomi negara sangat bergantung pada kualitas manusia. Karena, SDM dibutuhkan untuk mengolah Sumber Daya Alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Supaya menjadi SDM yang berkualitas, individu harus mempunyai keahlian, rasa ingin tahu yang tinggi, selalu berinovasi, dan bertanggung jawab. Perlu diingat, kualitas penduduk atau SDM yang baik menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

2. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam meliputi tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, hasil tambang, dan hasil laut. Ketersediaan Sumber Daya Alam yang melimpah mempermudah proses pembangunan ekonomi. Kita sebagai Sumber Daya Manusia pun memiliki peluang lebih besar untuk lebih produktif.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Jika Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sudah ada, negara membutuhkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mengolahnya. Semakin canggih teknologi yang dimiliki, maka semakin besar peluang negara untuk maju. Melalui pemanfaatan IPTEK, negara dapat menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak, cepat, mudah, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

4. Sistem Pemerintahan

Pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan. Negara yang menganut sistem liberalis, memberi kebebasan pada penduduknya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem ekonomi terbagi menjadi 5, yaitu Tradisional, Komando, Liberal, Campuran, dan Sistem Ekonomi Pancasila yang berlaku di Indonesia.

5. Sosial Budaya

Nilai-nilai sosial budaya berpengaruh terhadap proses

pembangunan. Nilai ini dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat. Contohnya, budaya gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia atau etos kerja yang menjadi ciri khas masyarakat Jepang. Sebaliknya, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tentu menjadi lambannya proses pembangunan.

6. Modal

Modal sangatlah penting dalam membangun ekonomi suatu negara. Modal dibutuhkan untuk mengolah bahan baku, membeli peralatan, hingga mendirikan infrastruktur. Modal bisa diperoleh dari pelaku usaha itu sendiri, anggaran pemerintah, pihak swasta, atau bantuan investor luar negeri. Semakin tinggi modal yang dimiliki, semakin cepat pembangunan ekonomi mencapai target.

7. Kondisi Politik

Politik dan pembangunan ekonomi tentunya saling berhubungan. Jika kondisi politik di suatu negara sedang tidak baik, seperti mengalami peperangan atau kudeta, maka berpengaruh terhadap investor yang ingin menanamkan modal di negara tersebut. Sebaliknya, stabilitas politik akan mengundang investor untuk menanamkan modal mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Farmer, R. (2002). *Macroeconomics*, 2nd Edition. South-Western: Thomson Learning.
- Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C (2003). *Economic Development*. UK: Pearson Education Limited.
- Firmansyah, Herlan. Diana Nurdiansyah. *Aktif dan Kreatif Belajar Ekonomi*. 2016. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Indeks Pembangunan Manusia [Daring]. Tautan: <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1> (diakses 12-14 September 2023)
- Salsabila Nanda <https://www.brainacademy.id/blog/pertumbuhan-dan-perkembangan-ekonomi>

PROFIL PENULIS



Muhammad Jamil, SE., MM

**Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen
Universitas Putra Indonesia YPTK Padang**

Nama Lengkap dan gelar penulis ketiga ini adalah Bapak Muhammad Jamil, SE., MM, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana (SI) di program studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPPAS Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia, dan menyelesaikan pendidikan magister (S2) di program studi Magister Manajemen (M.M), fakultas Ekonomi (FE), Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Beliau merupakan seorang dosen di program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Terdapat beberapa mata kuliah yang diajarkan oleh beliau diantaranya yaitu Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi, Total Quality Manajemen (TQM), Seminar Sumber Daya Manusia (SDM) dll. Email beliau adalah muhammadjamil@UPIYPTK.AC.ID. Alamat kantor beliau adalah di Jalan Raya Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Ekonomi Makro

Teori-Teori Pengantar

Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Buku berjudul "Ekonomi makro: Teori-teori Pengantar" ini menghadirkan penjelasan secara rinci tentang konsep-konsep teoritis seputar Ekonomi Makro. Materi yang disajikan dalam buku ini dimulai dari Ruang Lingkup Ekonomi Makro, Perolehan dan Pengeluaran Nasional, Penentuan Kegiatan Ekonomi, Penawaran Uang, Kegiatan Ekonomi Nasional, Pengangguran, Inflasi dan Kebijakan Pemerintah, Kurs Valuta Asing, Neraca Pembayaran dan Kegiatan Ekonomi Terbuka, Hingga Materi Terkait Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Nasional. Ditulis oleh para dosen dan praktisi yang memahami bidang ekonomi, diharapkan buku ini dapat menjadi referensi tambahan untuk mendalami materi seputar ekonomi makro.

Penulis:

Zul Fadli, S.E., M.A.P. | Ade Onny Siagian, M.M., M.H., M.A.P., M.I.Kom.
Nurganda Siregar, S.E., M.Si | Dona Amelia, S.E., M.Si
Fandra Dikhi Januardani, S.E., M.M. | Nanda Harry Mardika, S.Pd., M.M.
Dr. Dedi Herdiansyah | Sriwanti Belani, S.E., M.M.
Dr. Abdurohim, S.E., M.M. | Muhammad Jamil, S.E., M.M.

Penerbit Gita Lentera

Cp. Admin: +62 851-5690-2329

git4lenter4@gmail.com

www.git4lentera.com

ISBN 978-623-09-5532-7



9 786230 955327

